

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

---



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

## **KERTAS KARYA ILMIAH PERORANGAN (TASKAP)**

**JUDUL**

**MEMBANGUN *POLITICAL WILL* DALAM PENGELOLAAN  
INDUSTRI SAWIT GUNA MENDUKUNG EKONOMI HIJAU**

Oleh

**NAMA : SYAHRIL SAHARDA, S.I.K., M.Si.**  
**NOMOR PESERTA : 084**

PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) LXVI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2024

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI tahun 2024 telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia berupa sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul: **“Membangun *Political Will* Dalam Pengelolaan Industri Sawit Guna Mendukung Ekonomi Hijau”**.

Penentuan judul Taskap ini didasari oleh Surat Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Judul Taskap Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI Tahun 2024 Lemhannas RI. Dalam kesempatan yang baik ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXVI di Lemhannas RI tahun 2024.

Ucapan yang sama juga penulis sampaikan kepada Tutor Taskap dan Tim Penguji Taskap, serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing dalam pembuatan Taskap ini hingga selesai sebagaimana ketentuan Lemhannas RI. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, mohon kiranya dapat diberi masukan dari semua pihak guna penyempurnaan penulisan naskah ini.

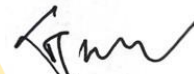
Besar harapan penulis semoga Taskap ini dapat dimanfaatkan sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI dan Pemerintah pada umumnya, termasuk bagi siapa saja yang berkenan membutuhkan terkait **“Membangun *Political Will* Dalam Pengelolaan Industri Sawit Guna Mendukung Ekonomi Hijau”**.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

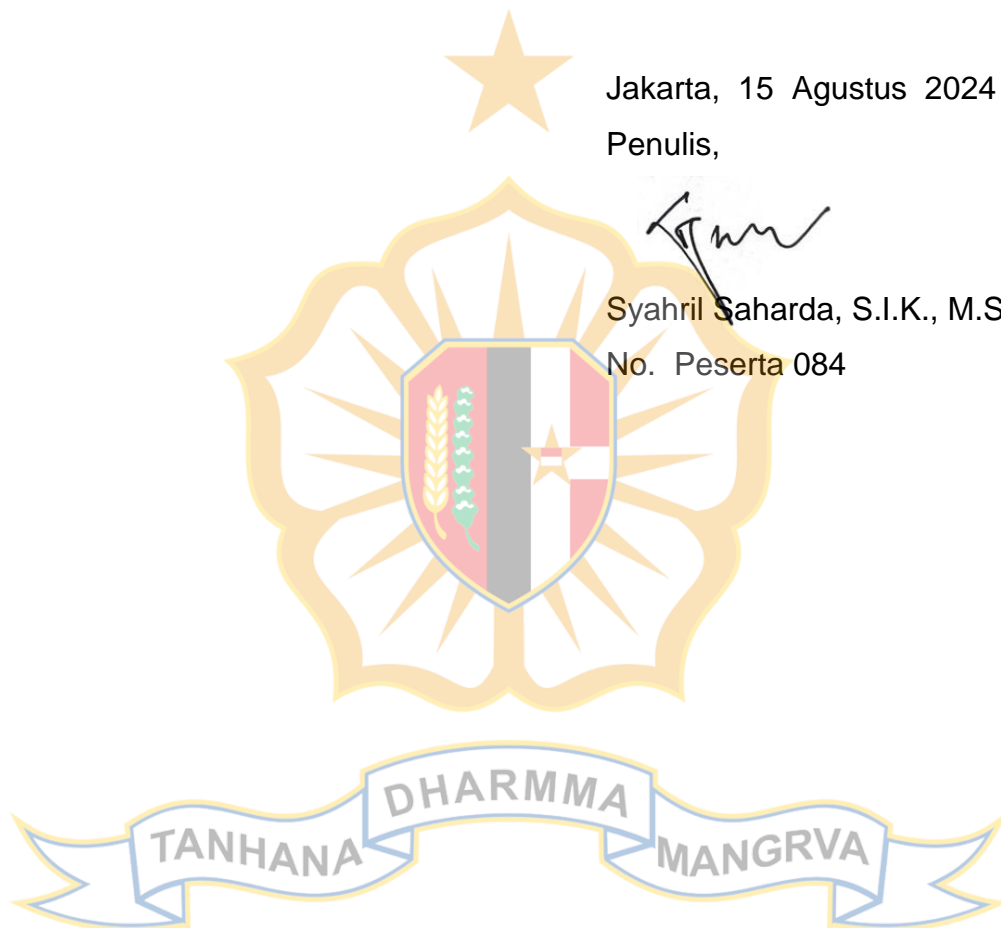
Jakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,



Syahril Saharda, S.I.K., M.Si.

No. Peserta 084



## **PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Syahril Saharda, S.I.K., M.Si.  
Pangkat : Kombes Pol  
Jabatan : Tajar Muda Bidang Hukum & HAM, Lemhannas RI  
Instansi : POLRI  
Alamat : JL. Kejaksaan IV Tengah No 15A RT 001 RW 003  
Kreo, Larangan , Kota Tangerang, Prov. Banten

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
- b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dibatalkan.

2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.



Jakarta, 15 Agustus 2024  
Penulis,



Syahril Saharda, S.I.K., M.Si.  
Komisaris Besar Polisi

**LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP**

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor Taskap dari:


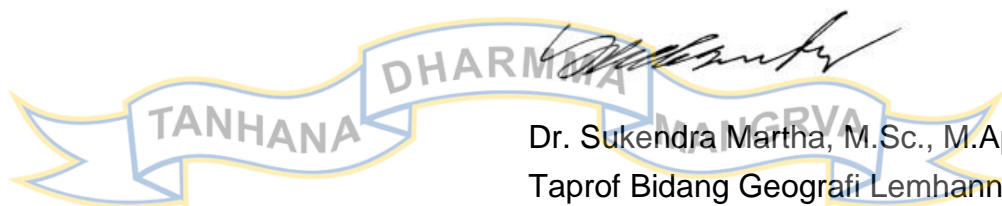
Nama : Syahril Saharda, S.I.K., M.Si.  
Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVI.  
Judul Taskap : MEMBANGUN *POLITICAL WILL* DALAM PENGELOLAAN  
INDUSTRI SAWIT GUNA Mendukung EKONOMI HIJAU

Taskap tersebut di atas telah ditulis “sesuai/~~tidak sesuai~~” dengan Petunjuk Teknis tentang Penulisan Ilmiah Peserta Pendidikan Lemhannas RI Tahun 2022, karena itu “layak/tidak layak” dan “disetujui/tidak disetujui” untuk diuji.

“”coret yang tidak diperlukan

Jakarta, 23 Juli 2024

Tutor Taskap,

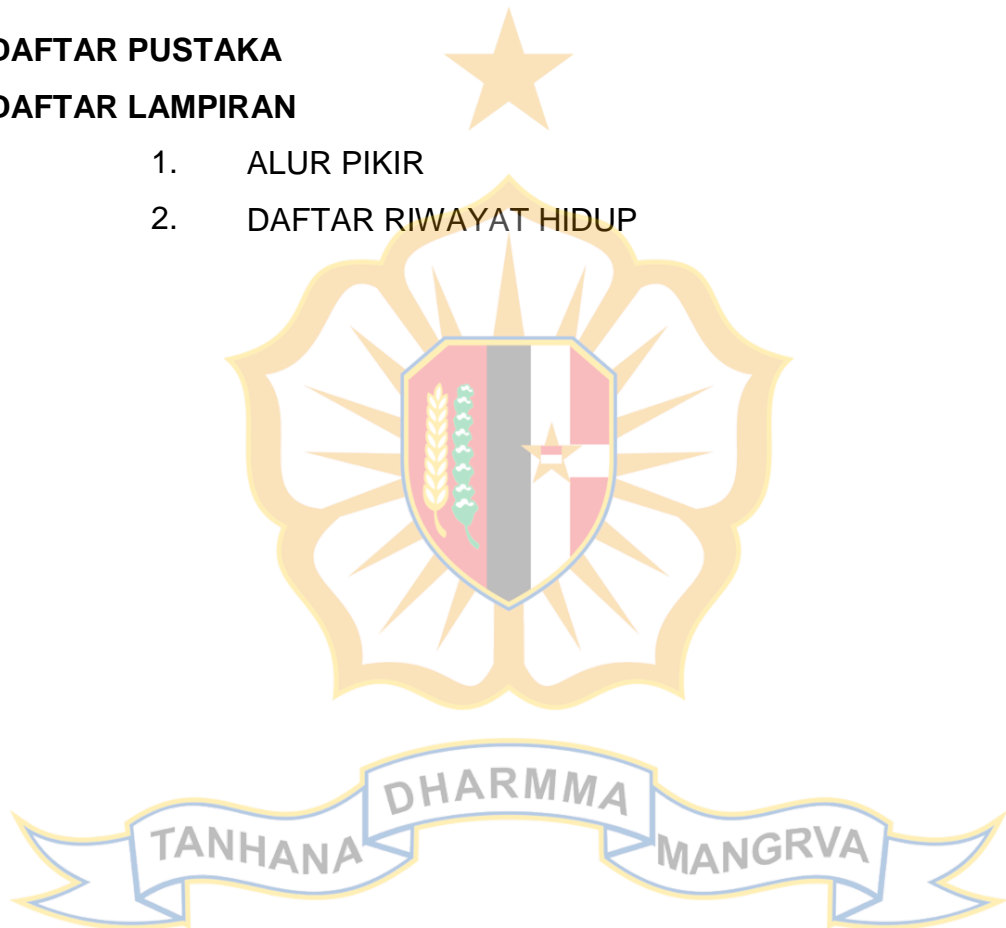
Dr. Sukendra Martha, M.Sc., M.App.Sc.  
Taprof Bidang Geografi Lemhannas RI

DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP</b> .....	iv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I                   PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	13
3. Maksud dan Tujuan .....	14
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	14
5. Metode dan Pendekatan .....	16
6. Pengertian .....	16
<b>BAB II                 LANDASAN PEMIKIRAN</b>	
7. Umum .....	21
8. Peraturan Perundang-undangan .....	22
9. Data dan Fakta .....	26
10. Kerangka Teoretis .....	33
11. Lingkungan Strategis .....	35
<b>BAB III               PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	46
13. Kondisi Pengelolaan Industri Sawit saat ini .....	49
14. Tantangan Membangun Political Will Dalam	

	Pengelolaan Industri Sawit .....	60
15.	Strategi Pengelolaan Industri Sawit Untuk Mendukung Ekonomi Hijau .....	78
<b>BAB IV PENUTUP</b>		
17.	Simpulan .....	97
18.	Rekomendasi .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		101
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
1.	ALUR PIKIR	
2.	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa, memiliki kesuburan tanah untuk mendukung pengembangan tanaman kelapa sawit yang hidup subur di daerah tropis. Posisi Indonesia berada diantara dua samudera, merupakan jalur strategis dalam transportasi dan perdagangan Internasional untuk mendukung perdagangan sawit di pasar global yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dunia terhadap minyak nabati setiap tahun terus meningkat. Hal ini menjadi peluang besar bagi Indonesia sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia saat ini. Meskipun Indonesia memiliki produksi kelapa sawit terbesar dan berpotensi mempengaruhi harga sawit dunia, namun harga sawit di Indonesia masih rendah. Peluang lain yang dimiliki Indonesia adalah banyaknya jumlah penduduk, apabila dibina dan dikerahkan sebagai tenaga kerja dapat menjadi modal besar yang sangat menguntungkan bagi usaha pengembangan sawit dengan berbagai macam turunannya. Jumlah penduduk tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sehingga belum berkontribusi secara signifikan terhadap produk industri sawit.

Industri sawit dapat mengembangkan produk turunan sawit di dalam negeri melalui pengolahan CPO. Secara ekonomi, hal ini akan memberikan nilai tambah dibandingkan dengan Indonesia mengekspor seluruh CPO. Sebagaimana disampaikan Meika Syahbana Rusli, Kepala *Surfactant and Bioenergy Research Center* (SBRC) IPB dalam webinar tentang Sosialisasi Inovasi Pangan Olahan dari Kelapa Sawit yang digelar oleh Tabloid Sinar Tani pada tanggal 25 Mei 2022, dengan menitikberatkan kepada potensi besar minyak kelapa sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) diterapkan dalam produk unggulan pangan, meskipun ada kampanye negatif menyebarkan informasi tentang lemak trans jahat pada kandungan CPO. Faktanya, lemak trans tidak terdapat pada kandungan CPO, namun sebaliknya memiliki kandungan nutrisi yang dapat meningkatkan kesehatan bagi tubuh manusia, seperti produk olahan asam lemak ataupun *oleum* dan *stearin* hasil produk turunan CPO.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> PPID IPB (2022) Inovasi Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit, Primadona Olahan Pangan di Masa Depan <https://ppid.ipb.ac.id/inovasi-produk-turunan-minyak-kelapa-sawit-primadona-olahan-pangan-di-masa-depan/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib



Sawit juga memiliki nilai tambah yang dapat digunakan sebagai pengganti lemak hewan dalam pembuatan sosis dan proses pembuatan permen jahe berbasis nira sawit. Minyak sawit memiliki kandungan nutrisi yang melimpah, seperti vitamin A, omega 9, omega 6, omega 3, betakaroten, dan vitamin E, dapat dimanfaatkan dalam berbagai produk olahan pangan, termasuk margarin, *shortening*, *frying fat*, *coating fat*, *coffee whitener*, pengisi susu dan krimmer biskuit. Pemanfaatan CPO sebagai sumber lemak dan kalori menunjukkan bahwa sawit berperan penting dalam pangan olahan<sup>2</sup>.

*Crude Palm Oil* (CPO) atau minyak sawit mentah diperoleh dari *mesocarp* atau daging buah kelapa sawit melalui proses ekstraksi. Tanda Buah Segar (TBS) dipanen dan diangkut ke pabrik untuk proses sterilisasi sebelum diperas minyaknya. Minyak tersebut kemudian disaring, dibersihkan untuk menghilangkan kotoran, kemudian dikeringkan sesuai standar CPO. Sebaliknya, *Palm Kernel Oil* (PKO) atau minyak inti sawit diperoleh dari biji keras buah kelapa sawit. Proses ekstraksi PKO memisahkan biji-bijian dari sekam dan menghancurkannya untuk mengekstrak minyaknya.

Cangkang yang tersisa dalam pengolahan sawit dapat digunakan sebagai biofuel, namun minyak sawit harus diproses lebih lanjut untuk dimurnikan sebelum digunakan dalam berbagai produk turunannya. Minyak kelapa sawit mentah memiliki banyak keunggulan unik, termasuk efisiensi produksi yang tinggi dan penerapan yang luas. Kelapa sawit merupakan tanaman yang sangat efisien dalam penggunaan lahan. Jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak nabati lainnya seperti kedelai, kelapa dan bunga matahari, kelapa sawit hanya menggunakan 10% dari lahan yang digunakan untuk tanaman penghasil minyak nabati lainnya, namun produksi kepala sawit mencapai 39% dari total produksi minyak nabati dunia<sup>3</sup>. Efisiensi sawit dalam penggunaan lahan dalam memproduksi minyak telah mengurangi kebutuhan lahan untuk menghasilkan minyak nabati yang menjadi kebutuhan

---

<sup>2</sup> Kemas Uwais Alqorni, Hatta Dahlan, Susila Arita (2024) Proses Terpadu Limbah Pabrik Kelapa Sawit Menggunakan Teknologi Elektrokoagulasi, Filter Karbon Aktif, Zeolit dan Pemisahan Membran <https://ijfac.unsri.ac.id/index.php/ijfac/article/view/337> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.43 wib

<sup>3</sup> Rachman, F., Sujadi, S., Adriwan Siregar, H., & Yenni, Y. (2024). *Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit*, 29 (1) "Pendekatan Seleksi Genomik Dalam Program Mendukung Pemuliaan Kelapa Sawit:". Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.48 wib

dunia. Selain itu, kelapa sawit juga memiliki keunggulan dapat menyerap karbon secara maksimal dibanding jenis pohon lain, mampu meningkatkan kesehatan jantung, mengurangi kolesterol jahat, dan mengurangi emisi karbon<sup>4</sup>.

Pada sektor nonmigas, usaha pengembangan Industri sawit dapat mewujudkan kemandirian energi melalui penggantian bahan bakar dari bahan fosil beralih ke produk biodiesel. Program pemerintah ini mewajibkan adanya pencampuran biodiesel dan bahan bakar solar yang bertujuan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak impor, meningkatkan penggunaan terhadap energi terbarukan dan meminimalisir emisi gas rumah kaca. Implementasi program B20 dan B30 telah memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, termasuk penghematan devisa yang berasal dari penurunan impor minyak. Penerapan program B20 ke B30 telah menurunkan angka impor sebesar 100 triliun lebih per tahun dengan implementasi program B20 telah menurunkan impor minyak sebesar Rp 43,8 triliun dan program B30 mencapai Rp 63,39 triliun<sup>5</sup>.

Selain program biodiesel, dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2015 telah diatur kewajiban pencampuran bahan bakar nabati dengan bahan bakar penerbangan sebesar 3% pada tahun 2020 dan 5% pada tahun 2025. Program ini telah berhasil diuji coba pada pesawat penumpang. Hal ini menunjukkan, bahwa pemerintah Indonesia telah berkomitmen mengurangi penggunaan energi yang berasal dari bahan fosil dan mengembangkan bahan bakar nabati sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT). Pertamina, salah satu perusahaan energi terbesar di Indonesia, telah berperan aktif dalam pengembangan bioavtur J-24. Pengembangan ini mendapatkan dukungan dari Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Garuda *Maintenance Facilities* (GMF) berupa fasilitas pengujian serta bantuan mesin untuk tim uji bioavtur ITB<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Amin, K Prabandono (2024) "Cocopreneurship, Aneka Peluang Bisnis Dari Kelapa Sawit" h 21 Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.43 wib

<sup>5</sup> Soni S. Wirawan (2024) "Penerapan biodiesel di Indonesia" Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.43 wib

<sup>6</sup> Program BPDPKS (2020) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati <https://www.bpdps.or.id/program-pengembangan-dan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.20 wib

Pengembangan bahan bakar nabati di Indonesia dimulai dengan Instruksi Presiden No. 6 tahun 2006 tentang Pengadaan dan Penggunaan Biofuel. Instruksi ini menegaskan badan pemerintah lainnya untuk mengambil langkah dalam mengembangkan biofuel di semua tahap, mulai dari pengadaan bahan baku hingga komersialisasi teknologi biofuel dan peningkatan konsumsinya. Instruksi ini juga mempromosikan penggunaan biofuel dengan tujuan menggantikan minyak bumi sebagai alternatif untuk transportasi<sup>7</sup>.

Ekspansi perkebunan kelapa sawit masih berlangsung hingga saat ini. Total luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencapai 14,99 juta hektar pada tahun 2022. Luas perkebunan kelapa sawit tersebar di 25 provinsi dengan komposisi 63,2% di Sumatera, 32,2% di Kalimantan, 3,3% 0,9% di Sulawesi, Papua dan 0,4% di wilayah lain (Ditjen Perkebunan Herman, 2020)<sup>8</sup>.



Gambar 1. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia (sumber : BPS)

Pertumbuhan pesat perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencerminkan evolusi sektor pertanian kelapa sawit untuk meningkatkan produksi minyak sawit mentah (CPO) berdampak pada PDB dan pendapatan negara. Menurut pernyataan resmi dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), produksi CPO pada bulan Juli 2023 mencapai 4,357 juta ton, sementara produksi *Palm Kernel Oil* (PKO) mencapai 414 ribu ton,

<sup>7</sup> Regulasi (2018) Inpres Tentang Pengembangan Biofuel <https://www.bdpd.or.id/inpres-tentang-pengembangan-biofuel> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.45 wib

<sup>8</sup> Ridhwan Mustajab (2023) <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.38 wib

sehingga total produksi meningkat menjadi 4,771 juta ton. *Output* kumulatif Juli 2023 sebesar 32,066 juta ton, sedangkan total konsumsi domestik Juli 2023 sebesar 1,757 juta ton. Konsumsi minyak nabati bulan Juli 2023 mencapai 853.000 ton dan konsumsi untuk oleokimia mencapai 185.000 ton. Pada bulan Juli 2023 ekspor CPO olahan sebesar 2.403 ribu ton mencapai 2.918 juta USD<sup>9</sup>.

Penghasil kelapa sawit terbesar di dunia adalah Indonesia, diikuti Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Nigeria<sup>10</sup>. Selain itu, terdapat juga negara-negara lain yang menjadi penghasil kelapa sawit, seperti Honduras, Brazil, Guatemala, Papua Nugini, dan Pantai Gading<sup>11</sup>.



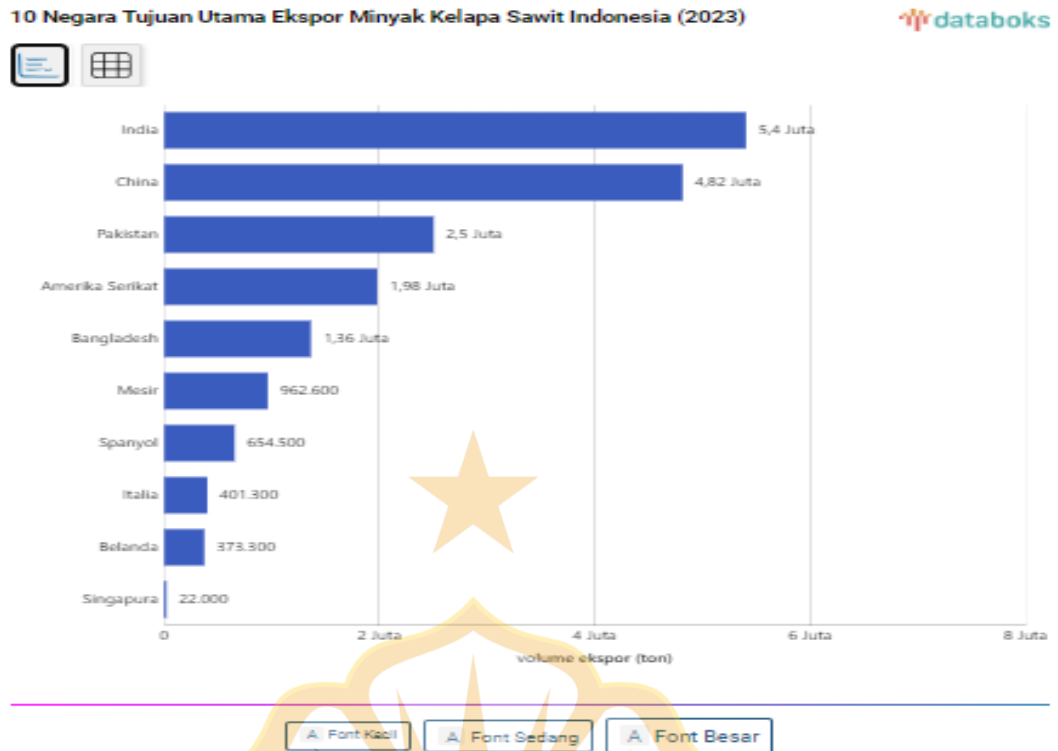
Gambar 2. Daftar Negara Penghasil Sawit (Sumber: *United States Departement of Agricultur (USDA), Databoks*)<sup>12</sup>

<sup>9</sup> Siaran Pers GAPKI (2023) "Kinerja Industri Minyak Sawit Juli 2023: Ekspor Meningkat, Stok Melemah" <https://gapki.id/news/2023/09/29/kinerja-industri-minyak-sawit-juli-2023> Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.23 wib

<sup>10</sup> Nuraini, (2023) *bisnis.com* "Ini 5 Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Ada Indonesia" <https://www.bisnis.com> Diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 19.28 wib

<sup>11</sup> Koran Tempo (2023) 11 negara penghasil sawit terbesar di dunia 2023 Indonesia-nomor-1 <https://koran.tempo.co> Diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 19.45 wib

<sup>12</sup> M Aditya (2023) Berita " Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia" <https://goodstats.id/infographic/negara-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-di-dunia-C1Sv1> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 11.00 wib



Gambar 3. Statistik 10 Negara Tujuan Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia 2023 (Sumber: Databoks 2023).

Indonesia dapat menjadi pemimpin pasar minyak nabati dunia dikarenakan memiliki keunggulan dalam harga yang kompetitif dan produktivitasnya melebihi minyak nabati lainnya. Minyak sawit Indonesia terus berkembang dan mendominasi dalam memenuhi konsumsi minyak nabati dunia. Berbagai upaya dilakukan negara penghasil minyak nabati lainnya untuk menjatuhkan minyak sawit Indonesia dalam perdagangan global. Hal ini mempengaruhi hubungan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan karena terdapat saling ketergantungan pada tingkat internasional. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi, berpartisipasi, dan menghadapi dampak strategis dari lingkungan global, serta menyadari bahwa kita memiliki ketergantungan dan interaksi dengan dunia internasional, diperlukan sikap kewaspadaan terhadap lingkungan luar. Kehidupan nasional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional yang dapat memberikan dampak keluar melalui upaya pertahanan dan negosiasi untuk melindungi kepentingan nasional. Namun, interaksi dengan pihak lain harus diprioritaskan dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan<sup>13</sup>.

<sup>13</sup> Materi Hanjar Tannas Lemhannas RI tahun 2024 hal. 48 Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.20 wib

Pemberlakuan Undang-Undang Anti Deforestasi atau *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) tentang larangan terhadap produk kelapa sawit dan turunannya diberlakukan sejak Mei 2023 bertujuan menekan laju deforestasi dan penyalahgunaan hutan. Aturan ini mengharuskan eksportir untuk melengkapi produknya dengan sertifikat bebas deforestasi dan informasi geo lokasi. Tujuan utama dari pemberlakuan aturan ini adalah mengurangi penggunaan kelapa sawit yang dianggap sebagai saingan utama minyak nabati dari bunga matahari, kedelai dan jagung yang dihasilkan oleh negara-negara Eropa. Menghadapi hal ini, Indonesia telah berupaya dengan mengembangkan produktivitas lahan sawit yang berkelanjutan, integrasi sektor hulu ke hilir dan memperkenalkan produk kelapa sawit Indonesia ke negara-negara lain melalui forum Internasional serta Penerapan Program *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO).

*Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO) merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Pertanian, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015 (PP 61/2015) mengenai Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO). ISPO merupakan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang diperkenalkan pada tahun 2011 dan telah menjadi kewajiban bagi semua perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada November 2025. ISPO fokus pada tiga objek utama, yaitu meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perkebunan kelapa sawit dalam rangka prinsip dan kriteria ISPO; memperbaiki kebijakan dan kompetitifitas produk kelapa sawit Indonesia di pasar nasional dan internasional; dan mempercepat keberlanjutan Indonesia dalam penurunan gas rumah kaca. ISPO memiliki prinsip dan kriteria utama, meliputi legalitas, praktis pertanian, pengelolaan lingkungan, hak cipta, dan pengelolaan sosial serta ekonomi masyarakat lokal. Sistem ini juga menyediakan jalur yang *voluntary* bagi 2.6 juta petani kecil di Indonesia untuk menjadi sertifikasi sesuai standard nasional. ISPO juga memiliki tujuan untuk mengurangi gas rumah hijau dan memberi perhatian terhadap masalah lingkungan. Sistem ini juga memiliki standar internasional

yang sesuai dengan Pengembangan Terpadu (UN SDGs), yang bertujuan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan yang lebih baik<sup>14</sup>.

Pertumbuhan, kualitas, dan produktivitas tanaman kelapa sawit dipengaruhi oleh ketersediaan pupuk. Perang Rusia-Ukraina berdampak terhadap industri pupuk Indonesia disebabkan kedua negara merupakan produsen utama pupuk. Terhambatnya ekspor pupuk dari Rusia telah mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga pupuk di Indonesia<sup>15</sup>. Indonesia mengimpor sebagian besar pupuk dan bahan bakunya dari Rusia dan Ukraina, konflik di antara kedua negara ini telah mengganggu pasokan pupuk di Indonesia. Hal ini berdampak langsung pada sektor pertanian di Indonesia dan mengancam ketersediaan pupuk serta produksi pangan. Menyikapi hal ini, pemerintah dapat mengoptimalkan Program Sawit Sapi, yaitu integrasi antara sawit dengan sapi potong dalam lahan kebun sawit. Program ini diharapkan dapat menguntungkan kedua komoditas dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia dalam pengelolaan lahan. Perkebunan sawit akan memperoleh keuntungan melalui pengurangan biaya pengendalian gulma dan penggunaan pupuk anorganik. Komoditas sapi juga dapat memanfaatkan limbah industri pengolahan sawit sebagai pakan ternak.

Pengelolaan sumber daya kelapa sawit secara mandiri dan berkelanjutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan meningkatkan kesejahteraan petani serta berkontribusi terhadap ekspor agar Indonesia tidak bergantung dengan negara lain dalam menentukan harga CPO maupun penjualan hasil produksi sawit beserta turunannya. Terhadap hal ini, diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara pemangku kepentingan pada sektor perkebunan dan industri sawit, serta komitmen dan semangat dari pelaku usaha industri kelapa sawit nasional dan pemerintah. Peran pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan pengelolaan industri sawit yang saat ini masih belum optimal, diantaranya;

---

<sup>14</sup> Bagaskara (2023) mutucertification.com "Manfaat dan Tujuan ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun Sawit". <https://mutucertification.com/manfaat-tujuan-ispo-untuk-sawit/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.20 wib

<sup>15</sup> Ferry Sandi (2023) CNBC Indonesia, "Nyata! Perang Rusia-Ukraina Ancam Stok Pupuk RI, Kenapa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news> Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 21.55 wib

- a. Potensi industri kelapa sawit Indonesia masih belum optimal untuk berkembang menjadi industri strategis dan bernilai tambah, karena masih banyak kendala yang menghambat pengembangan industri kelapa sawit di wilayah hulu dan hilir, seperti kurangnya konsolidasi data, verifikasi tutupan kelapa sawit nasional, serta perluasan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, petani dan perusahaan terkait budidaya, pengolahan hasil, industri, pasar dan nilai produk perkebunan serta potensi pengembangan usaha sebagai kunci keberhasilan industri sawit<sup>16</sup>.
- b. Peningkatan riset dan inovasi penemuan produk- produk baru masih kurang untuk merangsang pertumbuhan industri sawit, dikarenakan kurang fokus pada pengembangan produk dan pasar baru, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, regulasi dan sertifikasi yang semakin ketat, serta isu lingkungan dan sosial yang sering dikaitkan dengan industri sawit<sup>17</sup>.
- c. Belum terdapat lembaga/organisasi promosi sawit di bawah kendali pemerintah, sehingga program pemerintah dan perusahaan sawit belum terkoordinasi dengan baik mengakibatkan promosi produk sawit di pasar internasional kurang<sup>18</sup>, hal ini dihadapkan kepada:
  - 1) Kurangnya dukungan dan perhatian pemerintah terhadap industri sawit, akibatnya sulit memperoleh dukungan keuangan dan sumber daya lainnya.
  - 2) Isu lingkungan dan sosial sering dikaitkan dengan industri sawit, seperti deforestasi, kebakaran hutan dan hak asasi manusia, mempengaruhi citra industri sawit dan menghambat upaya promosi.

---

<sup>16</sup> Putri, (2022) "Petani Kelapa Sawit Diminta Konsolidasi dengan Koperasi"

<https://www.infopublik.id> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

<sup>17</sup> Indonesia.com" (2014) Dimana Peran Dan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Sawit

<https://sawitindonesia.com> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

<sup>18</sup> Achmad Deni Daruri (2021) Peran Pemerintah dalam Industri Sawit

<https://investor.id/opini/260197/peran-pemerintah-dalam-industri-sawit> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.35 wib



- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan terlatih dalam bidang promosi dan pemasaran serta kurangnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait.
  - 4) Regulasi dan sertifikasi ISPO semakin ketat, dapat mempersulit proses promosi dan pemasaran produk sawit.
- d. Organisasi untuk mendukung ekspansi dan peningkatan daya saing produk belum ada. Hal ini menjadi kendala dalam menghadapi berbagai hambatan terkait akses pasar.
- e. Koperasi produksi kelapa sawit belum mendapat dukungan serius dari pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan kelapa sawit nasional, sehingga penentuan harga ditingkat petani belum seragam<sup>19</sup>.

Demikian besarnya potensi tanaman sawit sebagai sumber daya nasional dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan. Pemanfaatan kekayaan alam secara optimal memerlukan modal, pengetahuan, teknologi, serta tenaga yang terampil dan kondisi pasar di dalam maupun luar negeri yang mendukung<sup>20</sup>. Oleh karena itu, diperlukan membangun *Political will* dalam pengelolaan industri sawit untuk memastikan bahwa industri ini dikelola dengan cara yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta memastikan bahwa manfaat dari industri ini dapat diperoleh secara adil dan merata bagi semua pihak yang terlibat. Kondisi *political will* dalam pengelolaan industri sawit saat ini dihadapkan kepada tekanan domestik dan dunia internasional di pasar global. Pemerintah dituntut untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kondisi *political will* akan terus berubah seiring dengan perubahan dinamika politik, tekanan masyarakat, dan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan semua peluang yang ada untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, menguasai pasar global dan pengelolaannya berwawasan lingkungan.

---

<sup>19</sup> Nashih Nashrullah (2021) Koperasi Petani Sawit Belum Dapat Dukungan Pemerintah <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qvinyj320/koperasi-petani-sawit-belum-dapat-dukkungan-pemerintah> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

<sup>20</sup> Lemhannas RI, Materi Pokok Bidang Studi Sumber Kekayaan Alam, Lemhannas RI, Jakarta, 2024 Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.50 wib

*Political will* adalah kemauan atau komitmen dari para pemimpin politik atau pengambil keputusan dalam menerapkan kebijakan mengatasi hambatan politik, ekonomi, dan sosial untuk mencapai tujuan tertentu<sup>2122</sup>. Kondisi politik pengelolaan industri sawit saat ini di Indonesia cukup kompleks dan menghadapi beberapa tantangan, diantaranya:

- a. Belum adanya metodologi pendekatan untuk mendukung transparansi dan keterlacakan pasokan minyak sawit, serta perlindungan area konservasi lahan gambut, dan dampak positif pada masyarakat setempat.
- b. Belum adanya infrastruktur dan strategi dalam mengolah minyak sawit menjadi produk hilirisasi yang lebih berkelanjutan.
- c. Belum adanya kebijakan nasional mencakup pembangunan berkelanjutan, termasuk pembangunan ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan, yang memperjelas ruang dan kepedulian pada pelestarian keanekaragaman hayati, pengaruh produksi sawit terhadap laju deforestasi, dan aspek perlindungan terhadap kawasan hutan primer dan hutan lindung.
- d. Masih terdapat produktivitas menurun akibat tanaman menua dan tidak adanya peremajaan, hambatan dagang di pasar global dan kebijakan didalam negeri.
- e. Belum optimalnya transfer teknologi dalam mendorong pengembangan industri sawit yang saat ini telah menjadi kebutuhan publik dengan berbagai macam produk turunannya.

*Political will* yang tepat sangat diperlukan dalam menghasilkan kebijakan pemerintah untuk mendorong tercapainya keseimbangan antara keuntungan dibidang ekonomi, perlindungan terhadap lingkungan serta kesejahteraan sosial masyarakat sebagai hasil dari pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan di Indonesia.

<sup>21</sup> Yahya, Zuhdi (2024) Jurnal Kemajuan Penelitian Pertanian Asia "Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur" Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib

<sup>22</sup> Andre Himu, Filipi (2024) Thesis, "Governing Pemberdayaan Kelompok Tani" .Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib

Apabila membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit ini tidak dilakukan dengan langkah-langkah yang baik akan berdampak terhadap berbagai aspek, termasuk aspek ekonomi, aspek lingkungan dan aspek sosial. *Political will* dapat dikembangkan mencakup beberapa aspek, seperti integrasi perkebunan dan industri pengolahan, pengembangan teknologi, perlindungan ekosistem, partisipasi masyarakat, pengembangan pendidikan dan pengetahuan publik, pengembangan sistem pengelolaan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kerjasama internasional, pengelolaan hukum, dan pengelolaan politik. *Political will* juga dapat mewujudkan pengelolaan industri sawit yang mendukung ekonomi hijau. Melalui *political will* yang kuat, pemerintah dan para pemangku kebijakan dapat mengeluarkan kebijakan dengan memprioritaskan kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat secara keseluruhan.

*Political will* sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan dalam mendukung pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan agar sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang merupakan konsepsi ideal bagi Indonesia untuk mencapai status sebagai negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Salah satu aspek utama dari visi ini adalah mewujudkan kedaulatan yang kokoh, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun pertahanan. Kunci keberhasilan dalam mencapai visi tersebut terletak pada pemanfaatan sumber daya alam yang unggul secara optimal, salah satunya adalah sektor industri sawit. Pengelolaan industri sawit yang bijaksana dengan melibatkan pemerintahan daerah dapat memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan ekonomi nasional. Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa urusan konkuren diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Pengelolaan sawit termasuk dalam lingkup urusan pemerintahan yang dapat ditangani oleh daerah otonom. Melalui otonomi daerah, Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan mengatur dan mengelola industri sawit di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Otonomi daerah yang memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan yang lebih tepat sesuai dengan kondisi dan kepentingan daerahnya. Oleh karena itu, berbagai hambatan, tantangan, ancaman, gangguan haruslah diimbangi dengan *Political will* pemerintah dalam mengarahkan, mengelola dan memanfaatkan

melalui kebijakan strategis disesuaikan dengan geostrategi Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memajukan pertumbuhan ekonomi dengan mendukung lingkungan usaha yang kondusif, memanfaatkan pengetahuan dan teknologi, menjamin ketersediaan barang dan jasa, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan daya saing dalam skala ekonomi global. Hal ini sejalan dengan Program Nawa Cita Pemerintah yang menitikberatkan pada peningkatan produktivitas masyarakat dan daya saing di pasar internasional sebagai langkah krusial menuju kemajuan dan kesetaraan dengan bangsa-bangsa Asia lainnya.

## 2. Rumusan Masalah.

Industri sawit merupakan salah satu industri yang sangat penting di Indonesia. Pada saat ini, industri sawit memiliki peranan yang sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat di Indonesia. Namun industri sawit juga mengalami beberapa masalah yang memerlukan perhatian khusus, salah satunya adalah masalah pengelolaan industri sawit yang efisien dan efektif. Hal ini menyebabkan perlunya dilakukan perubahan dalam pengelolaan industri sawit agar dapat mendukung ekonomi hijau.

Rumusan masalah yang hendak dibahas dalam Taskap ini adalah “bagaimana membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau?”. Selanjutnya agar analisa dan pembahasan yang akan dilakukan lebih mudah dan terarah, berdasarkan fakta dan data yang ada, serta pendekatan teori terkait, maka pertanyaan kajian dalam penulisan Taskap ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kondisi pengelolaan industri sawit saat ini?
- b. Bagaimana tantangan membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit?
- c. Bagaimana strategi pengelolaan industri sawit untuk mendukung ekonomi hijau?

### 3. Maksud dan Tujuan.

- a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Kertas Karya Ilmiah Perorangan (Taskap) ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana industri sawit memiliki peranan yang sangat besar dalam mendukung ekonomi hijau, kemudian dilakukan analisis guna mengidentifikasi keunggulan, tantangan dan hambatan guna dicarikan solusi untuk membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau.
- b. **Tujuan.** Penulisan Taskap ini bertujuan untuk memberikan sumbangan pemikiran peserta kepada para pemangku kepentingan dalam membangun *political will* pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau.

### 4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

#### a. Ruang Lingkup.

Industri sawit adalah salah satu sektor ekonomi yang penting bagi banyak negara, termasuk Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia, menjadi sumber pendapatan bagi banyak masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun memiliki tantangan terkait dengan praktik pengelolaannya, hal ini menunjukkan bahwa perlunya mengadopsi pendekatan yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, membangun *political will* memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah arah industri sawit menuju praktik yang lebih berkelanjutan dan mendukung pembangunan ekonomi hijau.

Agar pembahasan Taskap ini lebih fokus maka ruang lingkungnya dibatasi pada pembahasan mengenai membangun *political will* yang menitikberatkan pada masalah kebijakan, produktivitas dan solusi alternatif jangka panjang yang dapat mewujudkan pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau.

- b. **Sistematika.** Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka sistematika penyusunan Taskap ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut:
- 1) **Bab I Pendahuluan.** Bab ini merupakan bagian awal penulisan dan memuat tentang latar belakang yang berisikan fakta-fakta yang berkaitan dengan kondisi pengelolaan industri sawit saat ini, maksud dan tujuan, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Taskap serta beberapa pengertian untuk memperjelas istilah yang dianggap penting dalam tulisan.
  - 2) **Bab II Landasan Pemikiran.** Dalam Bab II diuraikan tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional, serta beberapa kerangka teoritis dan tinjauan pustaka yang relevan dijadikan sebagai bahan rujukan terkait dalam pengelolaan industri sawit, kemudian terdapat analisis berbagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang bersifat global, regional dan nasional didalamnya terdapat berbagai peluang dan kendala yang dihadapkan pada membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit saat ini, sehingga berdampak guna mendukung ekonomi hijau.
  - 3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini berisi gambaran umum mengenai bagaimana membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau, dan pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian yang di analisis berdasarkan data/fakta serta landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah dan solusi yang yang didapatkan.
  - 4) **Bab IV Penutup.** Sebagai bagian akhir dari penyusunan Taskap, Bab ini berisikan tentang simpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan analisa serta beberapa rekomendasi dan saran yang ditujukan kepada pemerintah serta para pemangku kebijakan dapat memprioritaskan kepentingan jangka panjang negara dan masyarakat secara keseluruhan dalam pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau.

## 5. Metode dan Pendekatan.

- a. **Metode.** Penulisan Taskap ini menggunakan metode Deskriptif Analisis PESTEL dengan studi literatur berupa pengumpulan data dan informasi dari teks tertulis (studi kepustakaan dari data sekunder maupun data primer) yang selanjutnya dianalisa, sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih lengkap dalam memecahkan permasalahan.
- b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan nasional, dengan analisa multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teori yang digunakan dengan didukung data dan fakta serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategis, yang disusun secara sistematis, akurat dan faktual.

## 6. Pengertian.

Penjelasan beberapa pengertian sangat diperlukan untuk menghindari adanya salah pengertian serta untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan Kertas Karya Ilmiah Perorangan ini.

- a. ***Political Will.*** Menurut Barbara Koremenos, seorang Profesor Politik Dunia di Universitas Michigan (2001), kemauan politik adalah komitmen dan keinginan pemerintah atau pihak berwenang dalam mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan mengimplementasikan kebijakan<sup>23</sup>.
- b. **Visi Indonesia Emas 2045.** Merupakan cita-cita menjadikan Indonesia sebagai negara berdaulat, maju, adil, dan makmur pada tahun 2045, dengan kedaulatan kuat di bidang politik, ekonomi, dan pertahanan. Pada tahun 2045, Indonesia diharapkan memiliki peran signifikan di tingkat regional dan global, dengan masyarakat sejahtera dan berkeadilan serta perekonomian kuat dan berdaya saing<sup>24</sup>.

---

<sup>23</sup> Antara News (2022) "*Political Will*" Kunci Tercapainya Tujuan Keterbukaan Informasi <https://sumber.antarane.ws.com/berita/532957/political-will-kunci-tercapainya-tujuan-keterbukaan-informasi> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 19.45 wib

<sup>24</sup> Indonesia2045.go.id (2024) 8 Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 <https://indonesia2045.go.id/> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 19.50 wib

- c. **Urusan Pemerintahan Konkuren.** Urusan konkuren menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan urusan pemerintahan yang terbagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren ini diperuntukkan dalam mengatur dan mengelola sejumlah urusan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah tersebut<sup>25</sup>.
- d. **Ekonomi Hijau.** Ekonomi hijau adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia dan melindungi lingkungan. Menurut Pavan Sukhdev (2008), ekonom dan pejabat senior PBB, ekonomi hijau mengintegrasikan prinsip berkelanjutan kedalam kebijakan dan praktik bisnis untuk menciptakan sistem yang menguntungkan ekonomi, lingkungan, dan masyarakat<sup>26</sup>.
- e. **Crude Palm Oil (CPO).** *Crude Palm Oil* (CPO) adalah minyak nabati yang diekstraksi dari buah kelapa sawit. Proses ekstraksi melibatkan pemerasan buah kelapa sawit dan pemisahan minyak dari fraksi lainnya seperti inti, cangkang, dan air. Minyak mentah ini memiliki berbagai aplikasi, termasuk sebagai bahan baku dalam industri makanan, industri kosmetik, serta sebagai bahan bakar dalam industri biodiesel. CPO dikenal karena kandungan minyaknya yang tinggi dan stabilitasnya yang baik dalam berbagai aplikasi. CPO merupakan salah satu komoditas utama dalam perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia<sup>27</sup>.
- f. **Palm Kernel Oil (PKO).** *Palm Kernel Oil* (PKO) adalah minyak nabati yang diekstraksi dari biji kelapa sawit, merupakan inti dari buah kelapa sawit dan dipisahkan dari daging buahnya. Proses ekstraksi PKO

<sup>25</sup> Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.00 wib

<sup>26</sup> Pavan Sukhdev (2011) Berikan nilai pada alam  
[https://www.ted.com/talks/pavan\\_sukhdev\\_put\\_a\\_value\\_on\\_nature/transcript](https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_put_a_value_on_nature/transcript) Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 19.00 wib

<sup>27</sup> Geoffrey Mrema (2002) Pengolahan Minyak Kelapa Sawit  
<https://www.fao.org/3/Y4355E/y4355e04.htm> Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 20.10 wib



melibatkan beberapa tahapan, termasuk pemerasan biji kelapa sawit dan pemisahan minyak dari bahan-bahan lainnya seperti serat dan protein. PKO merupakan salah satu komoditas penting dalam perdagangan internasional, terutama berasal dari negara-negara produsen kelapa sawit seperti Indonesia dan Malaysia.

- g. Lemak Trans.** Lemak trans adalah jenis lemak yang terbentuk secara alami dalam beberapa makanan dan juga dihasilkan melalui proses industri. Secara kimia, lemak trans adalah lemak tak jenuh yang memiliki ikatan rangkap dalam strukturnya. Lemak trans ditemukan dalam makanan olahan seperti kue, makanan cepat saji, margarin, dan makanan ringan<sup>28</sup>. Secara alami, produk dari kelapa sawit seperti minyak kelapa sawit mentah, *crude palm oil* (CPO), dan *palm kernel oil* (PKO) tidak mengandung lemak trans. Lemak trans adalah jenis lemak yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi minyak nabati tertentu, seperti minyak sayur, untuk meningkatkan kestabilan dan umur simpannya. Proses ini tidak umum dilakukan pada produk kelapa sawit<sup>29</sup>.
- h. Biodiesel.** Biodiesel adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari bahan alami terbarukan seperti minyak nabati dan hewani. Sumber bahan baku biodiesel berasal dari minyak nabati dan hewani, dan sifat kimia yang berbeda satu dengan yang lainnya akan menentukan sifat kimia biodiesel. Biodiesel memiliki beberapa keuntungan yang berbeda dengan solar dalam aspek keamanan, biodegradabilitas, dan lingkungan. Biodiesel dapat dihasilkan dari berbagai sumber makanan, seperti bahan pangan seperti sawit, kelapa, kacang, kelor, saga utan, kasumba/kembang pulu, dan lain-lain, serta sumber non-pangan seperti jarak pagar, kapuk, kemiri, nimba, nyamplung, kesambi, randu alas, jarak gurita, jarak landi, dan lain-lain<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Wikipedia (2024) Trans fat [https://en.wikipedia.org/wiki/Trans\\_fat](https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_fat) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 wib

<sup>29</sup> Majalah Sawit Indonesia (2021) Sawit Paling Sehat, Bebas Asam Lemak Trans Pemicu Jantung dan Stroke <https://sawitindonesia.com/sawit-paling-sehat-bebas-asam-lemak-trans-pemicu-jantung-dan-stroke/> Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.45 wib

<sup>30</sup> shell.co.id (2023) Pengertian Biodiesel: Pemahaman, Jenis, Dan Contohnya [https://www.shell.co.id/in\\_id/konsumen-bisnis/shell-fleet-card/pengertian-biodiesel.html](https://www.shell.co.id/in_id/konsumen-bisnis/shell-fleet-card/pengertian-biodiesel.html) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.55 wib

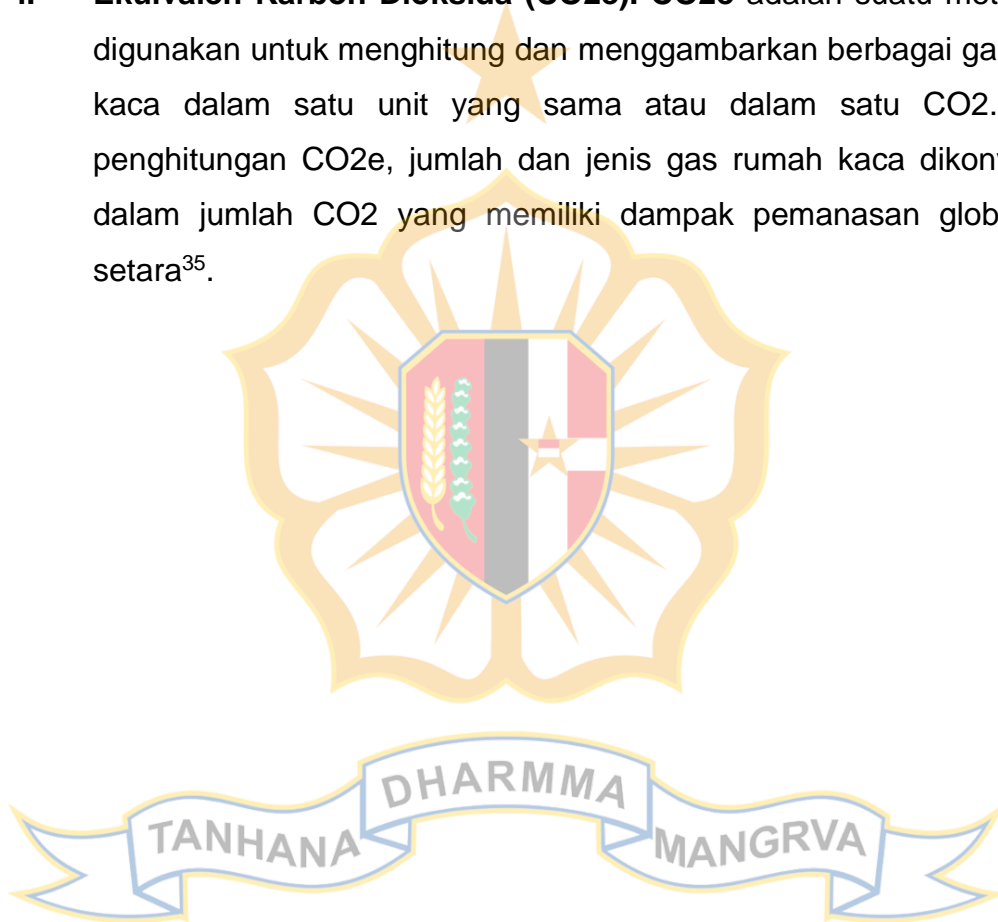
- i. **Program B20 dan B30.** Program B20 dan B30 pada sawit merupakan program pemerintah untuk mengatur pencampuran biodiesel sawit dalam bahan bakar solar. Program B20 dan B30 merupakan persyaratan pencampuran biodiesel sawit sebanyak 20% dan 30% dengan bahan bakar minyak jenis solar, masing-masing. Program B20 dan B30 diterapkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penggunaan biodiesel sawit dalam bahan bakar diesel. Hal ini bertujuan mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) fosil, mengurangi polusi udara, dan meningkatkan nilai tambah industri hilir kelapa sawit<sup>31</sup>.
- j. **Deforestasi.** Deforestasi adalah proses pengurangan luas hutan secara signifikan, baik skala lokal maupun skala besar. Proses ini melibatkan penebangan pohon secara besar-besaran untuk memperoleh kayu atau untuk memberikan lahan bagi aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, pemukiman, dan infrastruktur. Deforestasi yang terjadi karena penanaman kelapa sawit seringkali menjadi sumber kritik atau kambing hitam karena dampaknya dianggap merusak lingkungan. Deforestasi tanpa upaya yang memadai untuk menggantikan atau memperbaharui hutan yang hilang dapat memiliki konsekuensi serius, menyebabkan hilangnya habitat alami, kerusakan ekosistem, kehilangan keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim<sup>32</sup>.
- k. **Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO).** *Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO)* adalah sistem sertifikasi untuk memastikan produksi kelapa sawit di Indonesia dilakukan secara berkelanjutan, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. ISPO diperkenalkan oleh pemerintah untuk menanggapi kekhawatiran internasional tentang deforestasi, degradasi lahan, serta masalah sosial dan hak asasi manusia dalam industri kelapa sawit. Sertifikasi ISPO

<sup>31</sup> EBTKE (2019) Program Mandatori Biodiesel 30% (B30)  
<https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

<sup>32</sup> LindungiHutan(2022) Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Pencegahan  
<https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

menjamin bahwa produk kelapa sawit dari Indonesia diproduksi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan<sup>33</sup>. Namun dalam sertifikasi ISPO masih terdapat kelemahan seperti kelembagaan penyelenggara ISPO yang masih lemah, biaya sertifikasi yang cukup tinggi, keharusan untuk memenuhi persyaratan dokumen, penerapan GAP dan keorganisasian serta kekurangan sumber daya pendanaan dan sumber daya manusia di sebagian daerah<sup>34</sup>.

- I. **Ekuivalen Karbon Dioksida (CO<sub>2</sub>e).** CO<sub>2</sub>e adalah suatu metrik yang digunakan untuk menghitung dan menggambarkan berbagai gas rumah kaca dalam satu unit yang sama atau dalam satu CO<sub>2</sub>. Dalam penghitungan CO<sub>2</sub>e, jumlah dan jenis gas rumah kaca dikonversi ke dalam jumlah CO<sub>2</sub> yang memiliki dampak pemanasan global yang setara<sup>35</sup>.



<sup>33</sup> SDS Indonesia (2024) Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) <https://sdsindonesia.com/en/indonesian-sustainable-palm-oil-system-ispo> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

<sup>34</sup> Sawit Berkelanjutan (2020) Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO <https://www.bpdp.or.id/opini-perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-ispo> Diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 19.45 wib

<sup>35</sup> Climate4life.info (2022) Perbedaan CO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> Ekuivalen, dan Karbon dalam Kaitan Gas Rumah Kaca Pemicu Pemanasan Global <https://www.climate4life.info>

## BAB II

### LANDASAN PEMIKIRAN

#### 7. Umum.

Industri sawit merupakan sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Selama beberapa dekade, industri kelapa sawit di Indonesia telah menjadi kontributor signifikan bagi perekonomian negara. Namun, pengelolaan industri sawit menghadapi berbagai tantangan, termasuk aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Meskipun demikian, terdapat peluang besar untuk melakukan transformasi menuju praktik yang lebih berkelanjutan dalam industri ini. Pengelolaan industri sawit seringkali menimbulkan kekhawatiran terkait dampak lingkungan dan sosial, dengan sawit sering dianggap sebagai penyebab deforestasi dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan industri ini dikaitkan dengan penggundulan hutan, perusakan habitat, hilangnya keanekaragaman hayati, serta pelanggaran hak asasi manusia dan konflik sosial. Untuk mengatasi kekhawatiran ini, muncul kesadaran bersama akan perlunya produksi minyak sawit berkelanjutan dan penerapan skema sertifikasi yang memastikan industri sawit di Indonesia beroperasi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial.

Meskipun ada kesadaran tentang perlunya produksi minyak sawit berkelanjutan dan ekonomi hijau, transisi industri sawit ke model yang lebih ramah lingkungan masih berjalan lambat. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya *political will* di antara pemerintah dan pemangku kepentingan industri sawit untuk menerapkan kebijakan dan praktik yang mendukung produksi minyak sawit berkelanjutan. *Political will* sangat penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan reformasi peraturan yang dapat mendukung transisi menuju ekonomi hijau. Oleh karena itu, membangun *political will* untuk mengelola industri sawit secara berkelanjutan merupakan langkah krusial dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ekologi dan keberlanjutan.

*Political will* menjadi kunci dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang melalui pengembangan kebijakan yang progresif dan berbasis bukti. Untuk mengeksplorasi konsep *political will* dalam konteks industri kelapa sawit dan perannya dalam mendukung ekonomi hijau, perlu mengkaji *political will* pemerintah dan pemangku kepentingan industri saat ini dalam mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan dan skema sertifikasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesediaan untuk mengadopsi praktik-praktik tersebut. Dengan memahami konsep *political will* dan perannya dalam mendukung ekonomi hijau di industri kelapa sawit, diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan strategi yang efektif untuk mendorong produksi minyak sawit berkelanjutan dan mencapai tujuan ekonomi hijau.

## 8. Peraturan Perundangan-Undangan.

- a. **Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.** Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pasal 33 ini mengandung prinsip-prinsip ekonomi berlandaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur pengelolaan industri sawit secara berkelanjutan dan memperhatikan aspek-aspek ekonomi hijau yang melibatkan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan<sup>36</sup>. Industri sawit merupakan salah satu industri yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan juga dalam memenuhi kebutuhan pangan, energi dan bahan baku sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan oleh negara dalam rangka mendukung ekonomi hijau.
- b. **Undang-Undang No 32/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.** Undang-undang ini mengatur mengenai perdagangan berjangka komoditi, termasuk komoditas pertanian seperti minyak kelapa sawit. Dalam perdagangan berjangka harga komoditas dapat

---

<sup>36</sup> UUD NRI 1945 <https://jdih.kemenkeu.go.id> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 19.45 wib

dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti produksi, permintaan dan kondisi pasar global. Oleh karena itu, regulasi yang baik dalam perdagangan berjangka dapat membantu stabilisasi harga dan meningkatkan kesejahteraan bagi para pelaku industri sawit, termasuk minyak kelapa sawit *Crude Palm Oil* (CPO) yang merupakan produk utama dari industri sawit. Dengan adanya pasar komoditas yang berkembang memungkinkan pelaku industri sawit, termasuk petani kecil, mendapatkan akses dan harga yang lebih baik, sehingga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Pemerintah dapat mendorong adopsi praktik berkelanjutan dalam industri sawit melalui insentif dalam perdagangan berjangka komoditi, seperti memberikan keuntungan bagi produk sawit yang diproduksi secara berkelanjutan<sup>37</sup>.

- c. **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) Pasal 1 ayat (1).** Pasal 1 ayat (1) UU No 32/2009 menegaskan bahwa salah satu tujuan utama dalam pengelolaan sumber daya alam adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-undang ini menekankan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan industri sawit, Undang-undang ini menjadi instrumen hukum yang sangat penting untuk memastikan bahwa industri sawit dijalankan secara berkelanjutan, mendukung konsep ekonomi hijau dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pengembangan industri sawit dilakukan dengan memperhatikan perlindungan lingkungan yang memadai dan mempromosikan praktik ramah lingkungan<sup>38</sup>.

<sup>37</sup> UU-NO-32-TAHUN-1997 <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-1997> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.15 wib

<sup>38</sup> UU-NO-32-TAHUN-2009 <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

- d. **Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433).** Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum serta upaya pemberdayaan bagi para petani, termasuk petani sawit. Melalui perlindungan dan pemberdayaan ini, petani sawit dapat memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya, teknologi, informasi, dan pasar yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan mendukung transformasi menuju praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selain itu Undang-undang ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani mencakup upaya meningkatkan produktivitas serta memastikan bahwa petani mendapatkan manfaat yang adil dari hasil produksi tersebut. Undang-undang ini memiliki implikasi yang penting terhadap para petani, termasuk petani sawit, yang berperan dalam rantai pasok industri sawit dan mendukung petani sawit dalam menjalankan kegiatan pertanian yang berkelanjutan dan memastikan petani mendapatkan manfaat yang adil dari industri sawit<sup>39</sup>.
- e. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.** Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola industri sawit dengan memperhatikan aspek lingkungan, kesehatan, sosial dan keuangan. Selain itu dalam pengelolaan industri sawit harus memenuhi beberapa persyaratan, seperti: 1) Industri sawit dengan luas 25 hektar atau lebih wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B); 2) Industri sawit harus memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem yang memadai untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; 3) Industri sawit harus memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; 4) Industri sawit harus melaksanakan kemitraan dengan perkebun, karyawan, dan masyarakat sekitar perkebunan; 5) Industri sawit harus memperhatikan pengelolaan

---

<sup>39</sup> UU-No-19-Tahun-2013 <https://Peraturan.Go.Id/Id/Uu-No-19-Tahun-2013> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.34 wib

lingkungan, termasuk pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman Perkebunan Kelapa Sawit.

- f. **Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO).** Perpres ini bertujuan untuk membentuk sistem pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang efektif, efisien, adil dan berkelanjutan demi mendukung pembangunan ekonomi nasional. Hal ini menunjukkan komitmen untuk mengelola industri sawit secara berkelanjutan dan berbasis lingkungan. Perpres ini bertujuan untuk memastikan agar usaha perkebunan kelapa sawit layak secara sosial, ekonomi, dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Perpres ini memberikan landasan hukum dan standar yang dapat membantu dalam mengelola industri sawit secara berkelanjutan, memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi<sup>40</sup>.
- g. **Peraturan Menteri Pertanian No 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.** Peraturan ini memiliki relevansi yang penting dalam pengelolaan industri sawit dengan memberikan kerangka kerja hukum dan persyaratan yang memadai untuk memastikan bahwa industri sawit dijalankan secara berkelanjutan. Dalam pengelolaan industri sawit, peraturan ini mengatur mengenai perizinan untuk usaha perkebunan sawit, persyaratan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pemegang izin usaha perkebunan industri sawit dan memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemberdayaan petani sawit yang mencakup aspek-aspek seperti pengaturan hubungan antara pemilik lahan dengan petani, peningkatan akses terhadap pembiayaan dan teknologi, serta mekanisme bagi petani untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan lahan sawit<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Perpres-No-44-Tahun-2020 <https://www.Peraturan.Go.Id/Terjemahresmi/Perpres-No-44-Tahun-2020> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.55 wib

<sup>41</sup> Permentan-No-29-Tahun-2016 <https://spks.or.id/detail-sikap-permentan-no-29-tahun-2016> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.20 wib



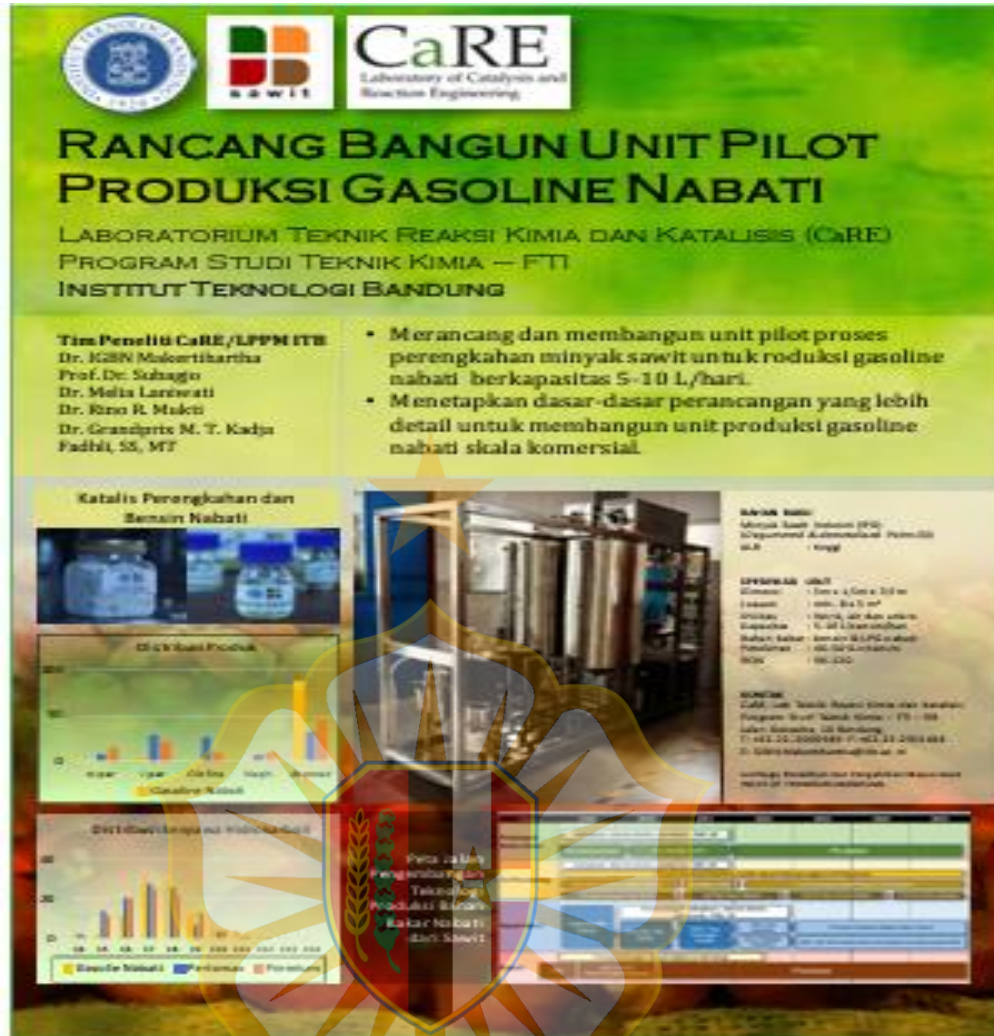
- h. **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.** Peraturan ini fokus pada pengembangan sumber daya manusia terkait industri sawit, seperti pelatihan dan pendidikan petani sawit, serta pengembangan sistem informasi yang membantu meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri sawit, penelitian dan pengembangan yang terkait dengan industri sawit, seperti pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan pengembangan varietas tanaman sawit yang lebih baik serta peremajaan sawit, seperti pengembangan infrastruktur yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri sawit<sup>42</sup>.

## 9. Data dan Fakta.

- a. Pada tahun 2030, konsumsi gasoline di Indonesia diproyeksikan akan meningkat menjadi 154% dari tingkat saat ini, mencapai 107 juta kL per tahun, dengan sekitar 55,64% dari kebutuhan tersebut masih harus diimpor. Hal ini terjadi karena negara-negara seperti Eropa dan Amerika Serikat, yang mayoritas mesin mobilnya menggunakan diesel, belum sepenuhnya fokus pada penelitian produksi *gasoline* dari sumber terbarukan. Namun, Indonesia memiliki kesempatan untuk mengembangkan penelitian dalam produksi *green gasoline* dari minyak sawit yang melimpah<sup>43</sup>.

<sup>42</sup> Perpres-No-44-Tahun-2020 <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-44-tahun-2020> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.25 wib

<sup>43</sup> Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, " Grant Riset Sawit 2019 <https://www.bpdp.or.id> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.45 wib



Gambar 4. Rancang Bangun Unit Pilot Produksi Gasolne Nabati (Sumber: Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, "Grant Riset Sawit 2019").

- b. Pada dialog "Wakil Rakyat Bicara Sawit" yang disiarkan secara live di CNBC Indonesia pada Senin, 7 November 2022, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, Syafarudin Poti, menjelaskan beberapa tantangan dalam hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia. Pertama, tingkat pengembalian investasi pada sektor hilir kelapa sawit cenderung lebih rendah dibandingkan dengan sektor hulu, sehingga penanam modal lebih memilih berinvestasi di perkebunan daripada di sektor hilir. Kedua, kualitas teknologi dan sumber daya manusia di Indonesia masih terbatas, terutama di bidang kelapa sawit dan teknologi pengolahan produk turunan kelapa sawit. Ketiga, isu-isu negatif seputar industri kelapa sawit yang dianggap merugikan lingkungan, seperti deforestasi,

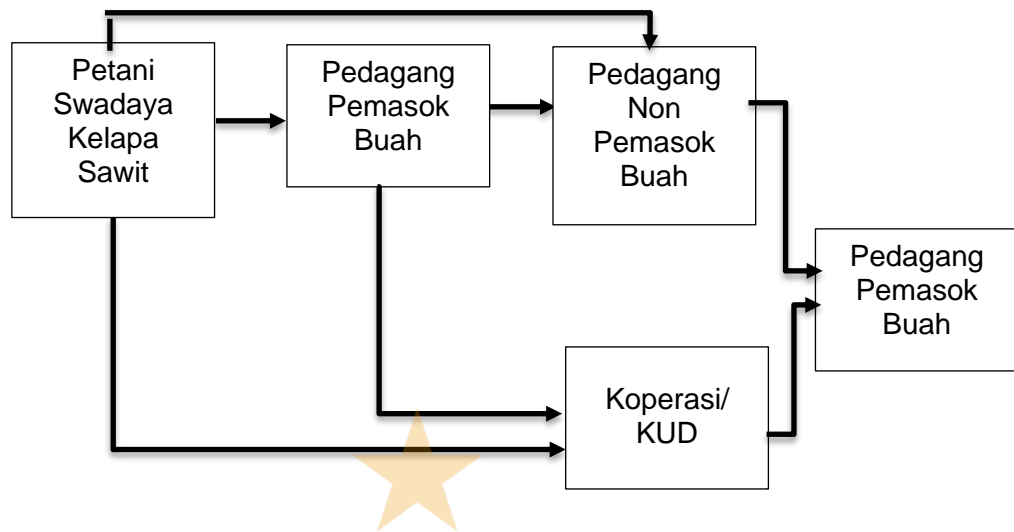
degradasi lahan, berkurangnya keanekaragaman hayati, emisi karbon, dan perubahan iklim. Keempat, Poti (2022) mengungkapkan bahwa belum ada rencana yang jelas untuk melaksanakan hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia, sementara rencana tersebut merupakan panduan penting untuk keberhasilan hilirisasi kelapa sawit<sup>44</sup>.

- c. Potensi industri kelapa sawit Indonesia masih belum optimal untuk berkembang menjadi industri yang strategis dan bernilai tambah, karena masih banyak kendala yang menghambat pengembangan industri kelapa sawit di wilayah hulu dan hilir. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor perkebunan dan agroindustri kelapa sawit melalui hubungan dalam rantai pasokan. Rantai pasok kelapa sawit melibatkan pelaku usaha dari hulu hingga hilir, dengan setiap level memiliki nilai tambah yang berbeda-beda. Petani swadaya, pedagang atau pengepul, dan pabrik kelapa sawit adalah beberapa pelaku dalam rantai ini, dan mereka memiliki tingkat nilai tambah yang berbeda. Dalam rantai pasok kelapa sawit, setiap pelaku memiliki kontribusi nilai tambah yang berbeda untuk setiap levelnya. Pada tingkat petani swadaya, nilai tambahnya sebesar 18,6%, sementara pedagang atau pengepul memiliki nilai tambah sebesar 20%, dan pabrik memperoleh nilai tambah sebesar 28% dari produk (CPO dan Kernel). Petani swadaya, meskipun merupakan bagian penting dari rantai pasokan, cenderung memiliki nilai tambah terendah dibandingkan dengan pelaku usaha lainnya. Kendala yang menghambat pengembangan industri kelapa sawit di wilayah hulu dan hilir, seperti kurangnya konsolidasi data, verifikasiutupan kelapa sawit nasional, serta perluasan kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, petani, dan perusahaan terkait budidaya, pengolahan hasil, industri, pasar, dan nilai produk perkebunan serta potensi pengembangan usaha sebagai kunci keberhasilan industri sawit belum optimal<sup>45</sup>.

---

<sup>44</sup> Berita bdpd.or.id (2020) SDM Hingga Teknologi, Kendala Hilirisasi Sawit RI <https://www.bdpd.or.id/sdm-hingga-teknologi-kendala-hilirisasi-sawit-ri> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.50 wib

<sup>45</sup> Putri (2022) infopublik” Petani Kelapa Sawit Diminta Konsolidasi dengan Koperasi”<https://www.infopublik.id> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib



Gambar 5. Pola rantai pasok kelapa sawit (Sumber Jurnal Teknologi Industri Pertanian)<sup>46</sup>

- d. Permasalahan yang dihadapi dalam perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama. Pertama, pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR/PIR-TRANS), di mana produktivitas rendah dan perilaku petani tidak selalu sesuai dengan aturan budidaya menjadi tantangan utama. Produktivitas perkebunan sawit rakyat pada tahun 2023 hanya mencapai 2,58 ton/hektar, sedangkan perkebunan milik negara menunjukkan produktivitas tertinggi dengan rata-rata hasil sekitar 4,82 ton CPO per hektar dan 0,91 ton PKO per hektar. Sementara itu, perkebunan swasta rata-rata menghasilkan 3,48 ton CPO per hektar dan 0,57 ton PKO per hektar<sup>47</sup>. Kedua, pada pola Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), sering terjadi ketidakseragaman dalam pengelolaan oleh petani atau kelompok tani, yang berdampak pada produktivitas yang tidak konsisten. Ketiga, pola swadaya atau mandiri menghadapi masalah penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) biasanya ditentukan oleh pedagang pengumpul atau besar, yang sering merugikan petani. Faktor-faktor lain yang menyebabkan

<sup>46</sup> Petir Papilo, Diki Prasetyo, Misra Hartati, Ekie Gilang Permata, Afdhol Rinaldi(2020) Jurnal Teknologi Industri Pertanian "Analisis Dan Penentuan Strategi Perbaikan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Kelapa" <https://journal.ipb.ac.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.25 wib

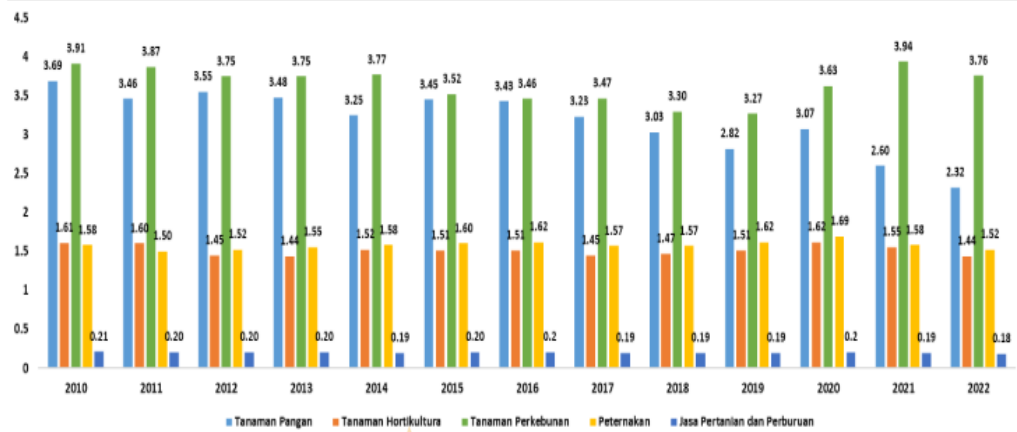
<sup>47</sup> Koko Junaid (2023) Jurnal Agriprimatech "Produktivitas Crude Palm Oil (Cpo) Pada Perkebunan Kelapa Sawit" <http://jurnal.unprimdn.ac.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.25 wib

rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat antara lain rendahnya penggunaan benih unggul, minimnya pengetahuan teknis, lemahnya kelembagaan petani, serta keterbatasan modal. Penggunaan benih ilegal masih diminati karena harganya lebih murah, sementara pengetahuan tentang manfaat benih unggul masih kurang. Selain itu, kurangnya rotasi panen juga berdampak negatif terhadap produksi TBS per tahun. Terlebih lagi, kebutuhan modal untuk perbaikan kebun dan pembelian pupuk serta pembayaran pekerja sering tidak terpenuhi, mengakibatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat cenderung rendah<sup>48</sup>.

- e. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023, sektor perkebunan menjadi kontributor terbesar dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan dengan sektor pertanian lainnya. Dalam kurun waktu 2016-2022, sektor perkebunan secara rata-rata memberikan kontribusi sebesar 3,65 persen terhadap PDB, sementara sektor tanaman pangan hanya sebesar 3,18 persen, peternakan 1,58 persen, hortikultura 1,51 persen, dan jasa peternakan lainnya. Kelapa sawit memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian nasional, terutama karena peran petani sebagai produsen utama dalam perkebunan rakyat. Meskipun perkebunan rakyat memberikan kontribusi besar dalam produksi kelapa sawit, produktivitasnya masih rendah jika dibandingkan perkebunan besar swasta dan negara. Produktivitas perkebunan rakyat hanya mencapai 2,58 ton/ha, sedangkan perkebunan besar swasta dan negara mencapai 3,59 ton/ha. Selisih produktivitas ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan petani perkebunan rakyat. Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan telah mengatur peningkatan kesejahteraan dan produktivitas petani, data menunjukkan bahwa produktivitas perkebunan rakyat masih rendah hingga tahun 2022. Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam pelaksanaan undang-undang tersebut<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> Valentina Sokoastri1, Doni Setiadi, Arif Rakhman Hakim, Andre Dani Mawardhi, M. Lukman Fadli1(2019) Jurnal Sosiologi Pedesaan "Perkebunan Petani Kelapa Sawit Rakyat: Permasalahan dan Solusi" Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.55 wib

<sup>49</sup> Taufiq Hidayatullah (2023) . Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara "Analisis Empiris Produksi Kelapa Sawit Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani" <https://ejurnal.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib



Gambar 6. Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2022 (Sumber: BPS, 2023)

- f. Peningkatan riset dan inovasi untuk penemuan-penemuan baru yang dapat merangsang pertumbuhan industri sawit masih kurang. Pada tahun 2023, Indonesia hanya berhasil menghasilkan 179 jenis produk turunan dari hilirisasi industri sawit, sementara Malaysia telah mengembangkan 260 jenis produk<sup>50</sup>. Mayoritas hasil riset yang dilakukan hanya berhenti di perpustakaan atau dipublikasikan di jurnal ilmiah. Sedangkan riset yang berujung pada industri maupun pengambilan kebijakan belum banyak dilakukan. Hal ini karena kurang fokus pada pengembangan produk dan pasar baru, serta peningkatan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, regulasi dan sertifikasi yang semakin ketat, serta isu lingkungan dan sosial yang sering dikaitkan dengan industri sawit<sup>51</sup>. (Daftar perbandingan produk turunan industri kelapa sawit Indonesia dan Malaysia pada Lampiran III)
- g. Belum ada lembaga/organisasi promosi sawit yang berada di bawah kendali pemerintah, sehingga upaya pemerintah dan perusahaan sawit belum terkoordinasi dengan baik mengakibatkan promosi produk sawit di pasar internasional kurang<sup>52</sup>, hal ini dihadapkan dengan:

<sup>50</sup> Martyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia "RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?" <https://www.cnbcindonesia.com>

<sup>51</sup> sawitindonesia.com (2014) "dimana peran dan keberpihakan pemerintah terhadap sawit" <https://sawitindonesia.com> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

<sup>52</sup> Achmad Deni Daruri (2021) "Peran Pemerintah dalam Industri Sawit" <https://investor.id/opini>

- 1) Kurangnya dukungan dan perhatian dari pemerintah terhadap industri sawit, sehingga sulit untuk memperoleh dukungan keuangan dan sumber daya lainnya.
- 2) Isu lingkungan dan sosial yang sering dikaitkan dengan industri sawit, seperti deforestasi, kebakaran hutan dan hak asasi manusia, yang dapat mempengaruhi citra industri sawit dan menghambat upaya promosi.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni dan terlatih dalam bidang promosi dan pemasaran serta kurangnya kolaborasi antara berbagai pihak terkait.
- 4) Regulasi dan sertifikasi semakin ketat yang dapat mempersulit proses promosi dan pemasaran produk sawit.

Saat ini Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) adalah badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan memiliki tugas untuk menjalankan kebijakan pemerintah dalam program pengembangan sawit berkelanjutan. BPDPKS juga mengelola dana dari pelaku usaha perkebunan atau lebih dikenal dengan *Crude Palm Oil* (CPO) yang digunakan sebagai pendukung program pengembangan sawit berkelanjutan<sup>53</sup>.

- h. Organisasi untuk mendukung ekspansi dan peningkatan daya saing produk kelapa sawit belum terbentuk sehingga menjadi kendala dalam mengatasi berbagai hambatan akses pasar. Kurang fokus pada pengembangan produk dan pasar baru serta peningkatan produktivitas dan efisiensi bersama dengan kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, regulasi dan sertifikasi yang semakin ketat, serta isu lingkungan dan sosial, menjadi tantangan utama. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan nilai tambah industri

---

Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.35 wib

<sup>53</sup> djpb.kemenkeu (2015) Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit  
<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/berita-terbaru/12-badan-pengelola-dana-kelapa-sawit.html> Diakses pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.35 wib

kelapa sawit dengan mengembangkan strategi pengembangan industri yang lebih integratif dan berorientasi ekspor. BPDP kelapa sawit juga telah berkontribusi terhadap ekonomi hijau dan pengurangan emisi gas rumah kaca serta meningkatkan harga CPO dan Tandan Buah Segar. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat penting untuk meningkatkan daya saing industri sawit dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menghadapi berbagai tantangan yang ada. Oleh karena itu, pengembangan produk dan pasar baru serta peningkatan produktivitas dan efisiensi harus menjadi fokus terus menerus bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam meningkatkan nilai industri sawit Indonesia<sup>54</sup>.

- i. Koperasi produksi kelapa sawit belum mendapat dukungan serius dari pemerintah untuk mencapai kemandirian dalam pengelolaan kelapa sawit nasional, sehingga penentuan harga ditingkat petani belum seragam. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan nilai tambah industri sawit dengan mengembangkan strategi pengembangan industri sawit yang lebih integratif dan berorientasi ekspor. Namun koperasi produksi kelapa sawit masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan kelapa sawit, sehingga belum dapat mencapai kemandirian dalam pengelolaan kelapa sawit nasional<sup>55</sup>.

## 10. Kerangka Teoretis.

Untuk memperjelas pembahasan terkait membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit guna mendukung ekonomi hijau maka dalam Taskap ini digunakan beberapa teori untuk mendukung proses pembahasan tersebut sehingga ditemukan kesamaan antara pokok persoalan dengan teori yang digunakan.

<sup>54</sup> Almasdi Syahza. (2014) Potensi Pengembangan industri Kelapa Sawit <https://almasdi.staff.unri.ac.id> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.25 wib

<sup>55</sup> Nashih Nashrullah (2021) Republika.Co.Id Koperasi Petani Sawit Belum Dapat Dukungan Pemerintah <https://ekonomi.republika.co.id/berita> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib



- a. **Teori Birokrasi.** Teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber adalah suatu sistem organisasi yang didasarkan pada prinsip rasionalitas dan hierarki yang terstruktur dengan baik. Dalam birokrasi menurut Weber, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan secara jelas. Selain itu, birokrasi juga memiliki pembagian kerja yang spesifik, kompetensi teknis yang tinggi, dan netralitas terhadap faktor-faktor eksternal<sup>56</sup>. Teori birokrasi Max Weber berperan penting dalam memahami perkembangan *political will* dalam pengelolaan industri kelapa sawit. Konsep birokrasi Weber menekankan pentingnya sistem yang terstruktur dan terorganisir dalam mencapai efisiensi dan efektivitas pengelolaan organisasi. Konsep ini dapat diterapkan pada industri kelapa sawit dengan mengkaji bagaimana struktur dan proses birokrasi berkontribusi terhadap pengembangan *political will* di antara para pemangku kepentingan.
- b. **Teori Keunggulan Absolut.** Teori keunggulan absolut dikemukakan oleh Adam Smith, seorang ekonom terkenal asal Skotlandia pada abad ke-18, yang mengatakan bahwa “suatu negara dikatakan mempunyai keunggulan absolut dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat memproduksi lebih banyak barang dan jasa dibandingkan negara lain<sup>57</sup>. Dalam *Perspektif sustainability*, sawit sebagai komoditas paling pesat dalam perkembangannya. Kelapa sawit Indonesia mencakup tiga pilar penting yaitu keberlanjutan dalam dimensi ekonomi, sosial, dan ekologi. Oleh karena itu perlu membuat desain pengembangan sawit dalam perspektif jangka panjang.
- c. **Teori Ekonomi Hijau.** Merupakan konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, serta secara signifikan mengurangi risiko kerusakan lingkungan<sup>58</sup>. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono (2016), konsep ekonomi hijau

<sup>56</sup> Max Weber, *Economy and Society*. Volume 1, *An Outline of Interpretative Sociology*, Guenter Roth and Claus Eitich (ed.), (California: The Regents of University of California, 1978), 22

<sup>57</sup> OCBC NISP (2023) Teori keunggulan mutlak <https://www.ocbc.id/id/article> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.50 wib

<sup>58</sup> PPSDMA (2021) Mengetahui Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau di Indonesia <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita> Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.50 wib

diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang minim emisi karbon dioksida terhadap lingkungan, efisien dalam penggunaan sumber daya alam, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial<sup>59</sup>. Teori ekonomi hijau dalam pengelolaan industri sawit adalah konsep yang menyediakan informasi dan persyaratan yang diperlukan untuk mendukung ekonomi hijau melalui pengelolaan industri sawit. Penerapan teori ekonomi hijau dalam pengelolaan industri sawit dapat membantu meningkatkan keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Penerapan teori ekonomi hijau dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan membantu mengurangi kemiskinan. Ekonomi hijau mendorong terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta merupakan solusi terhadap isu negatif yang ditujukan kepada industri sawit Indonesia di pasar global.

## 11. Lingkungan Strategis

Dinamika perkembangan lingkungan strategis mencakup perubahan-perubahan dalam lingkungan eksternal suatu industri, seperti perubahan regulasi, kebijakan pemerintah dan tuntutan pasar yang dapat mempengaruhi operasional dan keberlanjutan industri sawit. Dalam rangka mencapai tujuan nasional dan menjaga kepentingan nasional yang dapat diidentifikasi sebagai potensi ancaman. Analisis strategis untuk merumuskan ancaman dilakukan secara kontinu terhadap data, fakta dan tren situasi baik di skala global, regional, maupun nasional.

### a. Perkembangan Lingkungan Global

Lingkungan global saat ini berbagai isu sosial, ekonomi, dan lingkungan menjadi sorotan akibat interaksi manusia dengan ekosistem global. Aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya telah

---

<sup>59</sup> Mega Liani Putri (2016). Susilo Bambang Yudhoyono: Kampanyekan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan <https://www.itb.ac.id/berita> Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.50 wib

menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, baik secara lokal, nasional, maupun global dengan tingkat kerusakan yang terus meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitatif. Kesadaran akan ancaman dan dampak kerusakan lingkungan telah menarik perhatian dari berbagai tingkatan, baik itu masyarakat global, nasional, maupun lokal.

Perang Rusia-Ukraina sejak Februari 2022 dimulai dengan operasi militer khusus yang dilancarkan Rusia ke Ukraina memicu perang skala penuh setelah delapan tahun konflik di Ukraina timur. Perang ini telah membawa dampak besar pada dunia, termasuk meningkatnya resesi ekonomi, kelaparan di benua Afrika, dan inflasi global<sup>60</sup>. Perang Rusia-Ukraina juga memiliki dampak signifikan pada industri sawit di Indonesia. Salah satu efeknya adalah kenaikan harga minyak sawit mentah (*Crude Palm Oil/CPO*), berdampak pada harga produk turunannya seperti biodiesel. Kenaikan harga CPO ini dapat mempengaruhi industri sawit di Indonesia, terutama dalam hal biaya produksi dan keuntungan perusahaan. Selain itu, perang juga dapat mempengaruhi pasokan bahan baku sawit, seperti pupuk dan pestisida, yang dapat berdampak pada produktivitas tanaman sawit dan kualitas produk termasuk pengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Namun, perang Rusia-Ukraina juga membawa tantangan logistik dan regulasi industri sawit Indonesia untuk mampu memanfaatkan permintaan global yang dapat memperkuat posisi di perdagangan internasional.

Perkembangan perdagangan internasional yang cepat dan teratur, semakin meningkatkan ketergantungan pertumbuhan ekonomi nasional terhadap pertukaran internasional, perkembangan transportasi dan komunikasi yang mengagumkan serta kemajuan teknologi dan informasi yang luar biasa telah berakibat lahirnya bidang-bidang kerjasama baru antar bangsa. Keharusan kerjasama antara bangsa telah menjadi penting sebagai akibat perkembangan yang terjadi, sehingga negara-

---

<sup>60</sup> NEWS - sef, CNBC Indonesia ,19 February 2024 (NATO 'Kalang Kabut', Putin Klaim Kemenangan Baru Perang Rusia-Ukraina) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240219050549>

negara tidak bisa lagi sendiri-sendiri untuk berupaya menangani berbagai permasalahan yang dihadapinya.

#### b. **Perkembangan Lingkungan Regional**

Perkembangan strategi lingkungan di tingkat regional memiliki dampak yang signifikan pada keamanan di wilayah Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika Utara. Di Asia, terdapat sejumlah ancaman yang berpotensi memicu ketidakstabilan, seperti konflik di Laut China Selatan, ketegangan di Semenanjung Korea, dan ketegangan antara Tiongkok dan Taiwan. Sementara itu, dalam konteks politik dan keamanan di Timur Tengah, konflik yang terus berlanjut seperti Israel-Palestina, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran, situasi di Irak, Libya, Yaman, dan Suriah semakin memberikan dampak terhadap stabilitas keamanan regional, yang secara langsung berdampak juga pada kepentingan nasional Indonesia. Perubahan pada tingkat regional merupakan kenyataan yang harus dihadapi dan diperhitungkan sekaligus merupakan peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan kepentingan nasional dan mencapai tujuan nasional.

Perkembangan lingkungan regional juga memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Salah satu contohnya adalah perkembangan jumlah penduduk, produksi sektor pertanian dan industri, serta tenaga kerja dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi<sup>61</sup>. Suatu wilayah atau bagian wilayah secara keseluruhan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan potensi wilayah dan mengatur kebijakan yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi<sup>62</sup>.

Dalam industri sawit, dinamika perkembangan lingkungan regional dapat mempengaruhi pengelolaan industri sawit melalui beberapa cara.

**Pertama**, strategi perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi

---

<sup>61</sup> Lemhannas RI, Materi Pokok Bidang Studi Ekonomi, Lemhannas RI, Jakarta, 2024 Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.10 wib

<sup>62</sup> Almasdi Syahza (2008) Pengaruh Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau <https://www.bunghatta.ac.id/artikel> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.25 wib

kinerja perkebunan kelapa sawit, seperti melalui peningkatan produktivitas perbaikan kultur teknis pemeliharaan dan pengelolaan kebun yang disertai peningkatan kapasitas pabrik. **Kedua**, perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan kebun, seperti melalui pelatihan, pendampingan, dan pendidikan dengan skema pendanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan kelapa sawit dan pemda setempat. **Ketiga**, perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi kelembagaan koperasi, seperti melalui pendampingan dan pelatihan oleh dinas terkait maupun perusahaan inti mitra dalam kemampuan kultur teknis dan manajerial petani/koperasi. **Keempat**, perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan, seperti melalui peningkatan produksi kelapa sawit rakyat melalui penerapan kultur teknis tersandar dan pendampingan perkebunan inti yang disertai dengan jaminan terolahnya Tandan Buah Segar (TBS) dengan harga yang layak. **Kelima**, perkembangan lingkungan dapat mempengaruhi keberadaan industri kelapa sawit, seperti melalui peningkatan produksi perkebunan kelapa sawit rakyat melalui peningkatan kualitas SDM dalam pengelolaan kebun sesuai dengan prinsip-prinsip perkebunan kelapa sawit berkelanjutan<sup>63</sup>.

#### c. **Perkembangan Lingkungan Nasional**

Perkembangan lingkungan global juga mempengaruhi pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia dalam beberapa aspek. **Pertama**, perubahan iklim global dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit, serta mengganggu kegiatan pertanian dan perkebunan sawit. **Kedua**, perluasan lahan perkebunan sawit dapat mengkonversi kawasan hutan, khususnya lahan gambut, yang dapat menyebabkan degradasi lahan dan peningkatan emisi karbon. **Ketiga**, industri kelapa sawit harus menghadapi berbagai tantangan yang

---

<sup>63</sup> Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023 <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/RAD-KSB1.pdf> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

semakin besar, khususnya mengenai isu lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan industri kelapa sawit di Indonesia, serta upaya mitigasi atau pengurangan emisi karbon, seperti melakukan evaluasi kesesuaian lahan dan mengidentifikasi karakteristik lahan gambut sebelum melakukan deforestasi<sup>64</sup>. Hal ini dapat di tinjau dalam lingkup perkembangan strategi lingkungan pada tataran nasional Indonesia dari berbagai aspek seperti geografi, demografi, sumber daya alam (SKA), ideologi, sosbud, ekonomi, politik, perlindungan, dan keamanan.

### 1) **Geografi.**

Dampak lingkungan strategi nasional terhadap pengelolaan kelapa sawit di Indonesia mempunyai banyak aspek dan dipengaruhi oleh berbagai aspek geografis. Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangatlah pesat, dimana sebagian besar produksi minyak kelapa sawit negara ini berasal dari pulau Sumatera dan Kalimantan. Perluasan perkebunan kelapa sawit telah menimbulkan permasalahan lingkungan, termasuk perubahan kualitas air, polusi udara, dan gangguan terhadap satwa liar endemik.

Distribusi geografis perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat signifikan, dengan 90% perkebunan kelapa sawit di negara ini berlokasi di pulau Sumatera dan Kalimantan, menyumbang 95% produksi minyak kelapa sawit mentah negara. Pesatnya pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Indonesia didorong oleh program ekonomi strategis pemerintah. Namun perluasan perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan lingkungan. Industri sawit telah dikritik karena dampak negatifnya terhadap masyarakat lokal, termasuk konflik lahan dan pengusiran masyarakat adat. Upaya pemerintah untuk mendorong praktik produksi minyak sawit berkelanjutan

<sup>64</sup> Purba, T Sipayung (2018) Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan <https://jmi.ipsk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.25 wib

sangat penting untuk memitigasi dampak ini dan memastikan keberlanjutan industri dalam jangka panjang<sup>65</sup>.

## 2) **Demografi.**

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia mempunyai dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup nasional, khususnya dari segi demografi. Pesatnya pertumbuhan industri ini menyebabkan perubahan sebaran penduduk dan demografi wilayah dimana perkebunan kelapa sawit berada. Ketimpangan nasional dalam hal distribusi penduduk dan ekonomi juga berdampak pada pengelolaan sawit. Perluasan perkebunan kelapa sawit juga menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak sosial dan lingkungan dari industri tersebut. Daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi cenderung lebih rentan terhadap ekspansi perkebunan sawit yang tidak berkelanjutan. Pengelolaan harus memperhatikan perbedaan ini dan memastikan bahwa manfaat dari industri sawit dapat dirasakan secara merata. Begitu juga terhadap perubahan sosial dan budaya di masyarakat, seperti perubahan pola konsumsi dan kesadaran akan lingkungan, juga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk sawit dan tuntutan akan praktek-praktek produksi yang berkelanjutan. Upaya pemerintah untuk mendorong praktik produksi minyak sawit berkelanjutan sangat penting untuk memitigasi dampak ini dan memastikan keberlanjutan industri dalam jangka panjang<sup>66</sup>.

## 3) **Sumber Daya Alam (SKA).**

Geografis Indonesia, dengan kepulauan dan wilayah laut yang luas, memainkan peran penting dalam membentuk kebijakan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Indonesia memiliki keunggulan yang berpotensi untuk pengembangan perkebunan

<sup>65</sup> Siaran Pers Kemenko Perekonomian (2021) "Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan" <https://www.ekon.go.id> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

<sup>66</sup> Jan Horas V. Purba, Tungkot Sipayung (2020) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan <https://jmi.ipk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.25 wib

kelapa sawit dan industri CPO. Dalam hal daya saing bahan baku, Indonesia memiliki ketersediaan yang tinggi karena memiliki lahan perkebunan kelapa sawit terluas di dunia. Sementara itu, Malaysia diprediksi akan mencapai titik jenuh karena keterbatasan lahan. Perkembangan kebijakan dan pengelolaan sumber daya alam mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan kelapa sawit di Indonesia. Pengelolaan kelapa sawit, sebagai kontributor penting bagi perekonomian negara, terkait erat dengan kebijakan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam<sup>67</sup>. Namun, pengelolaan minyak sawit di Indonesia harus menyeimbangkan tujuan ekonomi dan sosial dengan kebutuhan untuk melindungi lingkungan dan memastikan keberlanjutan produksi minyak sawit dalam jangka panjang, dengan memperhatikan penggunaan lahan, keanekaragaman hayati dan ekosistem, sumber daya genetik, konservasi tanah, perubahan iklim, dampak sosial dan ekonomi, dampak lingkungan dan mengadopsi penerapan praktik pertanian berkelanjutan<sup>68</sup>.

#### 4) **Ideologi.**

Pengaruh perkembangan lingkungan nasional dalam konteks ideologi terhadap pengelolaan industri sawit di Indonesia sangatlah signifikan. Ideologi mencakup pandangan politik, ekonomi, dan sosial yang mempengaruhi kebijakan pemerintah, tindakan perusahaan, serta respons masyarakat terhadap industri sawit. Konsep pembangunan berkelanjutan semakin ditekankan dalam pandangan ideologi nasional. Pemerintah dan masyarakat perlu memperhatikan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengelolaan industri sawit. Pengelolaan sawit sebagai upaya untuk mencapai

<sup>67</sup> Choirul Saleh, Wawan H. Hardiwinata, Lely Indah Mindarti, Soesilo Zauhar (2020) Pengelolaan Kelapa Sawit oleh Pemerintah Republik Indonesia <https://www.redalyc.org/journal> Diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 22.00 wib

<sup>68</sup> P Partini, M Noer, I Suliansyah, D Devianto 2023 Jurnal Agribisains, Dinamika pengembangan perkebunan sagu berkelanjutan berbasis kearifan lokal <https://ojs.unida.ac.id/> Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.12 wib



kedaulatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk olahan sawit dan penguatan peran perusahaan dalam industri sawit. Upaya pengelolaan industri kelapa sawit harus dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab, menyeimbangkan kepentingan ekonomi, lingkungan dan sosial serta selaras dengan prinsip ideologi nasional dan tuntutan masyarakat terhadap perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia<sup>69</sup>.

#### 5) Sosial dan Budaya.

Perkembangan lingkungan sosial dan budaya di Indonesia telah mengalami transformasi yang sangat radikal sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktor-faktor seperti kemajuan iptek, perkembangan lingkungan sosial masyarakat, praktik kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara, serta pengaruh teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Transformasi sosial budaya berpotensi membawa dampak baik dan buruk bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu dampak positifnya adalah kemudahan mobilitas masyarakat dan peningkatan profesionalisme dalam tenaga kerja. Namun di sisi lain, perubahan ini juga dapat memicu budaya konsumtif serta munculnya nilai dan norma baru yang lebih sejalan dengan perkembangan zaman. Dalam pengelolaan industri sawit di Indonesia sosial dan budaya mempengaruhi regulasi, kebijakan dan praktik pengelolaan sawit di Indonesia seperti memperhatikan hak-hak masyarakat adat atas tanah, masyarakat lokal, termasuk memberikan manfaat ekonomi yang adil dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan<sup>70</sup>.

---

<sup>69</sup> Bambang Hendroyono (2021) "Resiliensi, Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan" <https://ejournal.unsri.ac.id> Diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 22.00 wib

<sup>70</sup> Salman Yoga S (2018) Jurnal Al-Bayan "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi" <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> Diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 22.25 wib

## 6) **Ekonomi.**

Perkembangan lingkungan nasional dari sudut pandang ekonomi melibatkan berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi terhadap lingkungan, upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan, serta kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat seringkali berdampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran udara, air, dan tanah, deforestasi, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Selain itu ekonomi juga sangat berpengaruh terhadap pengelolaan sawit di Indonesia mulai dari tahap pengolahan kebun hingga pemasaran dan perdagangan produk hasil olahan. Upaya untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta mematuhi standar internasional terkait keberlanjutan menjadi kunci dalam menjaga industri sawit Indonesia yang berkelanjutan di masa depan<sup>71</sup>.

## 7) **Politik.**

Dari perspektif politik, perkembangan lingkungan nasional melibatkan dinamika yang kompleks antara kebijakan, interaksi pemangku kepentingan, dan respons pemerintah terhadap isu-isu lingkungan. Politik memegang peran kunci dalam melahirkan kebijakan lingkungan, di mana pemerintah dan lembaga legislatif bertanggung jawab merumuskan kebijakan yang mengatur pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan upaya keberlanjutan lainnya. Prioritas politik yang diberikan kepada isu lingkungan juga merupakan bagian dari perkembangan politik lingkungan nasional. Implementasi kebijakan lingkungan sering kali menjadi tantangan dalam politik karena melibatkan berbagai kepentingan yang saling bertentangan.

---

<sup>71</sup> Ririe Ranggasari (2023) Ekonomi & Bisnis “Kilas Balik Tahun 2023: 10 Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Paling Berdampak” <https://en.tempo.co> Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 20.00 wib

Politik juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan industri sawit di Indonesia. Kebijakan pemerintah, regulasi, dan keputusan politik mempengaruhi cara industri dikembangkan, diatur, dan dijalankan. Contohnya, kebijakan pemerintah terkait konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit, perizinan pembukaan lahan baru, dan regulasi pengelolaan limbah sawit mempengaruhi praktik industri. Persaingan politik antara berbagai kepentingan, seperti industri, masyarakat adat, LSM lingkungan, dan pemerintah daerah, juga berpengaruh pada pengelolaan industri sawit<sup>72</sup>.

### 8) **Pertahanan dan Keamanan.**

Lingkungan strategis nasional dalam konteks pertahanan dan keamanan merujuk pada kondisi geografis, politik, ekonomi, sosial, dan militer suatu negara yang mempengaruhi keamanan dan pertahanannya secara keseluruhan. Faktor-faktor tersebut mencakup letak geografis, kebijakan luar negeri, ancaman yang dihadapi, dan dinamika regional maupun global. Wilayah perbatasan sering kali rentan terhadap gangguan lingkungan yang berdampak pada keamanan nasional, seperti *illegal logging*, perburuan liar, dan penyelundupan barang ilegal. Isu lingkungan juga sering kali melintasi batas negara dan memerlukan kerja sama regional dalam penanganannya. Kerja sama regional dalam pengelolaan sumber daya alam bersama, mitigasi perubahan iklim, dan respons terhadap bencana alam dapat memperkuat stabilitas dan keamanan di seluruh kawasan.

Dalam aspek pertahanan dan keamanan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan industri sawit. Konflik antara masyarakat lokal dan perusahaan sawit, yang seringkali terkait dengan masalah hak tanah dan dampak lingkungan, dapat

<sup>72</sup> Heldi Yunan Ardian<sup>1</sup>, Delima Hasri Azahari(2020) Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 18 No. 1, Juni 2020: 59-73 "Strategi Komunikasi Dalam Tata Kelola Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia" <https://media.neliti.com> Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.20 wib

mengganggu kegiatan operasional dan menghambat pengelolaan sawit. Gangguan terhadap produksi sawit, baik karena konflik sosial maupun faktor lainnya, dapat mempengaruhi ketersediaan dan harga minyak sawit, yang merupakan bahan baku penting bagi industri pangan dan non-pangan. Oleh karena itu, stabilitas keamanan dan keberlanjutan lingkungan merupakan faktor penting dalam memastikan kelangsungan operasional dan pertumbuhan industri sawit secara berkelanjutan. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan aparat keamanan menjadi kunci dalam mengelola risiko dan mempromosikan praktik pengelolaan sawit yang berkelanjutan dan aman<sup>73</sup>.



---

<sup>73</sup> Ngadi dan Mita Noveria (2017) Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017 “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan” <https://jmi.ipisk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.55 wib

## BAB III

### PEMBAHASAN

#### 12. Umum.

Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam penghasilan minyak sawit, telah menjadi salah satu penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Industri sawit telah menjadi salah satu sektor paling signifikan dalam perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara dan pendapatan devisa. Namun, industri sawit juga telah menghadapi berbagai tantangan, seperti perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Selain itu di wilayah hulu, kendala-kendala seperti konflik lahan dengan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan menjadi faktor utama yang memperlambat pengembangan industri kelapa sawit. Konflik ini sering kali terjadi karena klaim atas tanah antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat adat yang mendiami wilayah tersebut sejak lama. Seperti yang terjadi di Kalimantan Timur, pada bulan Februari 2023, tercatat ada 48 kasus konflik usaha perkebunan di Kalimantan Timur yang melibatkan 42 perusahaan perkebunan. Dari jumlah tersebut, 31 kasus terkait lahan dan 17 kasus tidak terkait lahan. Konflik lahan meliputi permasalahan antara perusahaan dengan masyarakat, tumpang tindih izin atau peruntukan lahan, okupasi lahan oleh masyarakat, tuntutan masyarakat untuk mengembalikan lahan, serta ganti rugi lahan. Sementara itu, konflik non-lahan mencakup tuntutan kebun plasma, persetujuan masyarakat, pembagian hasil penjualan TBS dan harga TBS kelapa sawit<sup>74</sup>.

Penyelesaian konflik ini memerlukan pendekatan yang hati-hati dan berkelanjutan untuk memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat konflik. Sedangkan di wilayah hilir, masalah utama sering kali berkaitan dengan infrastruktur dan regulasi. Kurangnya infrastruktur yang memadai seperti jalan, pelabuhan, dan sistem transportasi lainnya dapat menghambat distribusi kelapa sawit dan produk turunannya.

---

<sup>74</sup> Prabawati (2023) "Konflik Usaha Perkebunan Harus Diatasi Dengan Serius"  
<https://diskominfo.kaltimprov.go.id> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.15 wib

Selain itu, selama beberapa dekade terakhir, penggunaan minyak kelapa sawit mendapat kritik karena dikaitkan dengan kebakaran hutan, deforestasi, hilangnya habitat dan spesies terancam punah, polusi kabut, perubahan iklim, serta perampasan lahan masyarakat adat. Kritik ini telah mendorong konsumen dan organisasi global untuk memboikot produk yang mengandung minyak sawit. Parlemen Eropa melarang penggunaan minyak sawit dalam semua *biofuel* Eropa mulai tahun 2020. Namun, larangan ini dapat menimbulkan masalah besar lainnya. Selain mengancam mata pencaharian jutaan petani kelapa sawit (85 persen produksi global berasal dari Indonesia dan Malaysia), laporan *International Union for Conservation of Nature (IUCN)* terbaru menunjukkan bahwa menggantikan minyak sawit dengan minyak nabati lain akan memerlukan lebih banyak lahan dan menyebabkan masalah baru. Untuk menghasilkan volume minyak yang sama, tanaman minyak nabati lain memerlukan setidaknya 10 kali luas lahan dibandingkan kelapa sawit<sup>75</sup>. Lahan tambahan yang dibutuhkan harus berasal dari area baru, yang dapat mengancam deforestasi. Padahal berdasarkan analisis Citra *Landsat* tahun 2013, ekspansi kebun sawit bukan merupakan penyebab utama deforestasi namun berasal dari reforestasi (melalui konversi lahan pertanian, lahan telantar/semak belukar, dan HTI). Bahkan sebaliknya, ekspansi tersebut secara ekologis berkontribusi pada perubahan penggunaan lahan yang meningkatkan stok karbon<sup>76</sup>.



Gambar 7. Perbandingan Penggunaan lahan (Sumber : *Oil Word* 2018)

<sup>75</sup> Asian Agri (2023) Apakah yang Dimaksud dengan Minyak Sawit Berkelanjutan? <https://www.asianagri.com> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.00 wib

<sup>76</sup> Jan Horas V. Purba, Tungkot Sipayung (2017) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan\* <https://jmi.ipk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Permasalahan lain yang dihadapi dalam perkebunan kelapa sawit rakyat yaitu, pola perkebunan Inti Rakyat (PIR/PIR-TRANS), pola Kredit Koperasi Primer dan pola swadaya atau mandiri. Untuk Pola Kredit Koperasi Primer (KKPA) dalam perkebunan kelapa sawit rakyat di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah rendahnya produktivitas perkebunan rakyat. Kendala lain yang mencakup perkebunan rakyat adalah rendahnya pengembalian dana Bea Keluar (BK) atau Pungutan Ekspor minyak sawit yang dikenakan oleh pemerintah. Dana BK tersebut dapat digunakan untuk mengatasi kendala dalam peningkatan produktivitas perkebunan rakyat. Selain itu, permasalahan sosial ekonomi, perilaku petani dan keterkaitannya dengan fenomena demam sawit di kalangan pekebun rakyat juga menjadi tantangan dalam meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat. Dalam beberapa kasus, program KKPA juga menghadapi masalah, seperti penanaman yang terlambat, pembayaran kredit yang belum lunas, dan kondisi areal yang tidak produktif.

Sedangkan untuk permasalahan pola swadaya atau mandiri yaitu produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat masih rendah disebabkan beberapa faktor, seperti kurangnya dukungan dari pemerintah, perusahaan dan lembaga keuangan serta kurangnya dukungan pelatihan, penyuluhan dan pemberdayaan petani. Petani swadaya atau mandiri juga menghadapi keterbatasan akses ke sumber daya, seperti lahan, teknologi dan bantuan keuangan, yang membatasi kemampuan mereka untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas perkebunan. Petani swadaya dan mandiri juga menghadapi permasalahan dalam pemasaran, seperti harga jual sawit yang rendah dan sulitnya mendapatkan harga yang adil. Hal ini disebabkan oleh adanya perantara yang mengambil keuntungan dari transaksi yang mengakibatkan petani tidak dapat memperoleh harga yang sesuai.

Dalam upaya mengatasi tantangan ini *political will* dalam pengelolaan industri sawit menjadi sangat penting. *Political will* dapat didefinisikan sebagai kemampuan dan keinginan pemerintah untuk mengambil keputusan dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan dan berbasis lingkungan. *Political will* dapat

berupa keputusan untuk mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan industri sawit. Namun, membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit tidaklah mudah. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kebijakan yang lebih efektif. Dalam konteks ini, perlu dilakukan analisis yang lebih dalam tentang bagaimana membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit. Analisis ini harus melibatkan pemerintah, industri sawit dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan industri sawit dengan memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu kebijakan, budaya dan struktur organisasi.

Dalam bab ini, akan menguraikan pembahasan terhadap tiga persoalan pokok sebagaimana dimaksud dalam Bab I yang dielaborasi dalam beberapa sub bab, yaitu: **Pertama**, kondisi pengelolaan industri sawit saat ini; **Kedua**, tantangan membangun *political will* pengelolaan industri sawit; dan **Ketiga**, strategi pengelolaan industri sawit untuk mendukung ekonomi hijau. Pembahasan persoalan ini dianalisis dengan menggunakan pisau analisis yaitu Teori Birokrasi, Teori Keunggulan Absolut dan Teori Ekonomi Hijau. Analisis data dan fakta menggunakan analisis PESTEL serta berpedoman pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

### 13. Kondisi Pengelolaan Industri Sawit Saat ini.

Industri kelapa sawit di Indonesia memainkan peran strategis dalam pembangunan ekonomi negara. Pada tahun 2023, Indonesia memproduksi 56 juta ton minyak sawit, dengan ekspor sebesar 26,33 juta ton mencapai Rp28,45 miliar (US\$1,7 juta), hampir 12 persen kontribusi yang signifikan terhadap devisa nasional<sup>77</sup>. Industri ini juga telah memberikan kontribusi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja bagi sekitar 16 juta pekerja<sup>78</sup>.

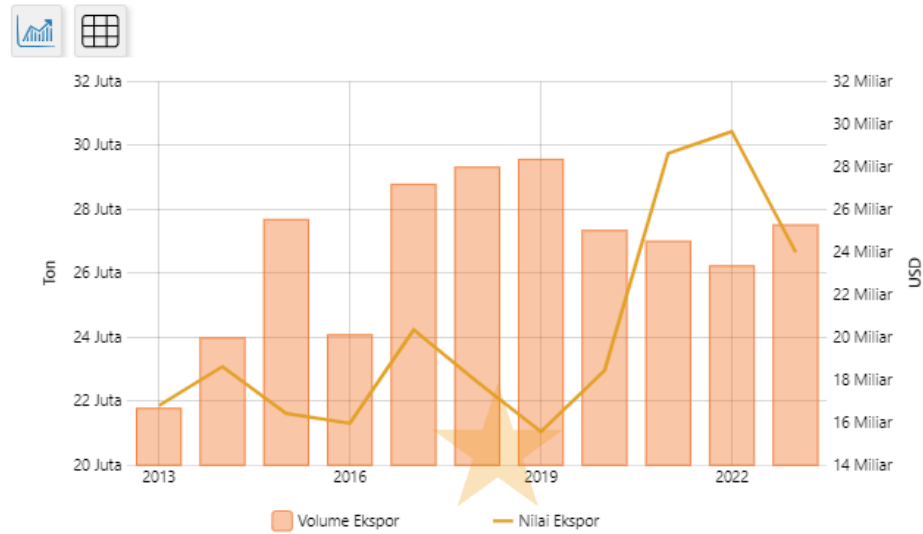
<sup>77</sup> AntaraNews (28 Maret 2024) "Indonesia menyumbang 54% ekspor minyak sawit global" <https://en.antaranews.com> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.15 wib

<sup>78</sup> Kabul Wijayanto (2023) "Sawit Masih Berkontribusi Bagi Perekonomian Negara, Harga CPO dan TBS Sawit pun Cenderung Stabil" <https://www.bdpd.or.id> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.55 wib



## Volume dan Nilai Ekspor Minyak Kelapa Sawit Indonesia (2013-2023)

databoks



Gambar 8. Statistik Volume dan Nilai Ekspor Kelapa Sawit Indonesia periode 2013-2023 (Sumber : Databoks 2024)

Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit, khususnya di tingkat pekebun rakyat, sebagaimana Pasal 33 UUD 1945 ayat (3) pasal ini menyatakan bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Prinsip ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus mengutamakan kesejahteraan rakyat dan berkelanjutan, Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pembangunan berkelanjutan telah ditetapkan sebagai salah satu aspek pengarusutamaan dengan tujuan memberikan akses pembangunan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup, sehingga mampu meningkatkan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Industri kelapa sawit Indonesia juga telah menjadi andalan perekonomian nasional dengan kontribusi yang signifikan terhadap produksi minyak sawit dunia. Keunggulan ini disebabkan oleh penguasaan rantai pasokan dari bahan baku hingga produk akhir, dimana mengandung 87 persen komponen domestik, yang tidak dimiliki oleh komoditas pertanian lain<sup>79</sup>.

<sup>79</sup> PSE.litbang.pertanian.go.id (2022) "Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menjadi Andalan Perekonomian Nasional" <https://binasawitmakmur.com> Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah kerangka hukum utama yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Salah satu sektor yang sangat relevan dengan undang-undang ini adalah industri kelapa sawit, yang merupakan salah satu sektor utama perekonomian Indonesia namun sering kali menjadi sorotan terkait dampak lingkungan yang ditimbulkan. Upaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan mengurangi dampak lingkungan negatif dari industri sawit telah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, implementasi kebijakan ini seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan politik yang kompleks, antara lain: **Pertama**, Industri sawit memberikan kontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal di banyak daerah di Indonesia. Banyaknya lapangan kerja dan pendapatan yang dihasilkan dari industri ini menjadi aspek penting dalam pertimbangan kebijakan. Upaya untuk menerapkan kebijakan yang lebih ketat terkait dengan keberlanjutan dapat bertentangan dengan kepentingan ekonomi lokal, terutama di daerah-daerah di mana industri sawit menjadi tulang punggung ekonomi. **Kedua**, Perusahaan-perusahaan besar dalam industri sawit memiliki pengaruh politik yang signifikan melalui dukungan finansial, sering menentang kebijakan yang mengurangi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan maksimal, terutama jika kebijakan tersebut membutuhkan investasi tambahan atau mengharuskan perusahaan untuk mematuhi standar lingkungan yang lebih ketat. **Ketiga**, Koordinasi dan konsistensi antar lembaga pemerintah seringkali menjadi tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan yang efektif. Persaingan kepentingan antar lembaga pemerintah, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, ataupun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat menghambat upaya menyusun dan melaksanakan kebijakan secara efisien.

Dalam pengelolaan industri sawit, *political will* mengacu pada keberpihakan atau keberanian politik yang diperlukan dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam meningkatkan pengelolaan industri sawit. Dalam *political will* diperlukan keberpihakan yang kuat dan komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan industri sawit yang berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor, dihadapkan pada kondisi pengelolaan industri sawit saat ini, antara lain:

**Pertama**, Konflik agraria yang tidak berkesudahan terhadap hutan adat disebabkan karena kurangnya perlindungan hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat. Di Indonesia, konflik agraria bukanlah fenomena baru, melainkan sebuah permasalahan yang telah berkecamuk sejak zaman kolonial dan masih berlanjut hingga saat ini. Data dari konsorsium pembaruan agraria menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah konflik pertanahan selama periode 2015 hingga 2022, terutama yang berhubungan dengan perkebunan, termasuk perkebunan kelapa sawit<sup>80</sup>. Contoh konflik agraria bentuk kebijakan seperti *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang bertujuan mengatur pengelolaan perkebunan kelapa sawit, dalam prakteknya seringkali memunculkan konflik karena tumpang tindih perizinan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat lokal. Salah satu contoh konflik yang mencolok adalah antara masyarakat adat Dayak di Kabupaten Sanggau dengan PT. Mitra Austral Sejahtera (PT. MAS), dimana resistensi tertutup yang dilakukan oleh masyarakat adat melalui laporan kepada *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan lembaga internasional lainnya berhasil mengusir PT MAS dari wilayah tersebut pada tahun 2020<sup>81</sup>.

**Kedua**, Keterbatasan transfer teknologi terhadap industri sawit untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Keterbatasan transfer teknologi ini disebabkan kurangnya pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pengembangan teknologi. Aplikasi SawitKita yang sudah ada merupakan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi berbasis Android. Aplikasi ini berfungsi sebagai media transfer informasi antara pekebun dengan pakar dan praktisi kelapa sawit. Fitur-fitur yang disediakan meliputi sistem pakar untuk persiapan lahan (LahanKita), pembibitan (BibitKita), pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPTKita), pemupukan (FertiKita), pengelolaan panen (PanenKita), dan administrasi keuangan (UangKita). Namun, hingga saat ini, aplikasi SawitKita baru diunduh dan digunakan oleh 2.843 petani, padahal menurut Buku Statistik Perkebunan 2021-2022,

---

<sup>80</sup> Ady Thea DA (9 Januari 2023) Berita "KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria" <https://www.hukumonline.com> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.00 wib

<sup>81</sup> Grevilma Kurniati Pertiwi (2024) "Implementasi Kebijakan ISPO dan Konflik Agraria: Studi Kasus Konflik Perkebunan Sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tahun 2011 – 2020". <https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 21.25 wib

terdapat sekitar 2,5 juta kepala keluarga petani kelapa sawit di Indonesia (petani plasma dan swadaya)<sup>82</sup>. Hal ini menunjukkan masih kurangnya minat petani menggunakan aplikasi dan rendahnya latar belakang pendidikan para petani sawit, oleh karena itu perlu perhatian lebih untuk memperluas jangkauan aplikasi seperti tersebut kepada para petani guna meningkatkan kualitas produksi dan pengembangan industri sawit.



Gambar 9. Distribusi pengguna aplikasi SawitKita (Sumber Sawit Indonesia.com 2022)

Kurangnya dukungan pemerintah dalam mengembangkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung pengembangan teknologi juga dapat menjadi hambatan dalam berinovasi untuk mengembangkan produk turunan sawit. Produk turunan industri sawit Indonesia dari hilirisasi industri sawit sampai dengan tahun 2023 hanya menghasilkan 179 jenis produk, sementara Malaysia telah mengembangkan 260 jenis produk<sup>83</sup>. Dalam contoh tersebut, transfer teknologi dapat terhambat oleh kelemahan dalam penguasaan teknologi, penciptaan inovasi serta *Research and Development (R&D)* yang dapat membawa negara ke dalam jebakan kelemahan dalam pengembangan industri nasional yang tangguh dan mandiri. Oleh karena itu, perlu adanya

<sup>82</sup> Ditjenbun (2023) Buku Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023 <https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.12 wib

<sup>83</sup> Martyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia "RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?" <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.00 wib

perhatian lebih besar terhadap pengembangan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi industri sawit<sup>84</sup>.

**Ketiga**, Regulasi yang tidak konsisten dapat menghambat pengembangan industri sawit yang berkelanjutan. Misalnya, kebijakan Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO): Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil System* (ISPO), Peraturan Menteri Pertanian No 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian dan Pengembangan, Peremajaan, serta Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit menunjukkan bahwa pemerintah telah menerapkan kerangka peraturan dan mendorong kerja sama multipihak di sektor kelapa sawit. Namun, kebijakan ini tidak konsisten yang dapat menghambat pengembangan industri sawit<sup>85</sup>. Regulasi dianggap tidak konsisten karena: 1) Ketidakjelasan dalam kriteria dan indikator sertifikasi, terutama terkait dengan kepatuhan hukum, hak atas tanah dan kepatuhan lingkungan; 2) Ketidakjelasan dalam kerja sama multipihak antar kementerian yang menyebabkan tumpang tindih tugas dan kewenangan serta kendala dalam implementasi kebijakan di tingkat daerah; 3) Ketidakjelasan kepastian hukum dan hak atas tanah, terutama terkait dengan konflik lahan antara petani kecil dan perusahaan besar; 4) Kurangnya keterlibatan dan transparansi dalam proses sertifikasi dan pengambilan keputusan serta kurangnya sistem pelaporan dan verifikasi yang transparan; 5) Kurangnya pengakuan internasional terhadap kebijakan ISPO dibandingkan standar internasional seperti RSPO, mempengaruhi akses pasar global bagi produk kelapa sawit Indonesia; 6) Keterbatasan dukungan pendanaan dan bantuan teknis untuk petani kecil dalam mencapai sertifikasi ISPO dan meningkatkan praktik usaha yang berkelanjutan<sup>86</sup>.

---

<sup>84</sup> Prasetyo, Eko Agus, DZAKIY, Uruqul Nadhif, SUSHANDOYO, Dedy (2022) Buku Berjudul "Transfer Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Bisnis" <https://salmanreadingcorner.web.id> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.25 wib

<sup>85</sup> Siaran Pers Kemenko Perkonomian (2022) Pemerintah Terus Dorong Industri Sawit Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4639> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.55 wib

<sup>86</sup> Samuel Pablo Pareira (2023) Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO <https://www.cips-indonesia.org> Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.45 wib

**Keempat**, Keterbatasan keberpihakan terhadap pengembangan infrastruktur, memerlukan keberpihakan yang lebih kuat dari pemerintah untuk mengembangkan jaringan transportasi dan fasilitas lainnya, seperti:

- a. Akses jalan dan transportasi yang efektif untuk mengangkut hasil panen kelapa sawit ke pabrik pengolahan.
- b. Keterbatasan energi yang memadai untuk proses pengolahan.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak memadai untuk mengurangi biaya produksi.

Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur yang memadai dan efektif menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas industri sawit serta untuk mengurangi biaya operasional dan meningkatkan keuntungan<sup>87</sup>.

**Kelima**, Keterbatasan keberpihakan terhadap pengembangan industri yang lebih efektif dan berkelanjutan mengakibatkan pengambilan keputusan tumpang tindih dan lambat, hal ini disebabkan karena perbedaan kewenangan beberapa kementerian yang terlibat dalam industri sawit, antara lain Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan yang. perbedaan tersebut meliputi :

- a. Tujuan dan Fokus:
  - 1) Kementerian Perindustrian berfokus pada pengembangan industri dan peningkatan kualitas produk, maka dalam tugasnya memprioritaskan pengembangan teknologi dan inovasi dalam industri sawit;
  - 2) Kementerian Pertanian berfokus pada pengembangan pertanian dan peningkatan produksi, maka dalam tugasnya memprioritaskan pengembangan varietas tanaman dan teknologi budidaya yang lebih efektif;

---

<sup>87</sup> Santo Adhynugraha (2006) "Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kalimantan Timur" <https://doi.org/10.24258/jba.v2i2.22> Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.00 wib

- 3) Kementerian Perdagangan berfokus pada pengembangan perdagangan dan peningkatan ekspor, maka dalam tugasnya memprioritaskan pengembangan pasar dan strategi pemasaran yang lebih efektif;

b. Kebijakan dan Regulasi:

- 1) Kementerian Perindustrian memiliki kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan industri, seperti peningkatan investasi dan pengembangan infrastruktur;
- 2) Kementerian Pertanian memiliki kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan pertanian, seperti peningkatan produksi dan pengembangan varietas tanaman;
- 3) Kementerian Perdagangan memiliki kebijakan yang lebih berfokus pada pengembangan perdagangan, seperti peningkatan ekspor dan pengembangan pasar.

c. Sumber Daya dan Kapasitas:

- 1) Kementerian Perindustrian memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan teknologi dan inovasi dalam industri sawit;
- 2) Kementerian Pertanian memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan varietas tanaman dan teknologi budidaya yang lebih efektif;
- 3) Kementerian Perdagangan memiliki sumber daya dan kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan pasar dan strategi pemasaran yang lebih efektif.

d. Kebutuhan dan Prioritas:

- 1) Kementerian Perindustrian memiliki kebutuhan dan prioritas yang lebih berfokus pada pengembangan industri, seperti peningkatan kualitas produk dan pengembangan teknologi;
- 2) Kementerian Pertanian memiliki kebutuhan dan prioritas yang lebih berfokus pada pengembangan pertanian, seperti peningkatan produksi dan pengembangan varietas tanaman;

- 3) Kementerian Perdagangan memiliki kebutuhan dan prioritas yang lebih berfokus pada pengembangan perdagangan, seperti peningkatan ekspor dan pengembangan pasar.

Dari perbedaan kewenangan dalam pengawasan industri sawit tersebut dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang kurang cepat dan tumpang tindih antara institusi yang berbeda. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi dan koordinasi yang lebih baik antara kementerian-kementerian yang berwenang untuk mengembangkan industri sawit yang lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, industri sawit di Indonesia juga menghadapi tantangan lain seperti kepastian hukum dan kebijakan yang sering berubah serta tidak adanya prinsip melanjutkan dalam melakukan pengelolaan perkebunan sawit. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan dan kebijakan yang lebih stabil dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan industri sawit yang lebih efektif dan berkelanjutan<sup>88</sup>.(Lampiran I. Matrik perbedaan kewenangan dalam pengawasan industri sawit)

*Political will* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan industri sawit di Indonesia. Dalam beberapa kasus, *political will* telah mempengaruhi kebijakan pemerintah dan strategi pengelolaan industri sawit, serta berdampak pada kesejahteraan petani dan lingkungan hidup. *Political will* juga mempengaruhi pengelolaan industri sawit di Indonesia melalui kebijakan-kebijakan yang diterapkan dan strategi-strategi yang digunakan. *Political will* yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan petani, pengembangan industri hilir dan keterlibatan masyarakat telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja industri sawit Indonesia. Oleh karena itu, melalui teori ekonomi hijau dalam mewujudkan *political will* untuk pengelolaan industri sawit di Indonesia fokus pada aspek sosial, ekonomi dan lingkungan dalam pengembangan industri kelapa sawit, dengan uraian sebagai berikut ;

---

<sup>88</sup> mutuinstitute.com (2022) "5 Masalah Yang Sering Timbul Pada Industri Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan" <https://mutuinstitute.com> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.55 wib



a. **Aspek sosial.**

- 1) Meningkatkan partisipasi masyarakat terutama petani sawit dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan industri sawit melalui mekanisme konsultasi dan dialog terbuka untuk berkontribusi pada kebijakan pembangunan dan strategi yang lebih inklusif;
- 2) Meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani sawit, serta memberikan akses ke informasi dan teknologi yang lebih baik, untuk meningkatkan kualitas produksi dan keinginan industri sawit melalui program pengembangan keterampilan dan pendidikan yang lebih fokus pada kebutuhan petani sawit;
- 3) Meningkatkan pengelolaan lahan yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengurangi deforestasi dan degradasi lahan, untuk memastikan keberlangsungan industri sawit dan kesejahteraan masyarakat sekitar;
- 4) Meningkatkan kemitraan yang setara antara petani sawit dan perusahaan, serta mengurangi praktik pungli di pabrik yang merugikan petani sawit, agar petani sawit mendapatkan harga penjualan yang wajar dan kesejahteraan yang lebih baik;
- 5) Meningkatkan kebijakan pengembangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam pengelolaan industri sawit, untuk memastikan kelangsungan industri sawit dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. **Aspek Ekonomi.**

- 1) Pengembangan Industri Hilir sampai produk akhir untuk meningkatkan nilai tambah.
- 2) Meningkatkan keterampilan dan pelatihan bagi petani kecil agar dapat meningkatkan kualitas produksi dan meningkatkan pendapatan petani.
- 3) Mendorong model kemitraan sebagai bentuk sinergi antara petani dan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produksi, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- 4) Meningkatkan investasi sektor lainnya seperti industri dan konsumsi melalui pola kemitraan yang akan menarik investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Meningkatkan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam industri sawit agar produktivitas dan pendapatan meningkat serta biaya produksi berkurang.
- 6) Memberikan dukungan kepada petani antara lain peremajaan atau penanaman kembali kebun kelapa sawit agar produktivitas perkebunan kelapa sawit khususnya di tingkat perkebunan rakyat meningkat.
- 7) Meningkatkan pengembangan ekonomi desa dengan mengintegrasikan usaha perkebunan kelapa sawit dengan industri pengolahannya agar dapat meningkatkan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

c. **Aspek Lingkungan.**

- 1) Meningkatkan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan melalui pengembangan varietas tanaman sawit yang lebih efisien dalam penggunaan pupuk, serta penggunaan alat-alat pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan.
- 2) Pengelolaan limbah yang efektif dan berkelanjutan. Diperlukan kerjasama antara Pemerintah dan industri untuk mengurangi limbah yang dihasilkan dan menggunakannya untuk bahan bakar atau bahan baku untuk produk lain.
- 3) Meningkatkan pengawasan terhadap industri sawit untuk memastikan bahwa industri beroperasi dengan cara yang berkelanjutan dan tidak membahayakan lingkungan. Hal ini dapat dilakukan melalui inspeksi dan pemantauan.
- 4) Meningkatkan kemitraan dan sinergi antara pemerintah, industri, dan masyarakat lokal dalam mewujudkan *political will* pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan industri sawit.

#### 14. Tantangan Membangun *Political Will* dalam Pengelolaan Industri Sawit

Dalam dunia politik kebijakan internasional mempengaruhi pengembangan industri sawit di Indonesia seperti **Pertama**, kebijakan Uni Eropa terhadap minyak sawit Indonesia telah menjadi tantangan bagi diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan *Renewable Energy Directive* (RED) Uni Eropa, misalnya, membatasi ekspor produk sawit dan dapat berdampak pada kinerja PDB negara, ekspor, neraca perdagangan, dan masalah ketenagakerjaan. **Kedua**, embargo, perpajakan dan perdagangan internasional dapat mempengaruhi kebijakan produksi penting di Indonesia. Industri kelapa sawit yang strategis di negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand tumbuh signifikan dan prospek pengembangan industri kelapa sawit saat ini sangat menjanjikan karena jumlah produksi kelapa sawit terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat. **Ketiga**, kebijakan diskriminatif dari luar negeri, seperti yang terjadi di Uni Eropa dapat menyebabkan terganggunya pasar minyak nabati dunia, termasuk di Indonesia. Dimana Uni Eropa mengadopsi *Delegated Regulation Renewable Energy Directive II* (RED II), yang mengklasifikasikan kelapa sawit sebagai komoditas bahan bakar nabati yang tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi *Indirect Land Use Change* (ILUC)<sup>89</sup>. Selain itu Uni Eropa mengeluarkan peraturan deforestasi Regulasi nomor 115 tahun 2023 yaitu *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Sebenarnya, Indonesia telah bernegosiasi dengan Uni Eropa tentang berbagai hal. Salah satu contohnya adalah persyaratan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), yang bahkan lebih luas daripada persyaratan EUDR<sup>90</sup>. Konflik antara Rusia dan Ukraina, misalnya, dapat menyebabkan kenaikan harga pasar global untuk minyak, gas dan gandum, yang dapat mempengaruhi biaya produksi dan harga produk sawit di Indonesia. Kenaikan harga ini menimbulkan industri sawit Indonesia lebih sulit untuk mempertahankan keberlangsungan dan kompetisinya di pasar global. **Keempat**, kebijakan

---

<sup>89</sup> Berita BDPKS, (2019) 10 Sikap Pemerintah atas Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit <https://www.bdp.or.id> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.00 wib

<sup>90</sup> Kompas, 25 Juni 2023 Diplomasi Sawit menghadapi Peraturan Deforestasi Uni Eropa <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/06/24/diplomasi-sawit-menghadapi-peraturan-deforestasi-uni-eropa> Diakses pada tanggal 28 Juni 2024 pukul 22.00 wib

insentif pajak dan pengembangan kawasan industri integrasi industri hilir sawit dengan fasilitas/jasa pelabuhan dapat membantu meningkatkan hilirisasi industri minyak sawit Indonesia. Hilirisasi minyak sawit tersebut mencakup kebijakan insentif pajak, pengembangan kawasan industri, integrasi industri sawit dengan fasilitas/jasa pelabuhan, kebijakan bea keluar dan pungutan ekspor, serta kebijakan mandatori biodiesel untuk substitusi solar import.

Kebijakan diskriminasi terhadap kelapa sawit yang diterapkan oleh Uni Eropa (UE) telah menjadi isu penting bagi Indonesia, salah satu produsen terbesar minyak kelapa sawit di dunia. UE, melalui kebijakan *Renewable Energy Directive II (RED II)* yang diadopsi pada 2018, menetapkan kelapa sawit sebagai komoditas dengan risiko tinggi terhadap deforestasi. Kebijakan ini berdampak langsung pada pembatasan penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel, yang rencananya akan dihapus secara bertahap hingga tahun 2030. Bagi Indonesia, kebijakan ini tidak hanya mengancam ekspor minyak kelapa sawit yang merupakan salah satu komoditas andalan, tetapi juga menciptakan hambatan perdagangan yang dianggap tidak adil dan diskriminatif. Pemerintah Indonesia memandang bahwa kebijakan tersebut tidak berdasar dan tidak memperhitungkan upaya yang telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan industri sawit, termasuk penerapan *Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)*.

Pada tahun 2019, Indonesia secara resmi mengajukan gugatan ke *World Trade Organization (WTO)* dengan nomor kasus DS593. Menurut Indonesia kebijakan UE tersebut melanggar ketentuan WTO yang seharusnya melindungi hak-hak negara anggota dalam melakukan perdagangan internasional secara adil. Indonesia juga berargumen bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk proteksionisme terselubung yang dirancang untuk melindungi minyak nabati lokal di UE dari persaingan minyak kelapa sawit. Proses gugatan ini berlangsung cukup lama, dengan sejumlah tantangan termasuk tidak berfungsinya *Appellate Body* di WTO yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian kasus. Meski demikian, pemerintah Indonesia tetap optimis bahwa mereka akan memenangkan kasus ini, dengan keyakinan bahwa kebijakan UE tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip

perdagangan internasional yang adil dan non-diskriminatif. Gugatan ini menjadi simbol dari perjuangan Indonesia di panggung internasional untuk melindungi kepentingan nasionalnya dan memastikan bahwa perdagangan global dilakukan berdasarkan aturan yang adil dan berimbang<sup>91</sup>.

Sebagaimana Undang-Undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu regulasi yang mengatur tentang perdagangan berjangka komoditi, termasuk sawit, dengan tujuan untuk menciptakan pasar yang transparan, adil, dan efisien. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan peran petani sawit dalam tata kelola kelapa sawit berkelanjutan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat pedesaan. Dalam upaya ini, pemerintah telah mendorong kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) sebagai amanah regulasi 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. Kebijakan ini membantu pemerintah untuk menyusun tata kelola industri kelapa sawit yang lebih baik, penerapan peraturan itu antara lain dengan melakukan pelatihan kepada pelaku sawit yang utamanya petani dalam menerapkan praktik sawit berkelanjutan. Pemerintah juga telah membentuk Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang bertujuan meningkatkan harga, memperkuat industri hilir, dan membangun komoditas kelapa sawit yang berkelanjutan.

Keterlibatan petani dalam pengelolaan perkebunan sawit mempengaruhi pengembangan industri sawit di Indonesia secara signifikan. Petani sawit memiliki peran strategis dalam industri sawit Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi. Para petani juga ikut mengawasi dan mengelola kebun sawit secara langsung, sehingga pengelolaan yang lebih baik dapat tercapai. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dimana, Undang-undang ini memberikan perlindungan hukum serta upaya pemberdayaan bagi para petani, termasuk

---

<sup>91</sup> <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/lawan-diskriminasi-kelapa-sawit-indonesia-gugat-uni-eropa-di-wto-3> Diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 22.00 wib

petani sawit. Pemerintah Indonesia telah berupaya meningkatkan peran petani sawit dalam pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Program seperti "Mendorong Keterlibatan Masyarakat Perdesaan Hasilkan Minyak Sawit Berkelanjutan" dan "Pemerintah Meningkatkan Peran Petani Dalam Produksi Sawit Berkelanjutan" telah diluncurkan untuk meningkatkan partisipasi petani dalam pengelolaan perkebunan sawit. Dalam program ini, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi sawit dan mengurangi biaya produksi, serta memastikan bahwa pengelolaan perkebunan sawit berkelanjutan. Selain itu, petani sawit juga berperan dalam meningkatkan pendapatan mereka sendiri. Dengan meningkatkan kualitas produksi sawit, petani dapat meningkatkan harga jual produk mereka dan meningkatkan pendapatan. Hal ini juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan yang bergantung pada industri sawit. Namun, masih ada beberapa tantangan yang dihadapi petani sawit dalam pengelolaan perkebunan sawit. Salah satu tantangannya adalah regulasi dan pembatasan akses ke teknologi dan sumber daya yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, petani, dan organisasi lainnya untuk meningkatkan keterlibatan petani dalam pengelolaan perkebunan sawit dan meningkatkan kualitas produksi sawit di Indonesia.

Begitu juga dengan pengembangan teknologi pada industri sawit contohnya, pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kelestarian perkebunan sawit memungkinkan industri sawit untuk meningkatkan produksi dan mengurangi biaya. Pengembangan teknologi pada industri sawit mempengaruhi pengembangan industri sawit di Indonesia secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi telah menjadi sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Teknologi digital, seperti yang diperkenalkan dalam penelitian "Strategi Implementasi Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Di Era Revolusi Industri 4.0", telah membantu memperkuat keinginan industri sawit dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Selain itu, teknologi *blockchain*, seperti yang diusulkan dalam "Teknologi *Blockchain* untuk Sektor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia", dapat membantu memastikan transparansi dan kelangsungan dalam rantai nilai minyak kelapa

sawit, yang sangat kompleks dan panjang. Pengembangan teknologi juga telah membantu meningkatkan daya saing industri sawit di Indonesia. Dengan penggunaan teknologi yang lebih modern dan efisien, perkebunan kelapa sawit dapat meningkatkan produksi dan mengurangi biaya operasional. Hal ini, pada gilirannya, dapat meningkatkan pendapatan petani dan perusahaan sawit, serta meningkatkan kontribusi industri sawit terhadap PDB Indonesia. Namun, pengembangan teknologi juga memiliki tantangan dan pemberdayaan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan lahan dan perubahan penggunaan lahan berbasis kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia telah menghasilkan sekitar 500 juta ton CO<sub>2</sub>e setiap tahun, menyumbang 1,4% dari emisi CO<sub>2</sub>e global<sup>92</sup>.

Upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hidup petani sawit dalam pengembangan industri sawit yang berkelanjutan dihadapkan dengan tantangan dalam membangun *political will* pengelolaan industri sawit, diantaranya:

- a. Indonesia masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit, hal ini dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksinya. Industri sawit di Indonesia masih menggunakan proses pengolahan yang relatif tradisional dan tidak mengalami perubahan signifikan dalam seratus tahun terakhir. Teknologi pengolahan produk turunan kelapa sawit di Indonesia dibandingkan dengan teknologi di negara lain memiliki beberapa perbedaan. Indonesia masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana dalam pengolahan produk turunan kelapa sawit, sedangkan negara Malaysia telah mengembangkan teknologi yang lebih modern dan kompleks untuk menghasilkan produk turunan yang lebih beragam dan berkualitas tinggi. Pada tahun 2023, Indonesia hanya berhasil menghasilkan 179 jenis produk turunan dari hilirisasi industri sawit, sementara Malaysia telah mengembangkan 260 jenis produk. Perbandingan ini menunjukkan

---

<sup>92</sup> Inemesit Ukpanah (2024) Apakah Minyak Sawit Buruk Bagi Lingkungan? Statistik, Tren, Fakta & Kutipan <https://www.greenmatch.co.uk/is-palm-oil-harming-the-environment> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.35 wib

bahwa Malaysia telah lebih maju dalam memanfaatkan industri sawit untuk menciptakan produk-produk bernilai tambah. Oleh karena itu, Indonesia harus memperkuat upaya dalam inovasi dan diversifikasi produk turunan dari industri sawit untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi<sup>93</sup>.

b. Sumber daya manusia di Indonesia masih belum memadai, terutama dalam hal keahlian yang ada di industri kelapa sawit. Indonesia masih memiliki sedikit jumlah ahli yang khusus dalam bidang kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Februari 2023, mayoritas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi dari lulusan Sekolah Dasar (SD) yang mencapai 39,76%<sup>94</sup>. Beberapa fakta dan analisis yang dilakukan oleh berbagai sumber, antara lain:

- 1) Krisis SDM. Sektor pertanian kelapa sawit di Indonesia dilanda krisis SDM, hal ini dapat berakibat petani kelapa sawit terancam krisis regenerasi karena minat petani milenial di bidang kelapa sawit semakin rendah<sup>95</sup>.
- 2) Keterbatasan Tenaga Kerja. Indonesia memiliki 16,8 juta hektare (ha)<sup>96</sup>, perkebunan kelapa sawit, namun masih mengalami keterbatasan tenaga kerja terampil untuk mengelola kebun, pabrik, serta logistik kelapa sawit<sup>97</sup>.
- 3) Penggunaan Tenaga Asing. Masih terdapat perusahaan kelapa sawit di Indonesia menggunakan tenaga asing, padahal peluang yang lahir dari industri kelapa sawit sangat besar<sup>98</sup>.

<sup>93</sup> Martyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia "RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?" <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.55 wib

<sup>94</sup> Widya Finola Ifani Putri (2023) CNBC Indonesia, "Data: Pekerja di Indonesia Mayoritas Lulusan SD" <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib

<sup>95</sup> Denny Susanto Ainan (3023) Sektor Pertanian Kelapa Sawit Dilanda Krisis SDM <https://mediaindonesia.com> Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 20.15 wib

<sup>96</sup> Databoks (2024) Luas Perkebunan Sawit Indonesia Tumbuh 56% dalam Sedekade <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/06/luas-perkebunan-sawit-indonesia-tumbuh-56-dalam-sedekade> Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 20.20 wib

<sup>97</sup> Kurnia Endri Susilo (2020) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pelaksana Pabrik Kelapa Sawit <https://repositori.uma.ac.id> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib

<sup>98</sup> Jamaludin Zainal Abidin (2023) Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional <https://journal-iasssf.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib



- 4) Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur. Indonesia perlu fokus dan berinvestasi dalam peningkatan teknologi dan infrastruktur, khususnya pengembangan biodiesel, untuk meningkatkan daya saing industri sawit Indonesia<sup>99</sup>.
  - 5) Kualitas SDM. Kualitas SDM mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan di industri kelapa sawit. Karyawan yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan kerja yang baik dapat bekerja secara efisien dan efektif<sup>100</sup>.
- c. Pengembangan kegiatan hilir kelapa sawit yang masih terbatas dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan nilai tambah dan menghadapi persaingan global. Indonesia masih sangat bergantung pada pasar minyak sawit dunia, sehingga nilai tambah produk hilir sawit dapat dinikmati oleh negara-negara importir. Hilirisasi sawit di dalam negeri dapat mengurangi ketergantungan ini dan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Pengembangan proses hilirisasi industri kelapa sawit di dalam negeri masih membutuhkan peningkatan. Menurut Ketua Dewan Pembina DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Moeldoko, dalam sebuah Dialog Khusus pada tanggal 16 November 2023 di Jakarta, tingkat hilirisasi industri kelapa sawit di Indonesia baru mencapai 20-30% dari potensi yang ada<sup>101</sup>. Hilirisasi industri kelapa sawit merujuk pada pengolahan minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) menjadi produk bernilai tambah tinggi, baik untuk ekspor maupun substitusi produk impor. Ada tiga kategori produk hilir kelapa sawit yang signifikan: oleo pangan, oleokimia, dan biofuel. Oleo pangan meliputi produk konsumsi manusia seperti minyak goreng dan margarin. Sementara itu, oleokimia mencakup produk kimia seperti *surfaktan*, sabun, dan *biolubrikan* yang dihasilkan dari minyak kelapa sawit. Kemudian, biofuel mencakup bahan

<sup>99</sup> Berita BDPKKS, (2019) 10 Sikap Pemerintah atas Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit <https://www.bdp.or.id>

<sup>100</sup> Berita Sawit BDPKKS (2022) SDM Hingga Teknologi, Kendala Hilirisasi Sawit RI <https://www.bdp.or.id> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.34 wib

<sup>101</sup> SawitKita (2023) "Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Masih di Level Medium" <https://sawitkita.id> Diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 22.00 wib

bakar nabati seperti biodiesel yang dapat dihasilkan dari kelapa sawit. Salah satu potensi besar untuk pengembangan di Indonesia adalah industri oleokimia. Oleokimia menghasilkan bahan baku untuk berbagai produk sehari-hari seperti kosmetik, farmasi, dan pertanian yang dapat membantu mengurangi ketergantungan pada impor produk turunan minyak bumi yaitu *Surfaktan*, *Emolien*, *Emulsifier*, Zat aktif lainnya untuk berbagai produk seperti deterjen, kosmetik, dan obat-obatan. Selain itu Oleokimia dari olahan sawit memiliki dampak positif bagi lingkungan karena produknya lebih ramah lingkungan dan dapat terurai secara alami.

- d. Keterbatasan kebijakan pemerintah dalam mengatur industri sawit dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Keterbatasan kebijakan pemerintah dalam mengatur industri sawit di Indonesia, seperti pada kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada tahun 2023, antara lain kebijakan pemerintah seringkali didominasi oleh paradigma kekuasaan, yang dapat mengarah pada penyelesaian masalah yang tidak relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi, seperti penghentian ekspor CPO yang mengakibatkan berkurangnya devisa dan penerimaan negara. 12% dari total ekspor non migas nasional berasal dari pengapalan CPO, hal ini dapat berimbas kepada pelemahan nilai tukar rupiah. Pemberlakuan penghentian ekspor dalam waktu singkat tidak akan menurunkan harga minyak goreng dikarenakan harga patokan minyak goreng CPO saat itu masih tinggi, dengan demikian minyak goreng yang masih menggunakan mekanisme pasar akan semakin mahal.
- e. Keterbatasan investasi dalam teknologi dan infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, seperti:

- 1) Keterbatasan investasi dalam teknologi dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi. Misalnya, kurangnya infrastruktur teknologi yang memadai dapat menyebabkan proses produksi yang lebih lambat dan rentan terhadap kesalahan, sehingga mengurangi efisiensi dan kualitas produk. Selain itu, kurangnya investasi dalam informasi teknologi dapat menghambat kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kapabilitas inovasi, seperti meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.
  - 2) Keterbatasan investasi dalam teknologi dan infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Petani yang tidak memiliki akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai dapat mengalami kesulitan dalam mengelola lahan, mengumpulkan data, dan mengelola rantai pasokan, sehingga mengurangi kapasitas produksi dan daya saing. Dalam sintesisnya, keterbatasan investasi dalam teknologi dan infrastruktur dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dan petani dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan investasi dalam teknologi dan infrastruktur, seperti peningkatan investasi dalam infrastruktur teknologi, penyediaan perangkat dan perangkat lunak yang diperlukan<sup>102</sup>.
- f. Keterbatasan manajemen dalam pengelolaan industri sawit dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Oleh karena itu untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, industri sawit harus meningkatkan teknologi, infrastruktur dan sistem sertifikasi berkelanjutan serta meningkatkan pengelolaan lingkungan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keterbatasan manajemen dalam industri sawit, antara lain:

---

<sup>102</sup> Kominfo (2015) Keterbatasan Infrastruktur Menghambat Realisasi Investasi  
<https://serumpun.babelprov.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 22.15 wib

- 1) Keterbatasan Teknologi dan Inovasi. Industri sawit di Indonesia masih bergantung pada teknologi yang relatif tua dan tidak efisien. Malaysia misalnya, memiliki teknologi yang lebih modern dan efisien dalam pengelolaan lahan sawit, yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi<sup>103</sup>.
- 2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia. Petani sawit kecil di Indonesia memiliki produktivitas yang rendah, sekitar 2-3 ton/ha/thn, karena tidak memiliki akses ke teknologi dan sumber daya yang lebih baik. Perlu usaha keras untuk meningkatkan produktivitas petani sawit<sup>104</sup>.
- 3) Keterbatasan Infrastruktur. Indonesia memiliki infrastruktur yang kurang baik, seperti jalan dan jembatan, yang dapat menghambat pengembangan industri sawit. Pemerintah harus meningkatkan investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pengembangan industri sawit yang lebih efisien<sup>105</sup>.
- 4) Keterbatasan Sistem Sertifikasi Berkelanjutan. Industri sawit di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam penerapan sistem sertifikasi berkelanjutan seperti ISPO dan RSPO. Komitmen perusahaan untuk berkelanjutan harus diperteguh dengan kesepakatan yang mengikat para pihak<sup>106</sup>.
- 5) Keterbatasan Pengelolaan Lingkungan. Industri sawit di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam pengelolaan lingkungan, seperti perluasan lahan yang dapat menyebabkan deforestasi. Pemerintah harus meningkatkan upaya pengelolaan lingkungan dan mendorong industri sawit untuk menggunakan teknologi yang lebih ramah lingkungan<sup>107</sup>.

<sup>103</sup> Ridzki R. Sigit (2015) Produktivitas Lahan Sawit dan Kebijakan Moratorium Hutan, Apakah Saling Sinergi? <https://www.mongabay.co.id/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 wib

<sup>104</sup> Sawit Berkelanjutan (2015) 4th Generation of R&D dan Arah Riset Budidaya Kelapa Sawit <https://www.bpdp.or.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 22.55 wib

<sup>105</sup> Tungkot Sipayung (2024) 17 Isu Sawit Dalam Tata Kelola Dan KebijakaN (2024) <https://palmoilina.asia> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 20.55 wib

<sup>106</sup> Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thohari (2014) Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit <https://media.neliti.com> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 21.25 wib

<sup>107</sup> Riana Septiani, Mujiyanto (2017) Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan Ancaman Pada Strategi Pemasaran Minyak Kelapa Sawit <https://dx.doi.org/10.37090/indstrk.v1i2.13> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 22.00 wib

- g. Keamanan berusaha dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Gangguan keamanan yang sering terjadi berupa aksi pencurian, penjarahan, perusakan sarana prasarana dan pembakaran lahan, konflik dengan warga menjadi hambatan dalam menjaga keberlanjutan perkembangan industri sawit.
- h. Keterbatasan kemitraan antara perusahaan dan petani dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing. Kemitraan yang efektif antara perusahaan dan petani sawit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit. Keterbatasan kemitraan dapat berupa kurangnya dukungan teknis dan finansial dari perusahaan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi petani dalam program-program peremajaan dan pemberdayaan. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan industri sawit seperti:
- 1) Kurangnya dukungan teknis sehingga petani tidak mendapatkan akses ke teknologi dan bahan-bahan yang lebih baik dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit.
  - 2) Kurangnya dukungan dimana petani tidak mendapatkan akses ke bantuan finansial yang diperlukan untuk membiayai peremajaan dan pengembangan kebun sawit dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit.
  - 3) Kurangnya kesadaran dan partisipasi petani secara aktif dalam program-program peremajaan dan pemberdayaan sawit.
  - 4) Kurangnya akses ke pasar yang lebih luas untuk menjual hasil panen petani;
  - 5) Kurangnya koordinasi yang baik antara perusahaan dan petani dalam mengelola kegiatan peremajaan dan pengembangan kebun sawit<sup>108</sup>.

---

<sup>108</sup> Muhammad Akmal Agustira Dan Rizki Amelia (2012) Jurnal Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit "Kendala Peningkatan Produktivitas Pada Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Indonesia" <https://Pis.lopri.Co.Id> Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 22.15 wib

- i. Keterbatasan kebijakan kewajiban Fasilitas Pengembangan Kebun Masyarakat (FPKM) dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, diantaranya:
- 1) Kebijakan kewajiban FPKM yang tidak efektif dapat mengganggu stabilitas harga sawit, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit untuk meningkatkan daya saing nasional.
  - 2) Kebijakan yang tidak konsisten dapat menghambat kemampuan industri sawit untuk mengembangkan infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Ketiga, kebijakan yang tidak memperhatikan kepentingan petani sawit dapat mengganggu kemampuan petani untuk mengimplementasikan ISPO di perkebunan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kemampuan industri sawit untuk meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan daya saing<sup>109</sup>.
- j. Keterbatasan kebijakan penghentian ekspor minyak kelapa sawit yang mempengaruhi kemampuan industri sawit dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produksi, serta mempengaruhi kemampuan petani dalam meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, seperti:
- 1) Indonesia dapat kehilangan devisa sebesar Rp 43 triliun yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan Negara
  - 2) Penghentian ekspor CPO dapat merugikan petani kecil yang tidak memiliki fasilitas penyimpanan yang lebih baik, sehingga mereka tidak dapat menyimpan hasil produksi mereka.
  - 3) Pengusaha CPO kelas menengah ke bawah tidak dapat menyimpan hasil produksi karena keterbatasan alat.
  - 4) Menimbulkan kerugian nilai ekonomi yang signifikan, hingga mencapai 60% pasar ekspor komoditas tersebut hilang.

---

<sup>109</sup> Majalahhortus (2021) "Permentan 18/2021 Mempermudah Pola Kemitraan di Perkebunan Sawit" <https://news.majalahhortus.com> Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 23.00 wib

- 5) Larangan ekspor CPO dapat menjangkau pasokan minyak di pasar dunia, yang dapat berdampak pada efek domino kenaikan harga sejumlah kebutuhan dunia dan akhirnya berdampak pada inflasi global<sup>110</sup>.

Terhadap tantangan tersebut diatas, berikut akan dianalisis melalui penerapan Teori Keunggulan Absolut yang dikemukakan oleh Adam Smith, menyatakan bahwa suatu negara harus mengkhususkan diri dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, atau kemampuan memproduksi barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Teori ini menyoroti pentingnya mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya unik suatu negara untuk mencapai manfaat ekonomi. Dalam konteks minyak sawit, keunggulan absolut ini dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Hal ini mencakup fokus pada produksi produk minyak sawit berkualitas tinggi, seperti minyak sawit olahan dan minyak inti sawit, yang memiliki permintaan tinggi secara global. Dengan mengkhususkan diri pada produk-produk ini, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya di pasar global dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, melihat potensi industri sawit yang dimiliki, Indonesia dapat menjadi Negara yang memiliki kedaulatan dalam pengelolaan industri sawit dengan cara pemerintah mengkhususkan perhatiannya terhadap industri kelapa sawit sebagai produk unggulan utama nasional melalui membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit.

Untuk membangun *political will* dalam pengelolaan industri minyak sawit, Teori Keunggulan Absolut dapat diterapkan untuk memahami keunggulan kompetitif negara dalam memproduksi minyak kelapa sawit. Negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang-barang yang memiliki keunggulan komparatif, yaitu kemampuan untuk memproduksi suatu barang dengan biaya peluang yang lebih rendah dibandingkan negara lain. Melalui pendekatan ini,

---

<sup>110</sup> Shandra Ziva Hendrian (2023) Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume 9 (4) "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Minyak Kelapa Sawit di Indonesia selama Pandemi" <https://journal.lembagakita.org> Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 21.00 wib

untuk membangun *political will* pengelolaan industri kelapa sawit, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Identifikasi Keunggulan Komparatif, negara menentukan keunggulan komparatif dengan menganalisis faktor-faktor pengelolaan industri kelapa sawit seperti ketersediaan lahan, iklim, biaya tenaga kerja dan teknologi. Strategi yang dapat dilakukan untuk identifikasi keunggulan komparatif dalam membangun *political will* dalam pengelolaan industri kelapa sawit, antara lain:

- 1) Identifikasi Lahan Potensial. Pemerintah berfokus melakukan pemetaan dan identifikasi lahan yang sesuai untuk budidaya kelapa sawit, termasuk analisis tanah, iklim, dan topografi.
- 2) Pengembangan fasilitas dan Infrastruktur. Pemerintah harus meningkatkan fasilitas bagi perusahaan dalam berinvestasi dan meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas pengolahan untuk memastikan distribusi dan pengolahan yang efisien. Pembangunan infrastruktur di sektor hulu meliputi pembangunan jalan beraspal hingga perbatasan kebun dan fasilitas pendukung lainnya untuk menjaga kualitas buah hingga ke pabrik pengolahan. Infrastruktur pelabuhan di sentra produksi minyak sawit yang dilengkapi tangki timbun, instalasi pemompaan dan terminal khusus kapal tanker untuk memastikan kelancaran bongkar muat.
- 3) Pengembangan Jaringan. Pemerintah harus membangun jaringan yang kuat dengan para pengelola industri kelapa sawit, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pengelolaan industri, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan industri yang berkelanjutan. Diperlukan adanya lembaga yang bertanggung jawab dalam perizinan, pelayanan jasa, promosi, penelitian dan pengembangan industri sawit yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.



- 4) Strategi Pengembangan. Pemerintah harus mengembangkan strategi yang jelas dan efektif untuk meningkatkan produksi industri kelapa sawit yang didasarkan pada analisis yang akurat dan data yang dapat diandalkan, serta harus mempertimbangkan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi. Diperlukan adanya database sawit yang komprehensif dalam pengelolaan industri sawit.
  - 5) Pengembangan Sumber Daya. Pemerintah harus meningkatkan sumber daya yang tersedia untuk pengelolaan industri kelapa sawit, seperti dana, infrastruktur, dan teknologi. Diperlukan peran pemerintah untuk mendorong investasi dalam pengembangan industri kelapa sawit melalui insentif pajak dan kemudahan izin usaha.
  - 6) Pengembangan Keterlibatan Masyarakat. Pemerintah harus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan industri kelapa sawit melalui program edukasi, konsultasi, dan partisipasi. Diperlukan peran pemerintah untuk menyediakan program pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja di sektor kelapa sawit, termasuk pengetahuan tentang praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi modern.
- b. Pemerintah mengkhususkan diri pada produksi minyak sawit melalui kebijakan yang mendukung pengembangan industri, seperti insentif pajak, subsidi dan program pelatihan bagi petani dan pekerja, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain :
- 1) Insentif Pajak. Menetapkan tarif keluar yang lebih rendah untuk minyak sawit, sehingga harga bahan baku menjadi lebih murah dan meningkatkan efisiensi produksi dengan mengacu pada harga referensi internasional berdasarkan CIF NYBOT (*New York Board Of Trade*)<sup>111</sup>.

---

<sup>111</sup> Anggi Prayoga Simanjuntak, Ira Apriyanti, Buhari Sibuea, Hardiansyah Sinaga (2021) Analisis Keunggulan Komparatif Ekspor (Crude Palm Oil) Cpo Indonesia Di Pasar Nternasional <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

- 2) Subsidi. Pemberian subsidi kepada petani dan pekerja yang terlibat dalam industri minyak sawit, contoh penerapannya dapat diaplikasikan pada program Strategi Nasional tentang Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2022<sup>112</sup>. Subsidi ini sangat diperlukan dalam peremajaan sawit yang memerlukan biaya yang besar dan butuh waktu lama sampai menunggu tanaman mendatangkan hasil kembali.
  - 3) Program Pelatihan. Meningkatkan keterampilan dan pelatihan bagi petani kecil dan pekerja di industri minyak sawit untuk meningkatkan efisiensi produksi dan meningkatkan nilai tambah industri.
  - 4) Kemitraan. Mendorong model kemitraan antara petani dan perusahaan. Kemitraan yang sinergis antara petani dan perusahaan dalam prinsip keterbukaan dan tata kelola manajemen akan tercipta hubungan yang harmonis. Hal ini merupakan kunci dasar kekuatan dalam peningkatan daya saing.
  - 5) Kebijakan Moneter dan Keuangan. Menerapkan kebijakan moneter dan keuangan yang mendukung pertumbuhan industri minyak sawit yang dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkesinambungan. Diperlukan peran pemerintah untuk memberikan dukungan sepenuhnya terhadap pendanaan berbagai kegiatan penelitian yang diarahkan untuk nilai tambah dari produk industri hilir dalam pengembangan industri kelapa sawit.
- c. Mengatasi masalah lingkungan yang terkait dengan produksi minyak sawit, seperti penggundulan hutan dan perusakan habitat dengan menerapkan praktik-praktik berkelanjutan, seperti *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) dan program reboisasi yang dapat membantu menjaga keseimbangan ekologi namun tetap memungkinkan pertumbuhan

---

<sup>112</sup> Siaran Pers Kemenko Perekonomian (20 Oktober 2022) Pemerintah Terus Dorong Industri Sawit Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir <https://ekon.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

ekonomi. Salah satu contoh praktik berkelanjutan adalah sertifikasi CSPO yang diterapkan oleh *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO). RSPO adalah badan nirlaba yang mengembangkan, memproduksi dan menggunakan minyak sawit dengan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat. Sertifikasi ini memastikan bahwa produsen minyak sawit mematuhi delapan prinsip, yaitu komitmen terhadap transparansi, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, Komitmen Terhadap Kelestarian Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati, Penggunaan Teknik Produksi yang Meminimalkan Dampak Lingkungan, Tanggung Jawab Terhadap Pekerja dan Komunitas Lokal, Pengelolaan yang Bertanggung Jawab, Peningkatan Berkelanjutan dan Komitmen Terhadap Konsultasi dan Partisipasi.

- d. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kelapa sawit dengan menerapkan peraturan yang menjamin praktik ketenagakerjaan yang adil, perlindungan lingkungan, dan tanggung jawab sosial dengan membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan meningkatkan *political will* dalam pengelolaan industri. Beberapa langkah yang dapat diambil:
- 1) Peningkatan Transparansi. Peningkatan transparansi dalam industri kelapa sawit dapat dilakukan dengan memberikan akses ke data pendapatan dan biaya skema kemitraan kepada masyarakat sehingga dapat membantu masyarakat untuk memahami kemitraan usaha dan keuntungan yang diperoleh.
  - 2) Prinsip Transparansi dalam Sertifikat ISPO. Pemerintah Indonesia telah menambahkan prinsip transparansi dalam sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO). Prinsip ini mencakup ketelusuran untuk meningkatkan kepercayaan terhadap ISPO dan memperbaiki data sawit Indonesia.
  - 3) Tata Kelola yang Baik. Tata kelola yang baik dapat ditingkatkan dengan mengurangi dominasi industri oleh pengusaha besar dan meningkatkan peran petani sawit, seperti meningkatkan pelatihan pengelolaan perkebunan untuk petani plasma dan memastikan

masyarakat memiliki akses ke informasi dasar tentang skema kemitraan. Diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan usaha melalui konsolidasi dan penggabungan usaha-usaha kecil perkebunan rakyat yang dikelola oleh lembaga sawit untuk meningkatkan efisiensi skala usaha perkebunan dan mengurangi biaya produksi.

- 4) Kebijakan yang Adil. Kebijakan yang adil dapat ditingkatkan dengan tidak membedakan perlindungan lingkungan dan sosial antara kelapa sawit dan komoditas lain. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak diskriminatif dan memenuhi standar internasional. Diperlukan regulasi yang memastikan dalam memerankan kebijakan industri kelapa sawit dengan mengawasi, mengendalikan, dan mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan tata kelola industri, aksesibilitas petani, dan nilai tambah industri.
- 5) Meningkatkan *political will*. Meningkatkan *political will* dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan para pemangku kepentingan tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam industri kelapa sawit.

e. Membina kerjasama internasional antar negara atau wilayah yang mempunyai keunggulan komparatif dalam produksi minyak sawit melalui perjanjian yang mendorong perkembangan industri, berbagi praktik terbaik, dan mengatasi tantangan bersama. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Kerjasama Ekonomi Regional. Integrasi ekonomi ASEAN pada tahun 2015 telah membuka kesempatan yang lebih luas bagi negara-negara untuk berbagi praktik terbaik dan mengembangkan industri secara bersama. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan kompetitivitas industri minyak sawit di wilayah ASEAN.
- 2) Koordinasi Kebijakan. Pemerintah Indonesia dan Malaysia telah berupaya memperkuat kerja sama dalam mengatasi diskriminasi terhadap industri kelapa sawit. Mereka sepakat untuk terus

melindungi sektor ini dengan memperkuat upaya dan kerja sama dalam mengatasi diskriminasi, serta memanfaatkan keterlibatan dengan pengimpor utama negara-negara melalui kebijakan dialog.

- 3) Pengembangan Riset dan Inovasi. Kerja sama dalam pengembangan riset dan inovasi kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas petani kecil dan kompetitivitas produk. Pemerintah perlu menitikberatkan kepada penelitian dan pengembangan untuk memperoleh benih unggul melalui pengembangan kultur jaringan, penerapan sistem kultur teknis yang baik dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit.
- 4) Pengembangan Industri Menuju Produksi Bernilai Tambah. Pembangunan kerja sama industri menuju produksi bernilai tambah dapat meningkatkan nilai terhadap tambah produk ekspor. Contoh, Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program B35 untuk mendorong perkembangan industri minyak sawit melalui berbagai kebijakan<sup>113</sup>.

## 15. Strategi Pengelolaan Industri Sawit untuk Mendukung Ekonomi Hijau

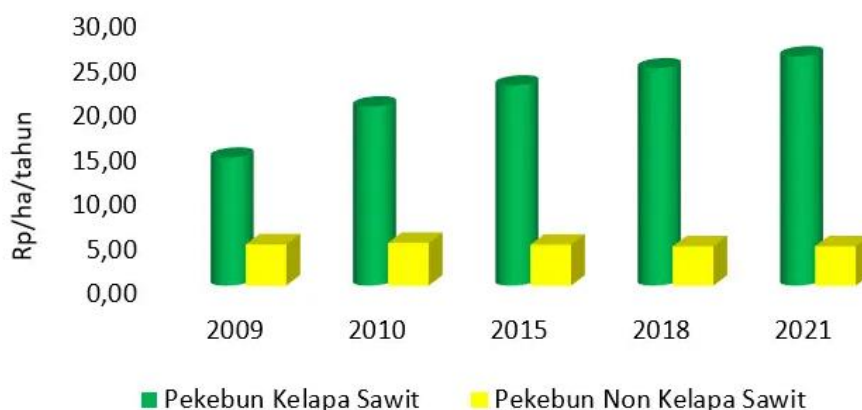
Industri sawit telah menjadi salah satu sektor ekonomi utama di banyak negara tropis, terutama di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pertumbuhan industri ini berkaitan erat dengan peningkatan produksi minyak kelapa sawit (palm oil) yang memiliki beragam aplikasi dalam industri makanan, kosmetik, dan bioenergi. Industri makanan, minyak kelapa sawit banyak digunakan dalam industri makanan sebagai bahan baku untuk pembuatan makanan olahan, seperti margarin, minyak goreng, kue, dan makanan ringan. Sifatnya yang tahan panas dan stabil membuatnya menjadi pilihan yang populer dalam proses penggorengan dan pembuatan produk makanan. Dalam industri kosmetik, minyak kelapa sawit juga merupakan komponen umum dalam produk-produk kosmetik dan perawatan pribadi, termasuk sabun, sampo, lipstik, dan krim. Kandungan lemaknya yang tinggi memberikan tekstur yang

---

<sup>113</sup> Siaran Pers Kemenko Perkonomian (Jakarta, 9 Februari 2023) Bahas Pengembangan Industri Sawit dengan Malaysia, Menko Airlangga Perkuat Upaya dan Kerja Sama Atasi Diskriminasi <https://www.ekon.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.25 wib

lembut dan konsistensi yang stabil pada produk-produk kosmetik. Sedangkan untuk bioenergi, minyak kelapa sawit juga digunakan dalam produksi bioenergi sebagai bahan baku untuk biodiesel. Dalam upaya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mengurangi emisi gas rumah kaca, minyak kelapa sawit menjadi alternatif yang menarik sebagai sumber energi terbarukan.

Industri sawit telah memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tempat produksinya. Dalam pertumbuhan ekonomi, industri sawit memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara produsen, terutama di Asia Tenggara dan Amerika Latin. Pendapatan dari ekspor minyak kelapa sawit menjadi sumber utama devisa bagi banyak negara produsen, yang kemudian digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, layanan publik dan program-program pembangunan lainnya. Industri sawit juga memberikan dampak positif dengan menciptakan lapangan kerja bagi jutaan orang di seluruh rantai pasokan, termasuk petani, buruh perkebunan, pekerja pabrik pengolahan dan tenaga kerja di sektor-sektor pendukung lainnya seperti transportasi dan perdagangan. Penciptaan lapangan kerja ini memberikan kesempatan ekonomi bagi masyarakat lokal termasuk mereka yang tinggal di daerah pedesaan yang seringkali kurang memiliki kesempatan kerja. Selain itu, melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian pendapatan kepada petani dan pekerja perkebunan, industri sawit telah berperan dalam pengentasan kemiskinan di wilayah-wilayah tempat produksinya. Pendapatan yang diperoleh dari industri sawit dapat meningkatkan akses masyarakat lokal terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan infrastruktur dasar lainnya, serta meningkatkan standar hidup mereka secara keseluruhan.



Gambar 10. Perbandingan Indeks Pendapatan Petani Sawit dan Petani Non Sawit (Sumber: data diolah PASPI, 2022)<sup>114</sup>

Dalam konteks perubahan iklim global, kebutuhan akan pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan semakin mendesak. Industri sawit, khususnya dalam proses konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit baru, dapat menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan, terutama dari deforestasi dan pembakaran lahan. Emisi ini berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim yang semakin intensif. Oleh karena itu, pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan dapat menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Praktik-praktik seperti konservasi lahan basah, rehabilitasi lahan yang terdegradasi, pengelolaan limbah yang efisien, dan penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Konsep ekonomi hijau menjadi relevan dalam mengarahkan arah pengembangan industri ini menuju praktek yang lebih ramah lingkungan dan sosial. Pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan tidak hanya akan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memiliki potensi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Dengan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengelolaan industri sawit dapat berkontribusi pada ekonomi hijau, merujuk Teori Birokrasi oleh Max Weber, berperan penting dalam memahami pengelolaan industri

<sup>114</sup> Tungkot Sipayung (2024) 21 Isu Industri Sawit Dalam Isu Ekonomi <https://Palmoilina.Asia/Sawit-hub/sawit-dalam-isu-ekonomi/#311> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.45 wib

kelapa sawit. Dengan mengadopsi sistem yang terstruktur dan terorganisir, menerapkan praktik manajemen yang efisien dan efektif serta mengadopsi pendekatan berbasis aturan dalam pengambilan keputusan, industri dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas yang dapat membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan dan berkontribusi terhadap pengelolaan industri kelapa sawit. Konsep ini dapat diterapkan pada industri kelapa sawit dengan mengkaji bagaimana struktur dan proses birokrasi berkontribusi terhadap pengelolaan industri kelapa sawit di antara para pemangku kepentingan, yaitu:

**a. Struktur Birokrasi**

Dalam konteks industri kelapa sawit, struktur birokrasi sangat penting untuk memastikan pengelolaan industri kelapa sawit yang efektif. Struktur birokrasi memainkan peran penting dalam pengelolaan industri kelapa sawit yang efektif. Dalam konteks pengelolaan industri kelapa sawit, struktur birokrasi yang efektif dapat membantu dalam mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan industri ini. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memastikan bahwa setiap bagian dari struktur birokrasi memiliki peran yang jelas dan dapat berfungsi secara efektif untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dalam Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD-KSB) Kabupaten Sintang periode 2018-2023, misalnya, struktur birokrasi yang efektif digunakan untuk mengkoordinasikan berbagai kebijakan dan program yang terkait dengan pengelolaan industri kelapa sawit. Kebijakan-kebijakan ini meliputi pengembangan jaringan komunikasi antara pihak-pihak terkait, peningkatan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan perbaikan penanganan hasil TBS, serta diversifikasi komoditas maupun integrasi peternakan di perkebunan kelapa sawit<sup>115</sup>.

Selain itu, struktur birokrasi yang efektif juga dapat membantu dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan yang terkait

---

<sup>115</sup> Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020 - 2024 <https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 21.35 wib



dengan industri kelapa sawit, seperti petani, perusahaan, serta pemerintah pusat dan daerah. Struktur birokrasi yang efektif dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan industri kelapa sawit dan memastikan bahwa industri ini berjalan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas, rantai komando yang jelas dan sistem aturan dan regulasi. Penerapan struktur seperti ini membantu menumbuhkan rasa akuntabilitas dan tanggung jawab di antara para pemangku kepentingan, yang sangat penting bagi pengembangan kemauan politik.

b. **Efisiensi dan Efektivitas**

Teori Birokrasi Weber menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi. Dalam industri kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan industri kelapa sawit sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya dan memastikan keberlanjutan lingkungan. Beberapa alasan mengapa efisiensi dan efektivitas sangat diperlukan dalam industri kelapa sawit: Pertama, efisiensi teknis dan biaya dalam pengelolaan industri kelapa sawit dapat meningkatkan produktivitas, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan petani dan industri secara keseluruhan. Kedua, penggunaan sumber daya secara efisien dapat mengurangi biaya produksi, sehingga meningkatkan keuntungan industri dan petani. Ketiga, pengelolaan industri kelapa sawit yang efektif dan efisien dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan degradasi lahan. Keempat, efisiensi dalam pengelolaan industri kelapa sawit dapat meningkatkan kualitas produk, seperti minyak sawit, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan pendapatan industri. Pengelolaan industri kelapa sawit yang efisien dan efektif berarti struktur birokrasi harus dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meminimalkan pemborosan dan memaksimalkan produktivitas<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> Fildza Arief Syuhada, Hasnah, Rusda Khairati (2022) Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis "Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Kelapa Sawit" <https://doi.org/10.21776> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

### c. Pengambilan Keputusan Berbasis Aturan

Teori Weber juga menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis aturan dalam sistem birokrasi. Dalam industri kelapa sawit, pengambilan keputusan berdasarkan aturan dalam sistem birokrasi dapat menjamin efisiensi dan transparansi. Beberapa alasan mengapa aturan berdasarkan keputusan diperlukan dalam pengelolaan industri kelapa sawit: **Pertama**, kepuasan konsumen dan reputasi industri harus dipastikan bahwa produk kelapa sawit yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. **Kedua**, memastikan bahwa industri kelapa sawit memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan. Pengawasan kualitas lingkungan sangat penting karena industri kelapa sawit dapat memberikan dampak negatif pada lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. **Ketiga**, membantu memastikan bahwa operasional industri kelapa sawit berjalan dengan efisien seperti biaya operasional dapat dikurangi dan produktivitas dapat ditingkatkan. **Keempat**, memastikan keputusan bahwa semua proses pengelolaan industri kelapa sawit transparan dan dapat diawasi. Transparansi sangat penting karena memastikan bahwa semua keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan dapat dipantau. Dengan menerapkan pendekatan berbasis aturan dalam pengambilan keputusan, industri sawit dapat menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas, yang dapat membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan<sup>117</sup>.

### d. Implikasinya bagi Industri Minyak Sawit

Penerapan Teori Birokrasi Weber pada pengelolaan industri kelapa sawit mempunyai beberapa implikasi yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek seperti keberlanjutan, inovasi teknologi, keterlibatan stakeholder, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan regulasi. **Pertama**, Industri minyak sawit seringkali dikaitkan dengan deforestasi, kehilangan habitat satwa liar,

---

<sup>117</sup> Tungkot Sipayung (2024) Jurnal "Bagaimana Proses Pengolahan Kelapa Sawit" <https://palmoilina.asia> Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 wib

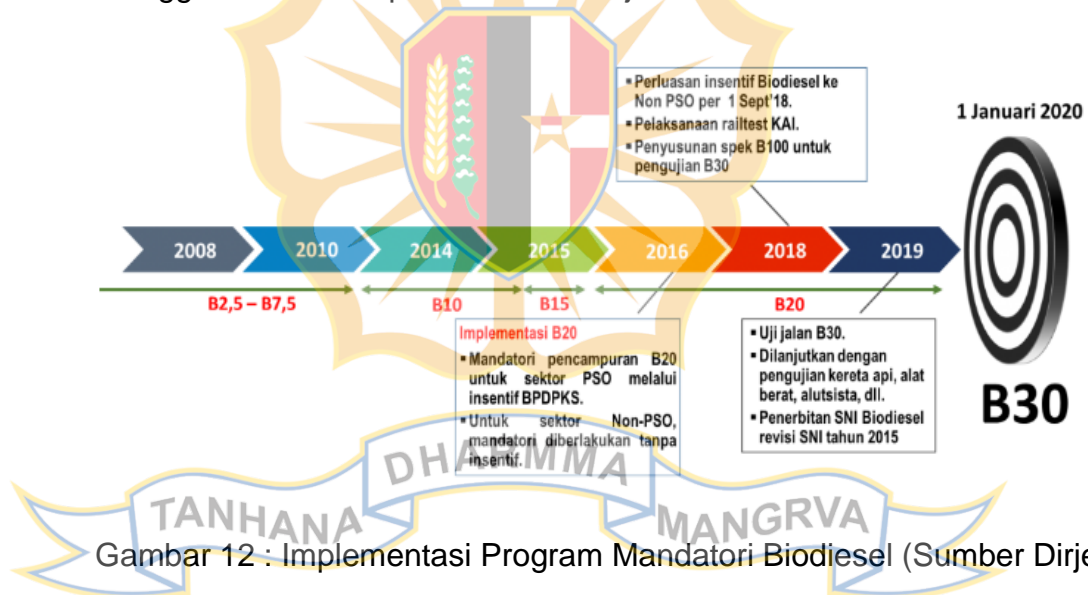
dan dampak lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik harus memperhatikan praktik-praktik keberlanjutan, seperti menjaga keanekaragaman hayati, meminimalkan limbah, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Sertifikasi keberlanjutan seperti *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* dapat membantu memastikan bahwa praktik-praktik ini diikuti.



Gambar 11. Prinsip Tata Kelola Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Berkelanjutan (ISPO) (Sumber: *Palm Oil Agribusiness Strategic Institute (PASPI)*, 2023). (Penjelasan 7 Prinsip Tata Kelola pada lampiran II)

**Kedua**, teknologi modern dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan produksi minyak sawit. Contohnya termasuk penggunaan sensor untuk pemantauan tanaman, analisis data untuk manajemen yang lebih baik, dan teknologi pemrosesan yang ramah lingkungan. **Ketiga**, melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, LSM, dan konsumen, penting untuk memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan. Keterlibatan *stakeholder* dapat melibatkan dialog terbuka, partisipasi dalam proyek keberlanjutan, dan berbagi informasi secara transparan. **Keempat**, lingkungan bisnis dan regulasi terus berubah, oleh karena itu fleksibilitas dalam pengelolaan sangat penting. Perusahaan harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, ekonomi, dan regulasi untuk tetap berkelanjutan dan kompetitif. Hal ini menggarisbawahi pentingnya mengadopsi pendekatan berbasis aturan dalam pengambilan keputusan, yang dapat membantu membangun kepercayaan di antara para pemangku kepentingan.

Pengelolaan industri sawit untuk mendukung ekonomi hijau melibatkan strategi-strategi yang fokus pada pengurangan emisi karbon dan meningkatkan efisiensi sumber daya. Salah satu contoh strategi yang efektif adalah penggunaan biofuel berbasis sawit, yang dapat mengurangi emisi karbon yang disebabkan penggunaan energi fosil. Industri sawit dapat menghasilkan energi *biofuel* generasi pertama (biodiesel dan *greenfuel*/biohidrokarbon) dari pengolahan minyak sawit, serta energi *biofuel* generasi kedua (*biopremium*/*biogasoline*/*bioetanol*, biopellet, biogas/biolistrik, biobara) dari biomassa sawit. Implementasi biodiesel di APROBI telah menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel (B30) dapat menurunkan emisi karbon sekitar 24.6 juta ton CO<sub>2</sub> atau setara dengan 7.8 persen dari target bauran energi tahun 2030. Selain itu, perbaikan tata kelola perkebunan sawit juga sangat penting untuk menggerakkan roda perekonomian hijau Indonesia.



Gambar 12 : Implementasi Program Mandatori Biodiesel (Sumber Dirjen EBTKE, 2019)<sup>118</sup>

Dalam upaya mencapai tujuan ekonomi hijau, industri sawit juga harus fokus pada pengembangan industri yang lebih efisien dan berkelanjutan, hal ini dapat evaluasi dengan menggunakan PESTEL *analysis*. Analisis PESTEL (*Political, Economic, Social, Technological, Environmental, and Legal*) adalah pendekatan strategi yang dalam

<sup>118</sup> Humas EBTKE (2019) Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434> Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.12 wib

pembahasan ini digunakan untuk memahami pengelolaan industri sawit yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang harus dibahas dalam menggunakan konsep analisis PESTEL dikaitkan dengan *political will* pengelolaan industri sawit untuk mendukung ekonomi hijau:

- 1) **Politik (*Political*):** Pemerintah harus mempertimbangkan kebijakannya yang berpengaruh terhadap industri sawit. Peran politik dalam transformasi industri sawit sangat penting, contoh Kebijakan Nasional Hilirisasi Industri Kelapa Sawit, Pengembangan Perkebunan kelapa sawit, Keterlibatan Pemerintah, Keterlibatan stakeholder. Aspek politik juga mempengaruhi koordinasi antara presiden, kementerian, provinsi, kabupaten dan struktur pemerintahan hingga desa.
- 2) **Ekonomi (*Economic*):** Pemerintah harus mempertimbangkan dampak ekonomi terhadap industri sawit. Peran kelapa sawit dan industrinya yang sangat besar terhadap perekonomian nasional. Industri sawit membutuhkan intervensi pemerintah, dengan intervensi tersebut dapat mengoreksi kegagalan pasar, daya tawar pasar, stabilitas harga, informasi pasar, insentif pasar dan keadilan dalam distribusi pendapatan.
- 3) **Sosial (*Social*):** Pemerintah harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap industri sawit, seperti kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar industri sawit. Selain itu, harus mempertimbangkan dampak sosial terhadap masyarakat, seperti kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- 4) **Teknologi (*Technological*):** Pemerintah harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap industri sawit, seperti penggunaan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Contohnya, penggunaan teknologi yang lebih efisien dapat meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, harus mempertimbangkan dampak teknologi terhadap

masyarakat, seperti peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

- 5) **Hukum (Legal):** Pemerintah harus mempertimbangkan dampak hukum terhadap industri sawit, seperti peraturan dan kebijakan yang berpengaruh terhadap industri. Contohnya, peraturan tentang penggunaan lahan dan perlindungan lingkungan dapat mempengaruhi industri sawit. Selain itu juga harus mempertimbangkan dampak hukum terhadap masyarakat, seperti kepedulian terhadap perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- 6) **Lingkungan (Environmental):** Pemerintah harus mempertimbangkan dampak lingkungan terhadap industri sawit, seperti kepedulian terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Contohnya, kebijakan pemerintah yang memprioritaskan penggunaan lahan untuk pertanian dan perkebunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar industri sawit.

Dengan penerapan strategi PESTEL yang efektif, industri sawit dapat terus meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi hijau dan berkelanjutan, serta meningkatkan pendapatan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan. Analisis ini dapat membantu industri sawit dalam mengidentifikasi peluang-peluang terkait pengembangan teknologi hijau dan berkelanjutan, seperti penggunaan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan dan penggunaan teknologi yang lebih efisien. Selain itu, dapat membantu industri sawit dalam mengantisipasi dan menangani ancaman-ancaman yang terkait dengan perubahan lingkungan, seperti perubahan iklim dan perubahan hutan, sehingga dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan analisis PESTEL, strategi yang dapat diterapkan dalam *political will* untuk pengelolaan industri sawit yang efektif mendukung ekonomi hijau, adalah:

## 1) Politik.

- a) Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus terus meningkatkan kerjasama dengan negara lain untuk meningkatkan konsumsi dan produksi minyak sawit yang berkelanjutan. Kerjasama ini dapat membantu dalam meningkatkan pangsa pasar global dan meningkatkan pendapatan devisa negara. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan kemampuan diplomasi aktif untuk mendukung kepentingan nasional di berbagai forum internasional<sup>119</sup>.
- b) Pemerintah Indonesia harus terus memberikan dukungan kebijakan yang memungkinkan industri sawit untuk berkembang secara berkelanjutan. Kebijakan ini dapat mencakup peningkatan investasi dalam teknologi yang lebih efisien, peningkatan kualitas produk, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan.
- c) Pemerintah Indonesia harus meningkatkan pengembangan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) untuk meningkatkan kualitas produk dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sertifikasi ISPO dapat membantu industri sawit dalam meningkatkan keinginan bisnisnya dan memenuhi standar lingkungan yang lebih tinggi.
- d) Pemerintah Indonesia harus mengintegrasikan kepentingan nasional dalam pengelolaan industri sawit dengan merumuskan kebijakan yang strategis untuk terciptanya kedaulatan Industri Sawit sebagai pilar penting dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Langkah ini sebagai langkah protektif untuk melindungi industri sawit dari tekanan politik dan juga sebagai langkah ofensif untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis.

---

<sup>119</sup> Lemhannas RI (2024) Materi Pokok Bidang Studi Ketahanan Nasional Hal 75

- e) Pemerintah Indonesia harus memiliki sistem kelembagaan dan manajemen yang efektif. Sistem ini harus berjalan dengan baik dan memiliki otoritas penuh, yang dipandang sebagai kekuatan yang solid dan dinamis. Dengan otoritas tersebut, pemerintah dapat membentuk dan menjalankan sistem industri kelapa sawit yang kuat dan berkelanjutan.
- f) Pemerintah Indonesia perlu membentuk kelembagaan yang memiliki fungsi penelitian, pembinaan petani dan pelaku industri, pembangunan infrastruktur, sekaligus pengumpulan dana pengembangan:
- (1) Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Perizinan bertanggung jawab untuk melakukan penelitian ilmiah, mengembangkan teknologi terbaru, dan mengatur serta memproses perizinan yang diperlukan untuk pengelolaan industri sawit.
  - (2) Lembaga Promosi Minyak Sawit berperan dalam mempromosikan produk minyak sawit di pasar internasional. Lembaga ini memiliki kantor cabang di beberapa negara tujuan ekspor sawit Indonesia, sehingga dapat melakukan promosi yang lebih efektif dan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pihak di luar negeri.
- g) Pemerintah Indonesia harus aktif dalam mengembangkan berbagai organisasi dan LSM yang berfokus pada industri sawit, dengan tujuan untuk meningkatkan pengawasan, pengembangan teknologi, dan dukungan terhadap petani serta pelaku industri dalam berbagai aspek produksi dan pemasaran.
- h) Pemerintah Indonesia harus dapat melakukan peningkatan usaha melalui konsolidasi dan penggabungan yaitu:
- (1) Penyatuan usaha-usaha kecil perkebunan rakyat menjadi satu kesatuan melalui wadah organisasi



koperasi dan kelompok tani yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sawit.

- (2) Penggabungan beberapa unit yang terlibat langsung dalam industri sawit pada kementerian atau lembaga untuk menyatukan pendapat dalam merumuskan kebijakan yang mendukung industri kelapa sawit.

## 2) Ekonomi

- a) Pemerintah harus memperkuat fasilitas yang mendukung perusahaan untuk berinvestasi di sektor industri sawit, seperti menyediakan fasilitas infrastruktur yang meliputi pembangunan pelabuhan dan penyimpanan terpusat yang tersebar di sentra-sentra produksi CPO sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing produk CPO Indonesia, serta meningkatkan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Selain itu pemerintah perlu memprioritaskan pembangunan jalan aspal hingga ke perbatasan kebun sebagai langkah krusial untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi transportasi bagi sektor perkebunan.
- b) Pemerintah dapat memberikan suku bunga rendah kepada pengusaha dalam investasi kebun sawit untuk merangsang investasi, meningkatkan produktivitas petani, dan memungkinkan inovasi serta ekspansi dalam industri ini. Selain itu, berkontribusi pada ekonomi negara dengan menyediakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan devisa melalui ekspor, tetapi juga mendukung efisiensi dan daya saing global produk sawit.
- c) Pemerintah dapat membangun infrastruktur di negara tujuan ekspor untuk meningkatkan daya saing produk nasional di pasar global. Infrastruktur yang memadai, seperti pelabuhan, jaringan transportasi darat dan udara, serta fasilitas pengiriman barang yang efisien, merupakan faktor kunci

dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan memastikan produk dapat mencapai pasar dengan biaya yang kompetitif dan dalam kondisi yang optimal. Langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan pendapatan devisa, tetapi juga mendorong integrasi ekonomi global yang lebih kuat, memberikan insentif bagi investasi asing, serta meningkatkan aksesibilitas produk domestik ke pasar internasional.

d) Pemerintah perlu meningkatkan kreativitas dalam pemasaran industri minyak sawit sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan nilai ekonomis industri sawit, seperti:

(1) Mengeksplorasi peluang pasar untuk produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi daripada *Crude Palm Oil* (CPO) mentah. Langkah ini penting untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin kompleks dan beragam.

(2) Memberikan insentif kepada industri hilir untuk melakukan pemrosesan CPO di dalam negeri. Dengan cara ini, nilai tambah dari produk sawit dapat ditingkatkan, menciptakan lebih banyak lapangan kerja lokal, dan mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah.

(3) Memberikan berbagai keringanan dan dukungan kepada industri untuk mengekspor CPO dengan syarat perusahaan eksportir harus mengembangkan fasilitas industri hilir di negara tujuan ekspornya. Langkah ini tidak hanya meningkatkan nilai tambah produk ekspor, tetapi juga mempromosikan investasi dalam pengolahan lokal di negara penerima ekspor, yang berpotensi mendukung pembangunan ekonomi dan peningkatan hubungan bilateral antar negara.

- e) Industri sawit harus terus meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan meningkatkan kualitas produk. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya produksi dan meningkatkan pendapatan.
- f) Industri sawit harus terus meningkatkan diversifikasi produk yang dihasilkan, seperti produk olahan dan produk turunan, untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan.

### 3) Sosial

- a) Pemerintah dan industri sawit harus terus meningkatkan kemitraan antara petani dan perusahaan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan petani.
- b) Industri sawit harus meningkatkan kemitraan dan kooperasi dengan organisasi lain, seperti LSM dan organisasi sosial, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan. Kemitraan dan kooperasi ini dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan kualitas produk
- c) Pemerintah harus mengembangkan SDM untuk industri kelapa sawit meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan khusus, baik di tingkat akademis maupun praktis. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pengelolaan perkebunan sawit, pemrosesan, dan manajemen berkelanjutan, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang mampu beradaptasi dengan teknologi dan praktik terbaru dalam industri.

### 4) Teknologi

- a) Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit, seperti :
  - (1) Mengadopsi teknologi untuk menetapkan target pencapaian produktivitas per hektar lahan setiap tahunnya. Langkah ini bertujuan untuk memberikan arah

yang jelas dalam meningkatkan efisiensi produksi serta memastikan bahwa industri sawit mampu memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian nasional.

(2) Menggunakan teknologi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan bibit unggul kelapa sawit. Inisiatif ini penting untuk menghasilkan varietas yang lebih produktif, tahan terhadap penyakit, dan adaptif terhadap berbagai kondisi lingkungan, sehingga dapat meningkatkan potensi hasil panen secara signifikan.

(3) Inovasi teknologi untuk memastikan penggunaan benih yang baik, efektif, dan sesuai dengan kondisi tanah setempat, diharapkan produktivitas per hektar lahan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

(4) Menerapkan teknologi digital dalam manajemen mutu untuk meningkatkan produktivitas industri sawit. Dengan menerapkan praktik manajemen yang baik, pengawasan terhadap proses budidaya, pengelolaan pestisida dan pemeliharaan tanaman, diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit.

b) Pemerintah harus fokus pada kebijakan dan dukungan terhadap penelitian untuk memajukan inovasi dalam berbagai aspek industri kelapa sawit. Dengan mendorong riset untuk meningkatkan produktivitas per hektar lahan, meningkatkan kualitas hasil panen, dan mengurangi dampak lingkungan dari praktik pertanian.

c) Pemerintah harus fokus pada pengembangan teknologi untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kebun kelapa sawit, seperti aplikasi teknologi sensor untuk monitoring kondisi tanah dan tanaman, serta penggunaan data analitik untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dalam manajemen kebun.

- d) Pemerintah harus menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan teknologi hijau bagi Industri sawit, seperti penggunaan energi berbasis biomassa, penggunaan teknologi yang lebih efisien, dan penggunaan sistem produksi yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat membantu dalam mengurangi biaya operasional dan meningkatkan kualitas produk.
- e) Pemerintah harus mengambil langkah proaktif dalam pengelolaan industri kelapa sawit dengan fokus pada pendanaan penelitian dan pengembangan (R&D) yang dialokasikan dari dana pungutan ekspor dalam memajukan inovasi dan teknologi dalam sektor kelapa sawit, dengan tujuan meningkatkan produktivitas, keberlanjutan dan daya saing industri sawit di pasar global. Selain itu, pemerintah mengalokasikan dana pungutan ekspor untuk mendukung riset yang berfokus pada pengembangan varietas unggul kelapa sawit, teknologi budidaya yang inovatif, pengendalian penyakit dan hama secara efektif, serta manajemen berkelanjutan sumber daya alam.
- f) Pemerintah harus memainkan peran krusial dalam mengelola industri kelapa sawit dengan fokus pada peningkatan nilai tambah dari produk industri hilir, pemanfaatan energi baru terbarukan, turunan olahan dari minyak sawit, serta integrasi pemanfaatan hasil sampingan dan hubungan simbiosis antara industri sapi dan sawit.

## 5) Lingkungan

- a) Pemerintah harus menetapkan regulasi yang ketat untuk mengawasi dan mengatur praktik-praktik pertanian sawit yang berdampak lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan penggunaan pestisida yang ramah lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap biodiversitas, tanah, air, dan udara di sekitar perkebunan kelapa sawit.

- b) Pemerintah harus aktif dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit melalui program-program seperti sertifikasi keberlanjutan dan mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi standar tertentu dalam hal lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga mendorong adopsi praktik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan
- c) Pemerintah harus menggalakkan penggunaan teknologi hijau dan inovasi dalam manajemen kebun kelapa sawit seperti pemantauan berbasis satelit untuk deteksi deforestasi, penggunaan sistem irigasi yang efisien dan pengolahan limbah yang lebih baik.
- d) Pemerintah harus terlibat dalam upaya konservasi lahan dan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, yang sering kali terkait dengan ekspansi perkebunan kelapa sawit untuk mempertahankan ekosistem alami yang berharga dan menjaga keseimbangan ekologi di daerah-daerah produsen kelapa sawit.
- e) Pemerintah harus memiliki komitmen untuk berkontribusi pada upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission dengan mengembangkan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan meningkatkan efisiensi energi dalam proses produksi.

## 6) Hukum

- a) Pemerintah harus meningkatkan kebijakan pemberian jaminan hukum yang diatur oleh sistem regulasi perizinan yang memiliki dasar hukum untuk menciptakan kepastian hukum bagi perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga mereka dapat melakukan investasi dengan keyakinan dan tanpa rasa was-was. Salah satu contoh konkret dari pemberian jaminan hukum melalui hak pengusahaan atas tanah untuk jangka waktu tertentu yang dijamin oleh hukum.

Dengan adanya regulasi ini, perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat memperoleh hak yang jelas atas tanah yang dikelola, termasuk untuk perluasan dan investasi jangka panjang.

- b) Pemerintah Indonesia harus meningkatkan kebijakan sistem regulasi perizinan mencakup prosedur yang transparan dan berbasis hukum dalam pemberian izin usaha dan operasional perkebunan untuk menjamin setiap kegiatan operasional perusahaan kelapa sawit berada dalam kerangka hukum yang sesuai, mengurangi risiko hukum dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang berlaku. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan investor dan perusahaan perkebunan, serta memfasilitasi pertumbuhan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
- c) Pemerintah Indonesia harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kokoh, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri dan masyarakat sekitar untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan kondusif bagi pertumbuhan industri, memastikan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan hak-hak masyarakat lokal.

Dengan penerapan strategi PESTEL yang efektif, industri sawit sebagai salahsatu komoditas strategis nasional dan *backbone* perekonomian nasional dapat terus meningkatkan kontribusi terhadap ekonomi hijau, berkelanjutan, dan meningkatkan pendapatan serta kesadaran masyarakat tentang pentingnya industri sawit yang berkelanjutan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 16. Simpulan.

Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia. Industri kelapa sawit di Indonesia adalah kontributor utama dalam perekonomian nasional dan devisa ekspor. Namun, potensi industri kelapa sawit yang menjanjikan tersebut belum optimal berkembang menjadi industri yang strategis dan bernilai tambah, karena dalam pengelolaannya saat ini masih terdapat banyak kendala yang menghambat pengembangan industri baik di hulu maupun di hilir. Aspek sosial, ekonomi dan lingkungan mempengaruhi pengelolaan industri sawit saat ini. Pemerintah Indonesia berkomitmen meningkatkan produktivitas perkebunan kelapa sawit melalui pembangunan berkelanjutan yang adil dan inklusif serta menjaga lingkungan hidup, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lintas generasi. Minyak sawit semakin mendominasi pasar minyak nabati global dikarenakan memiliki kelebihan dibandingkan sumber minyak nabati lainnya, seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari dan minyak *rapeseed*. Minyak sawit memiliki kelebihan dari berbagai aspek, seperti ketersediaannya lebih besar, harga relatif lebih murah sehingga kompetitif di pasar global, menghasilkan produk turunan olahan lebih banyak sehingga lebih populer dan meningkatkan pangsa pasar global, kualitas lebih baik sehingga lebih disukai konsumen, dan produktivitas lebih tinggi sehingga mudah diproduksi. Meskipun memberikan kontribusi besar bagi ekonomi Indonesia melalui devisa dan lapangan kerja, industri sawit juga dihadapkan pada tuduhan merusak lingkungan dan pelanggaran sosial serta di cap sebagai industri yang negatif di mata publik nasional maupun internasional, namun sebagian besar tuduhan tersebut tidak terbukti. Dominasi sawit Indonesia dipasar global telah menyebabkan produsen minyak nabati lain khususnya Eropa dan Amerika merasa tersaingi dan mempengaruhi kebijakannya terhadap minyak sawit Indonesia guna melindungi produk minyak nabati yang dihasilkannya, pada akhirnya Uni Eropa mengeluarkan kebijakan melarang impor minyak sawit dan produk turunannya masuk ke Eropa.



Sementara itu, pengelolaan industri sawit didalam negeri juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan teknologi, krisis sumber daya manusia, hilirisasi industri, kebijakan pemerintah, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, manajemen, keamanan berusaha, dan kemitraan. Untuk mewujudkan pengelolaan industri sawit yang berkelanjutan, diperlukan komitmen pemerintah menjadikan industri kelapa sawit sebagai keunggulan komparatif bagi negara, tercermin pada *political will* yang berpihak dan mendukung langkah serta kebijakan untuk pengembangan industri sawit yang berdaulat, mandiri dan berketahanan agar dapat berkompetisi baik didalam maupun diluar negeri.

Untuk itu, diperlukan strategi membangun *political will* dalam pengelolaan industri sawit berkelanjutan yang mendukung ekonomi hijau diberbagai bidang. Pertama, dari aspek **Politik**, Pemerintah memberikan dukungan kebijakan yang memungkinkan industri sawit untuk berkembang secara berkelanjutan, meningkatkan pengembangan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO), mengintegrasikan kepentingan nasional dalam pengelolaan industri dengan merumuskan kebijakan yang strategis untuk terciptanya kedaulatan industri sawit, memiliki sistem kelembagaan dan manajemen yang efektif, membentuk Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Perizinan, serta membentuk Lembaga Promosi Minyak Sawit, konsolidasi dan penggabungan terhadap usaha-usaha serta kegiatan yang terlibat dalam industri sawit. Kedua, dari aspek **Ekonomi**, memperkuat fasilitas yang mendukung perusahaan untuk berinvestasi, memberikan suku bunga rendah kepada pengusaha, membangun infrastruktur di negara tujuan ekspor, meningkatkan kreativitas dalam pemasaran, meningkatkan efisiensi operasional dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan diversifikasi produk turunan hasil pengolahan kelapa sawit. Ketiga, dari aspek **Sosial**, Pemerintah dan industri sawit meningkatkan kemitraan antara petani dan perusahaan, Industri sawit meningkatkan kemitraan dan koopetisi dengan LSM dan organisasi social lainnya, mengembangkan SDM meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan khusus, baik di tingkat akademis maupun praktis. Keempat, dari aspek **Teknologi**, Pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan produktivitas industri kelapa sawit, fokus pada kebijakan dan dukungan terhadap penelitian untuk memajukan inovasi,

pengembangan teknologi untuk mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam manajemen kebun, menerapkan kebijakan untuk meningkatkan penggunaan teknologi hijau, penelitian dan pengembangan dalam memajukan inovasi dan teknologi. Kelima, dari aspek **Lingkungan**, Pemerintah menetapkan regulasi yang ketat mengawasi dan mengatur praktik pertanian sawit yang berdampak lingkungan, aktif dalam mempromosikan praktik berkelanjutan dalam industri kelapa sawit, menggalakkan penggunaan teknologi hijau dan inovasi dalam manajemen kebun, terlibat dalam upaya konservasi lahan dan rehabilitasi lahan gambut yang terdegradasi, komitmen untuk berkontribusi pada upaya global pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *Net Zero Emission*. Keenam, dari aspek **Hukum**, Pemerintah memberikan jaminan yang diatur oleh sistem regulasi perizinan dengan memiliki dasar hukum untuk kepastian hukum, meningkatkan kebijakan sistem regulasi perizinan mencakup prosedur yang transparan dan berbasis hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil didasarkan pada landasan hukum yang kokoh.

Indonesia memerlukan sebuah kebijakan sawit nasional yang utuh dan komprehensif. Kebijakan sawit nasional melalui *political will* tersebut tidak sekadar bertujuan menjawab tekanan internasional dalam perang minyak nabati di pasar global, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara produsen utama CPO dunia, dengan tetap mengakomodasi masukan positif dari berbagai pihak serta dapat mendesain pengembangan sawit Indonesia jangka panjang yang berkelanjutan dan mendukung ekonomi hijau.

## 17. Rekomendasi.

Dalam rangka mendukung solusi pemecahan yang telah diuraikan dalam pembahasan, maka dalam Taskap ini direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri membangun kemitraan yang kuat dengan negara-negara pengimpor minyak sawit utama, seperti China, India, dan Uni Eropa, untuk mempromosikan minyak sawit berkelanjutan dan program-program yang telah dilakukan.

- b. Pemerintah Indonesia mempertimbangkan bergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan) untuk meningkatkan pengembangan pasar sawit dengan mengadopsi standar internasional yang ketat untuk produksi minyak sawit berkelanjutan, termasuk standar yang memperhatikan isu-isu lingkungan, sosial, dan ekonomi.
- c. Pemerintah menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta dan lembaga internasional dalam mendukung pengembangan biodiesel, termasuk kerjasama dalam penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, serta akses pasar.
- d. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian memanfaatkan lahan terdegradasi untuk di jadikan kebun sawit, yang hasilnya dialokasikan khusus untuk pengembangan Biodiesel dalam jangka panjang.

Jakarta, 15 Agustus 2024

Penulis,



Syahril Saharda

No. Peserta 084



**DAFTAR PUSTAKA****PERATURAN**

UUD NRI 1945 <https://jdih.kemenkeu.go.id> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 19.45 wib

UU-NO-32-TAHUN-1997 <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-1997> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.15 wib

UU-NO-32-TAHUN-2009 <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

UU-No-19-Tahun-2013 <https://Peraturan.Go.Id/Id/Uu-No-19-Tahun-2013> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.34 wib

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014> Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.00 wib

Perpres-No-44-Tahun-2020 <https://www.Peraturan.Go.Id/Terjemahresmi/Perpres-No-44-Tahun-2020> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.55 wib

Permentan-No-29-Tahun-2016 <https://spks.or.id/detail-sikap-permentan-no-29-tahun-2016> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.20 wib

Perpres-No-44-Tahun-2020 <https://peraturan.go.id/id/perpres-no-44-tahun-2020> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.25 wib

Keppres 9/2023: Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara <https://jdih.maritim.go.id/keppres-92023> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.45 wib

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 Tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit <https://www.bpdp.or.id/regulasi-2601> Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.55 wib

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Republik Indonesia 2020 - 2024 <https://ditjenbun-ppid.pertanian.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 21.35 wib

**BUKU**

Materi Hanjar Tannas Lemhannas RI tahun 2024 hal. 48 Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.20 wib

Max Weber, Economy and Society. Volume 1, An Outline of Interpretative Sociology, Guenter Roth and Claus Eittich (ed.), (California: The Regents of University of California, 1978), 22

Heldi Yunan Ardian<sup>1</sup>, Delima Hasri Azahari(2020) Analisis Kebijakan Pertanian, Vol. 18 No. 1, Juni 2020: 59-73 “Strategi Komunikasi Dalam Tata Kelola Pengembangan Kelapa Sawit Di Indonesia” Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.20 wib

Ngadi dan Mita Noveria (2017) Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1, Juni 2017 “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek Pengembangan Di Kawasan Perbatasan” Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 21.55 wib

Prasetio, Eko Agus, DZAKIY, Uruqul Nadhif, SUSHANDOYO, Dedy (2022) Buku Berjudul “Transfer Teknologi dan Informasi untuk Transformasi Bisnis” Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 21.25 wib.

Kemas Uwais Alqorni, Hatta Dahlan, Susila Arita (2024) Proses Terpadu Limbah Pabrik Kelapa Sawit Menggunakan Teknologi Elektrokoagulasi, Filter Karbon Aktif, Zeolit dan Pemisahan Membran Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.43 wib

**JURNAL**

Yahya, Zuhdi (2024) Jurnal Kemajuan Penelitian Pertanian Asia “Dinamika Perkebunan Kelapa Sawit di Kalimantan Timur” Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib

Andre Himu, Filipi (2024) Thesis, “Governing Pemberdayaan Kelompok Tani” .Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib

PPID IPB (2022) Inovasi Produk Turunan Minyak Kelapa Sawit, Primadona Olahan Pangan di Masa Depan <https://ppid.ipb.ac.id/inovasi-produk-turunan-minyak->

kelapa-sawit-primadona-olahan-pangan-di-masa-depan/ Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.30 wib

Rachman, F., Sujadi, S., Adriwan Siregar, H., & Yenni, Y. (2024). Warta Pusat Penelitian Kelapa Sawit , 29 (1) “Pendekatan Seleksi Genomik Dalam Program Mendukung Pemuliaan Kelapa Sawit:”. Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 08.48 wib

Petir Papilo, Diki Prasetyo, Misra Hartati, Ekie Gilang Permata, Afdhol Rinaldi(2020) Jurnal Teknologi Industri Pertanian “Analisis Dan Penentuan Strategi Perbaikan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Kelapa” <https://journal.ipb.ac.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.25 wib

Koko Junaid (2023) Jurnal Agriprimatch “Produktivitas Crude Palm Oil (Cpo) Pada Perkebunan Kelapa Sawit” <http://jurnal.unprimdn.ac.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.25 wib

Valentina Sokoastri1, Doni Setiadi, Arif Rakhman Hakim, Andre Dani Mawardhi, M. Lukman Fadli(2019) Jurnal Sosiologi Pedesaan “Perkebunan Petani Kelapa Sawit Rakyat: Permasalahan dan Solusi” Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 20.55 wib

Taufiq Hidayatullah (2023) . Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara “Analisis Empiris Produksi Kelapa Sawit Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani” <https://ejurnal.dpr.go.id> Diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 21.15 wib

Almasdi Syahza (2008) Pengaruh Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap Ekonomi Regional Daerah Riau <https://www.bunghatta.ac.id/artikel> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.25 wib

Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Sintang Tahun 2018 – 2023 <http://perpustakaan.menlhk.go.id/pustaka/images/docs/RAD-KSB1.pdf> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

Purba, T Sipayung (2018) Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan<https://jmi.ipisk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 22.25 wib

- Jan Horas V. Purba, Tungkot Sipayung (2020) Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan <https://jmi.ipesk.lipi.go.id> Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.25 wib
- Choirul Saleh, Wawan H. Hardiwinata, Lely Indah Mindarti, Soesilo Zauhar (2020) Pengelolaan Kelapa Sawit oleh Pemerintah Republik Indonesia <https://www.redalyc.org/journal> Diakses pada tanggal 24 April 2024 pukul 22.00 wib
- P Partini, M Noer, I Suliansyah, D Devianto 2023 Jurnal Agribisains, Dinamika pengembangan perkebunan sagu berkelanjutan berbasis kearifan lokal <https://ojs.unida.ac.id/AGB/article/view/6970> Diakses pada tanggal 23 April 2024 pukul 22.12 wib
- Bambang Hendroyono (2021) "Resiliensi, Ketahanan Nasional Bidang Lingkungan" <https://ejournal.unsri.ac.id> Diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 22.00 wib
- Salman Yoga S (2018) Jurnal Al-Bayan "Perubahan Sosial Budaya Masyarakat Indonesia Dan Perkembangan Teknologi Komunikasi" <https://jurnal.ar-raniry.ac.id> Diakses pada tanggal 26 April 2024 pukul 22.25 wib
- Santo Adhynugraha (2006) "Potensi Dan Permasalahan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Skala Besar Di Kalimantan Timur" <https://doi.org/10.24258/jba.v2i2.22> Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.00 wib
- Kurnia Endri Susilo (2020) Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pelaksana Pabrik Kelapa Sawit <https://repositori.uma.ac.id> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib
- Jamaludin Zainal Abidin (2023) Tata kelola industri kelapa sawit berkelanjutan dalam mendukung ketahanan energi nasional <https://journal-iasssf.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib
- Hendra Septiawana, Hariyadib, Machmud Thohari (2014) Analisis Pengelolaan Lingkungan Pabrik Kelapa Sawit <https://media.neliti.com> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 21.25 wib
- Riana Septiani, Mujiyanto (2017) Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang Dan

Ancaman Pada Strategi Pemasaran Minyak Kelapa Sawit  
<https://dx.doi.org/10.37090/indstrk.v1i2.13> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024  
 pukul 22.00 wib

Ngadi Dan Mita Noveria (2017) Jurnal Masyarakat Indonesia, Vol. 43 No.1  
 “Keberlanjutan Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia Dan Prospek  
 Pengembangan Di Kawasan Perbatasan\* <https://jmi.ipsk.lipi.go.id> Diakses  
 pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 22.25 wib

Muhammad Akmal Agustira Dan Rizki Amelia (2012) Jurnal Warta Pusat Penelitian  
 Kelapa Sawit “Kendala Peningkatan Produktivitas Pada Perkebunan Kelapa  
 Sawit Rakyat Di Indonesia” <https://Pis.Iopri.Co.Id> Diakses pada tanggal 30  
 Mei 2024 pukul 22.15 wib

Shandra Ziva Hendrian (2023) Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Volume  
 9 (4) “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Larangan Ekspor Minyak  
 Kelapa Sawit di Indonesia selama Pandemi” <https://journal.lembagakita.org>  
 Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 21.00 wib

Anggi Prayoga Simanjuntak, Ira Apriyanti, Buhari Sibuea, Hardiansyah Sinaga  
 (2021) Analisis Keunggulan Komparatif Ekspor (Crude Palm Oil) Cpo  
 Indonesia Di Pasar Nternasional <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id> Diakses  
 pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

Fildza Arief Syuhada, Hasnah, Rusda Khairati (2022) Jurnal Ekonomi Pertanian  
 Dan Agribisnis “Analisis Efisiensi Teknis Usahatani Kelapa Sawit”  
<https://Doi.Org/10.21776> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

## **INTERNET**

Tungkot Sipayung (2024) Jurnal “Bagaimana Proses Pengolahan Kelapa Sawit”  
<https://palmoilina.asia> Diakses pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 21.00 wib

Amin, K Prabandono (2024) ”Cocopreneurship, Aneka Peluang Bisnis Dari Kelapa  
 Sawit” h 21 Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.43 wib

Soni S. Wirawan (2024) ”Penerapan biodiesel di Indonesia” Diakses pada tanggal  
 10 Februari 2024 pukul 20.43 wib



- Program BPDPKS (2020) Program Pengembangan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati <https://www.bdp.or.id/program-pengembangan-dan-pemanfaatan-bahan-bakar-nabati> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.20 wib
- Regulasi (2018) Inpres Tentang Pengembangan Biofuel <https://www.bdp.or.id/inpres-tentang-pengembangan-biofuel> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 10.45 wib
- Ridhwan Mustajab (2023) <https://dataindonesia.id/agribisnis-kehutanan> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.38 wib
- Siaran Pers GAPKI (2023) "Kinerja Industri Minyak Sawit Juli 2023: Ekspor Meningkat, Stok Melemah" <https://gapki.id/news/2023/09/29/kinerja-industri-minyak-sawit-juli-2023> Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 20.23 wib
- Nuraini, (2023) [bisnis.com](https://www.bisnis.com) "Ini 5 Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia, Ada Indonesia" <https://www.bisnis.com> Diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 19.28 wib
- Koran Tempo (2023) 11 negara penghasil sawit terbesar di dunia 2023 Indonesia-nomor-1 <https://koran.tempo.co/> Diakses pada tanggal 9 Februari 2024 pukul 19.45 wib
- M Aditiya(2023)Berita " Negara Penghasil Kelapa Sawit Terbesar di Dunia" <https://goodstats.id/infographic/negara-penghasil-kelapa-sawit-terbesar-di-dunia-C1Sv1> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 11.00 wib
- Bagaskara (2023) [mutucertification.com](https://mutucertification.com) "Manfaat dan Tujuan ISPO untuk Perusahaan dan Pekebun Sawit". <https://mutucertification.com/manfaat-tujuan-ispo-untuk-sawit/> Diakses pada tanggal 10 Maret 2024 pukul 12.20 wib
- Ferry Sandi (2023) CNBC Indonesia, "Nyata! Perang Rusia-Ukraina Ancam Stok Pupuk RI, Kenapa?" <https://www.cnbcindonesia.com/news> Diakses pada tanggal 10 Februari 2024 pukul 21.55 wib
- Putri, (2022) "Petani Kelapa Sawit Diminta Konsolidasi dengan Koperasi" <https://www.infopublik.id> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

- Indonesia.com” (2014) Dimana Peran Dan Keberpihakan Pemerintah Terhadap Sawit <https://sawitindonesia.com> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib
- Achmad Deni Daruri (2021) Peran Pemerintah dalam Industri Sawit <https://investor.id/opini/260197/peran-pemerintah-dalam-industri-sawit> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.35 wib
- Nashih Nashrullah (2021) Koperasi Petani Sawit Belum Dapat Dukungan Pemerintah <https://ekonomi.republika.co.id/berita/qvinyj320/koperasi-petani-sawit-belum-dapat-dukungan-pemerintah> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib
- Antara News (2022) "Political Will" Kunci Tercapainya Tujuan Keterbukaan Informasi <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/532957/political-will-kunci-tercapainya-tujuan-keterbukaan-informasi> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 19.45 wib
- Indonesia2045.go.id (2024) 8 Agenda Pembangunan RPJPN 2025-2045 <https://indonesia2045.go.id/> Diakses pada tanggal 22 Maret 2024 pukul 19.50 wib
- Koran.tempo (2023) pengertian ekonomi hijau konsep tujuan dan manfaatnya <https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/483198/pengertian-ekonomi-hijau-konsep-tujuan-dan-manfaatnya> Diakses pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.45 wib
- Pavan Sukhdev (2011) Berikan nilai pada alam [https://www.ted.com/talks/pavan\\_sukhdev\\_put\\_a\\_value\\_on\\_nature/transcript](https://www.ted.com/talks/pavan_sukhdev_put_a_value_on_nature/transcript) Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 19.00 wib
- Geoffrey Mrema (2002) Pengolahan Minyak Kelapa Sawit <https://www.fao.org/3/Y4355E/y4355e04.htm> Diakses pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 20.10 wib
- Wikipedia (2024) Trans fat [https://en.wikipedia.org/wiki/Trans\\_fat](https://en.wikipedia.org/wiki/Trans_fat) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 wib
- Majalah Sawit Indonesia (2021) Sawit Paling Sehat, Bebas Asam Lemak Trans

Pemicu Jantung dan Stroke <https://sawitindonesia.com/sawit-paling-sehat-bebas-asam-lemak-trans-pemicu-jantung-dan-stroke/> Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.45 wib

Shell.co.id (2023) Pengertian Biodiesel: Pemahaman, Jenis, Dan Contohnya [https://www.shell.co.id/in\\_id/konsumen-bisnis/shell-fleet-card/pengertian-biodiesel.html](https://www.shell.co.id/in_id/konsumen-bisnis/shell-fleet-card/pengertian-biodiesel.html) Diakses pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.55 wib

EBTKE (2019) Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434/faq.program.mandatori.biodiesel.30.b30> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

LindungiHutan(2022) Deforestasi: Pengertian, Penyebab, Dampak dan Pencegahan <https://lindungihutan.com/blog/pengertian-deforestasi-penyebab-dan-dampak/> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

SDS Indonesia (2024) Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO) <https://sdsindonesia.com/en/indonesian-sustainable-palm-oil-system-ispo> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

Sawit Berkelanjutan (2020) Perpres Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi ISPO <https://www.bdp.or.id/opini-perpres-nomor-44-tahun-2020-tentang-sistem-sertifikasi-ispo> Diakses pada tanggal 16 April 2024 pukul 19.45 wib

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, " Grant Riset Sawit 2019 <https://www.bdp.or.id> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.45 wib

Berita [bdp.or.id](http://bdp.or.id) (2020) SDM Hingga Teknologi, Kendala Hilirisasi Sawit RI <https://www.bdp.or.id/sdm-hingga-teknologi-kendala-hilirisasi-sawit-ri> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 21.50 wib

Putri (2022) infopublik" Petani Kelapa Sawit Diminta Konsolidasi dengan Koperasi" <https://www.infopublik.id> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

Nashih Nashrullah (2021) Republika.Co.Id Koperasi Petani Sawit Belum Dapat Dukungan Pemerintah <https://ekonomi.republika.co.id/berita> Diakses pada

tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.45 wib

OCBC NISP (2023) Teori keunggulan mutlak <https://www.ocbc.id/id/article> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 22.50 wib

PPSDMA (2021) Mengenal Lebih Dalam Langkah Aplikasi Ekonomi Hijau di Indonesia <https://ppsdmaparatur.esdm.go.id/berita> Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.50 wib

Mega Liani Putri (2016). Susilo Bambang Yudhoyono: Kampanyekan Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan <https://www.itb.ac.id/berita> Diakses pada tanggal 9 Maret 2024 pukul 09.50 wib

NEWS - sef, CNBC Indonesia ,19 February 2024 (NATO 'Kalang Kabut', Putin Klaim Kemenangan Baru Perang Rusia-Ukraina) <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240219050549>

Siaran Pers Kemenko Perekonomian (2021) "Industri Kelapa Sawit Indonesia: Menjaga Keseimbangan Aspek Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan" <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2921/industri-kelapa-sawit-indonesia-menjaga-keseimbangan-aspek-sosial-ekonomi-dan-lingkungan> Diakses pada tanggal 20 April 2024 pukul 20.25 wib

Ririe Ranggasari (2023) Ekonomi & Bisnis "Kilas Balik Tahun 2023: 10 Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Paling Berdampak" <https://en.tempo.co> Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 20.00 wib

Prabawati (2023) "Konflik Usaha Perkebunan Harus Diatasi Dengan Serius" <https://diskominfo.kaltimprov.go.id> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.15 wib

Asian Agri (2023) Apakah yang Dimaksud dengan Minyak Sawit Berkelanjutan? <https://www.asianagri.com> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Redaksi SawitKita (1 Maret 2024) "Produksi Minyak Sawit Indonesia Diperkirakan 54,84 Juta Ton" <https://sawitkita.id> Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.15 wib

Kabul Wijayanto (2023) "Sawit Masih Berkontribusi Bagi Perekonomian Negara, Harga CPO dan TBS Sawit pun Cenderung Stabil" <https://www.bpdp.or.id>

Diakses pada tanggal 1 Mei 2024 pukul 22.55 wib

PSE.litbang.pertanian.go.id (2022) “Kelapa Sawit Indonesia Semakin Menjadi Andalan Perekonomian Nasional” <https://binasawitmakmur.com> Diakses pada tanggal 8 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Ady Thea DA (9 Januari 2023) Berita “KPA: Sepanjang 2022 Terjadi 212 'Letusan' Konflik Agraria” <https://www.hukumonline.com> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Grevilma Kurniati Pertiwi (2024) “Implementasi Kebijakan ISPO dan Konflik Agraria: Studi Kasus Konflik Perkebunan Sawit di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat tahun 2011 – 2020”. <https://fisip.ui.ac.id/implementasi-kebijakan-indonesia-sustainable-palm-oil-ispo-dan-konflik-agraria/> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 21.25 wib

Ditjenbun (2023) Buku Statistik Perkebunan Unggulan Nasional 2021-2023 <https://ditjenbun.pertanian.go.id/?publikasi=buku-statistik-perkebunan-2021-2023> Diakses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 22.12 wib

Martiyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia “RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?” <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Berita, 14 Agustus 2012 “Kebijakan Tak Kondusif Hambat Perkembangan Industri Sawit” <https://www.hukumonline.com> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.33 wib

Siaran Pers Kemenko Perkonomian (2022) Pemerintah Terus Dorong Industri Sawit Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4639> Diakses pada tanggal 12 Mei 2024 pukul 22.55 wib

Infosawit.com (2023) “pengembangan industry kelapa sawit dipagari regulasi lingkungan” <https://www.infosawit.com> Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 20.15 wib

Samuel Pablo Pareira (2023) Mencapai Keterlacakan Minyak Sawit Indonesia yang Menyeluruh melalui Harmonisasi ISPO-RSPO <https://www.cips->

indonesia.org/publications/mencapai-keterlacakan-minyak-sawit-indonesia-yang-menyeluruh-melalui-harmonisasi-ispo-rspo?lang=id Diakses pada tanggal 15 Mei 2024 pukul 22.45 wib

Mutuinstitute.com (2022) "5 Masalah Yang Sering Timbul Pada Industri Kelapa Sawit Yang Berkelanjutan" <https://mutuinstitute.com> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.55 wib

Berita BDPKS, (2019) 10 Sikap Pemerintah atas Diskriminasi Uni Eropa Terhadap Kelapa Sawit <https://www.bdp.or.id> Diakses pada tanggal 20 Mei 2024 pukul 22.00 wib

Inemesit Ukpanah (2024) Apakah Minyak Sawit Buruk Bagi Lingkungan? Statistik, Tren, Fakta & Kutipan <https://www.greenmatch.co.uk/is-palm-oil-harming-the-environment> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.35 wib

Martiyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia "RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?" <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 20.55 wib

Widya Finola Ifani Putri (2023) CNBC Indonesia, "Data: Pekerja di Indonesia Mayoritas Lulusan SD" <https://www.cnbcindonesia.com> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.00 wib

Denny Susanto Ainan (2023) Sektor Pertanian Kelapa Sawit Dilanda Krisis SDM <https://mediaindonesia.com> Diakses pada tanggal 21 Mei 2024 pukul 20.15 wib

Berita Sawit BDPKS (2022) SDM Hingga Teknologi, Kendala Hilirisasi Sawit RI <https://www.bdp.or.id> Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 22.34 wib

SawitKita (2023) "Hilirisasi Industri Kelapa Sawit Masih di Level Medium" <https://sawitkita.id> Diakses pada tanggal 23 Mei 2024 pukul 22.00 wib

Dian Hafizah (2011) Agrisep Vol. 10 No. 2 Kajian "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Perdagangan Cpo Indonesia Menggunakan Pendekatan Analisis Integrasi Pasar" <https://gapensiska.org> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 20.00 wib

Kominfo (2015) Keterbatasan Infrastruktur Menghambat Realisasi Investasi

<https://serumpun.babelprov.go.id/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 22.15 wib

Ridzki R. Sigit (2015) Produktivitas Lahan Sawit dan Kebijakan Moratorium Hutan, Apakah Saling Sinergi? <https://www.mongabay.co.id/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 23.00 wib

Sawit Berkelanjutan (2015) 4th Generation of R&D dan Arah Riset Budidaya Kelapa Sawit <https://www.bpdp.or.id> Diakses pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 22.55 wib

Tungkot Sipayung (2024) 17 Isu Sawit Dalam Tata Kelola Dan Kebijakan (2024) <https://palmoilina.asia> Diakses pada tanggal 28 Mei 2024 pukul 20.55 wib

Majalahhortus (2021) "Permentan 18/2021 Mempermudah Pola Kemitraan di Perkebunan Sawit" <https://news.majalahhortus.com> Diakses pada tanggal 30 Mei 2024 pukul 23.00 wib

Siaran Pers Kemenko Perekonomian (20 Oktober 2022) Pemerintah Terus Dorong Industri Sawit Berkelanjutan dari Hulu hingga Hilir <https://ekon.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.00 wib

Ismah Nurhidayati (2023) Perkebunan Kelapa Sawit dan Isu Lingkungan: Dampak, Tantangan, dan Solusi <https://www.mertani.co.id/> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 21.15 wib

Siaran Pers Kemenko Perekonomian (Jakarta, 9 Februari 2023) Bahas Pengembangan Industri Sawit dengan Malaysia, Menko Airlangga Perkuat Upaya dan Kerja Sama Atasi Diskriminasi <https://www.ekon.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.25 wib

Laporan Kinerja Kementerian Pertanian 2022 <https://ppid.pertanian.go.id> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.50 wib

Tungkot Sipayung (2024) 21 Isu Industri Sawit Dalam Isu Ekonomi <https://Palmoilina.Asia/Sawit-hub/sawit-dalam-isu-ekonomi/#311> Diakses pada tanggal 1 Juni 2024 pukul 22.45 wib

Humas EBTKE (2019) Program Mandatori Biodiesel 30% (B30) <https://ebtke.esdm.go.id/post/2019/12/19/2434> Diakses pada tanggal 2 Juni

2024 pukul 21.12 wib

Martiyasari Rizky (2024) CNBC Indonesia “RI Tertinggal! Malaysia Temukan Harta Karun Mahal di Sawit, Apa Itu?” <https://www.cnbcindonesia.com>

sawitindonesia.com (2014) ”dimana peran dan keberpihakan pemerintah terhadap sawit” <https://sawitindonesia.com> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.30 wib

Achmad Deni Daruri (2021) ”Peran Pemerintah dalam Industri Sawit”<https://investor.id/opini> Diakses pada tanggal 31 Januari 2024 pukul 19.35 wib

DJPB.kemenkeu (2015) Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit <https://djp.kemenkeu.go.id/direktorat/ppkblu/id/data-publikasi/berita-terbaru/12-badan-pengelola-dana-kelapa-sawit.html> Diakses pada tanggal 9 Mei 2024 pukul 19.35 wib

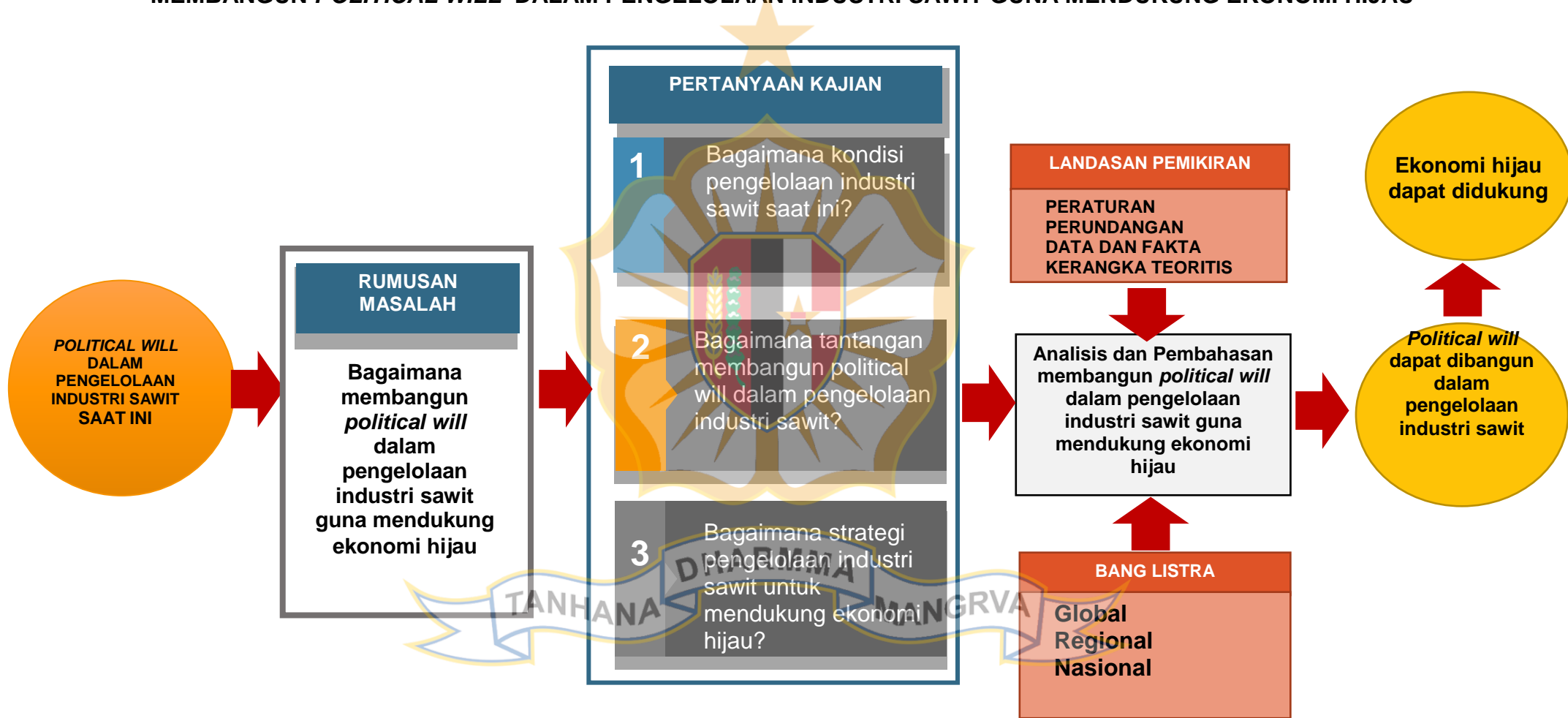
Almasdi Syahza. (2014) Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit <https://almasdi.staff.unri.ac.id> Diakses pada tanggal 22 April 2024 pukul 20.25 wib





# ALUR PIKIR

## MEMBANGUN *POLITICAL WILL* DALAM PENGELOLAAN INDUSTRI SAWIT GUNA Mendukung EKONOMI HIJAU



LAMPIRAN I

**MATRIK PERBEDAAN KEWENANGAN DALAM PENGAWASAN INDUSTRI SAWIT**

<b>ASPEK</b>	<b>INSTITUSI</b>	<b>KEWENANGAN</b>	<b>POTENSI MASALAH</b>	<b>DAMPAK</b>
<b>Regulasi dan Perizinan</b>	Kementerian Pertanian	Menyusun regulasi dan kebijakan pertanian	Tumpang tindih kebijakan dengan kementerian lain	Pengambilan keputusan yang lambat dan tidak konsisten
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mengatur izin terkait penggunaan lahan	Kewenangan tumpang tindih dengan Kementerian Pertanian	Konflik kepentingan dan perizinan yang berlarut-larut
	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Mengatur penggunaan lahan untuk energi	Tumpang tindih izin lahan dengan Kementerian Lingkungan Hidup	Penggunaan lahan yang tidak efisien dan tidak jelas
<b>Pemantauan dan Pengawasan</b>	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS)	Menyalurkan dana dan mengawasi penggunaannya	Overlap dengan tugas Kementerian Pertanian dan Lingkungan Hidup	Pengawasan yang tidak optimal dan koordinasi yang buruk
	Badan Lingkungan Hidup Daerah	Pengawasan dampak lingkungan di daerah	Kurang sinkron dengan kebijakan pusat	Pengawasan yang tidak merata dan tidak efektif
	Badan Pusat Statistik (BPS)	Penyediaan data statistik industri sawit	Data yang tidak terintegrasi dengan instansi lain	Keputusan berbasis data yang tidak akurat atau terlambat
<b>Penegakan Hukum</b>	Kepolisian	Menegakkan hukum terhadap pelanggaran	Kewenangan tumpang tindih dengan kejaksaan	Penegakan hukum yang lambat dan tumpang tindih

ASPEK	INSTITUSI	KEWENANGAN	POTENSI MASALAH	DAMPAK
	Kejaksaan	Menuntut pelanggaran hukum	Overlap dengan kewenangan kepolisian	Proses hukum yang berbelit-belit dan tidak efisien
	Kementerian Hukum dan HAM	Menyusun regulasi penegakan hukum	Overlap dengan fungsi eksekutif lain	Regulasi yang tumpang tindih dan kebijakan yang tidak sinkron
<b>Pengembangan Industri</b>	Kementerian Perindustrian	Mengembangkan industri sawit secara umum	Tumpang tindih dengan kebijakan Kementerian Pertanian	Pengembangan yang tidak terkoordinasi dan tidak fokus
	Kementerian Perdagangan	Mengatur perdagangan produk sawit	Konflik dengan kebijakan industri dan lingkungan	Kebijakan perdagangan yang tidak sejalan dengan pengembangan industri
	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Mengkoordinasikan kebijakan ekonomi	Kewenangan yang luas dan tumpang tindih dengan kementerian lain	Kebijakan yang tidak terfokus dan sulit diimplementasikan



## LAMPIRAN II

**MATRISK 7 PRINSIP TATA KELOLA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
INDONESIA BERKELANJUTAN (ISPO)**

NO	PRINSIP	DESKRIPSI
1.	Kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan	Memastikan bahwa semua kegiatan perkebunan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, termasuk izin usaha, hak atas tanah, dan regulasi lingkungan.
2.	Penerapan Praktik perkebunan yang baik	Mengimplementasikan teknik budidaya yang ramah lingkungan, pengendalian hama yang berkelanjutan, dan pemeliharaan tanaman yang efisien.
3.	Pengelolaan lingkungan hidup, SDA dan keanekaragaman	Melindungi lingkungan dengan manajemen limbah yang baik, konservasi sumber daya alam, dan upaya perlindungan terhadap hutan dan lahan gambut.
4.	Tanggung jawab ketenagakerjaan	Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, upah yang adil, serta hak-hak pekerja seperti kebebasan berserikat dan perlindungan terhadap pekerja anak.
5.	Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat	Memberdayakan masyarakat lokal melalui pengembangan infrastruktur, layanan sosial, pendidikan, pelatihan, dan kesempatan kerja.
6.	Penerapan transparansi	Melakukan pelaporan yang terbuka dan jujur tentang kegiatan operasional, serta berkomunikasi secara transparan dengan pemangku kepentingan.
7.	Peningkatan usaha secara berkelanjutan	Mengadopsi inovasi teknologi dan praktik manajemen terbaru untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha secara keseluruhan.

## LAMPIRAN III

**MATRIKS PRODUK TURUNAN INDUSTRI KELAPA SAWIT INDONESIA  
DAN MALAYSIA**

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
1	Minyak dan Lemak	Minyak Goreng Sawit (Palm Cooking Oil)	Minyak Goreng Sawit (Palm Cooking Oil)
2		Minyak Goreng Padat (Hard Frying Oil)	Minyak Goreng Padat (Hard Frying Oil)
3		Minyak Goreng Cair (Liquid Frying Oil)	Minyak Goreng Cair (Liquid Frying Oil)
4		Margarin (Margarine)	Margarin (Margarine)
5		Shortening	Shortening
6		Minyak Sawit Murni (Pure Palm Oil)	Minyak Sawit Murni (Pure Palm Oil)
7		Minyak Kelapa Sawit RBD (RBD Palm Oil)	Minyak Kelapa Sawit RBD (RBD Palm Oil)
8		Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO)	Minyak Kelapa Sawit Mentah (CPO)
9		Minyak Sawit Padat (Palm Olein)	Minyak Sawit Padat (Palm Olein)
10		Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil)	Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil)
11	Bahan Baku Makanan	Cokelat Lemak Nabati (Vegetable Fat for Chocolate)	Cokelat Lemak Nabati (Vegetable Fat for Chocolate)
12		Es Krim (Ice Cream Fat)	Es Krim (Ice Cream Fat)
13		Biskuit (Fat for Biscuits)	Biskuit (Fat for Biscuits)
14		Keripik (Snack Food Oil)	Keripik (Snack Food Oil)
15		Mentega (Butter Substitute)	Mentega (Butter Substitute)
16	Produk Pangan	Susu Kental Manis (Condensed Milk Fat)	Susu Kental Manis (Condensed Milk Fat)
17		Susu Bubuk (Milk Powder Fat)	Susu Bubuk (Milk Powder Fat)
18		Kopi Instan (Instant Coffee Creamer)	Kopi Instan (Instant Coffee Creamer)
19		Saus Salad (Salad Dressings Fat)	Saus Salad (Salad Dressings Fat)
20		Saus Krim (Cream Sauces Fat)	Saus Krim (Cream Sauces Fat)
21		Makanan Bayi (Infant Formula Fat)	Makanan Bayi (Infant Formula Fat)
22	Produk Kosmetik dan Kesehatan	Sabun Batang (Bar Soap)	Sabun Batang (Bar Soap)
23		Sabun Cair (Liquid Soap)	Sabun Cair (Liquid Soap)
24		Sampo (Shampoo)	Sampo (Shampoo)
25		Krim Kulit (Skin Creams)	Krim Kulit (Skin Creams)
26		Lotion Tubuh (Body Lotion)	Lotion Tubuh (Body Lotion)
27		Lipstik (Lipsticks)	Lipstik (Lipsticks)
28		Foundation (Foundations)	Foundation (Foundations)

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
29		Maskara (Mascaras)	Maskara (Mascaras)
30		Pewarna Rambut (Hair Dyes)	Pewarna Rambut (Hair Dyes)
31		Kondisioner Rambut (Hair Conditioners)	Kondisioner Rambut (Hair Conditioners)
32		Vitamin E dari Minyak Sawit (Palm Tocopherol)	Vitamin E dari Minyak Sawit (Palm Tocopherol)
33	Oleokimia	Asam Stearat (Stearic Acid)	Asam Stearat (Stearic Acid)
34		Asam Oleat (Oleic Acid)	Asam Oleat (Oleic Acid)
35		Asam Palmitat (Palmitic Acid)	Asam Palmitat (Palmitic Acid)
36		Asam Laurat (Lauric Acid)	Asam Laurat (Lauric Acid)
37		Asam Miristat (Myristic Acid)	Asam Miristat (Myristic Acid)
38		Asam Kaprat (Capric Acid)	Asam Kaprat (Capric Acid)
39		Asam Kaprilat (Caprylic Acid)	Asam Kaprilat (Caprylic Acid)
40		Gliserin (Glycerin)	Gliserin (Glycerin)
41		Alkanolamida (Alkanolamides)	Alkanolamida (Alkanolamides)
42		Alkil Poligliserida (Alkyl Polyglycosides)	Alkil Poligliserida (Alkyl Polyglycosides)
43		Alkil Esters (Alkyl Esters)	Alkil Esters (Alkyl Esters)
44	Produk Industri	Pelumas (Lubricants)	Pelumas (Lubricants)
45		Deterjen (Detergents)	Deterjen (Detergents)
46		Emulsifier	Emulsifier
47		Surfactant	Surfactant
48		Plastik Biodegradable (Biodegradable Plastics)	Plastik Biodegradable (Biodegradable Plastics)
49		Karet Alam (Natural Rubber Additives)	Karet Alam (Natural Rubber Additives)
50		Adhesives	Adhesives
51		Inks	Inks
52		Pelapis (Coatings)	Pelapis (Coatings)
53		Penghilang Noda (Stain Removers)	Penghilang Noda (Stain Removers)
54	Energi dan Bahan Bakar	Biodiesel (Biodiesel from Palm Oil)	Biodiesel (Biodiesel from Palm Oil)
55		Bioethanol	Bioethanol
56		Biobutanol	Biobutanol
57		Bahan Bakar Pembangkit Listrik (Power Plant Fuel)	Bahan Bakar Pembangkit Listrik (Power Plant Fuel)
58		Briket Biomassa (Biomass Briquettes)	Briket Biomassa (Biomass Briquettes)
59		Biochar	Biochar

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
60		Biogas	Biogas
61	Produk Tekstil dan Bahan Bangunan	Serat Tekstil (Textile Fibers)	Serat Tekstil (Textile Fibers)
62		Panel Komposit (Composite Panels)	Panel Komposit (Composite Panels)
63		Karton (Cartons)	Karton (Cartons)
64		Kertas (Paper)	Kertas (Paper)
65		Biofibers	Biofibers
66		Insulating Materials	Insulating Materials
67		Bio-plasticizers	Bio-plasticizers
68	Produk Kesehatan dan Farmasi	Suppositories	Suppositories
69		Capsules	Capsules
70		Creams and Ointments	Creams and Ointments
71		Pharmaceutical Emulsifiers	Pharmaceutical Emulsifiers
72		Carrier Oils	Carrier Oils
73		Transdermal Delivery Systems	Transdermal Delivery Systems
74	Produk Pembersih dan Perawatan Rumah	Sabun Cuci Piring (Dishwashing Liquid)	Sabun Cuci Piring (Dishwashing Liquid)
75		Sabun Pembersih (Cleaning Soap)	Sabun Pembersih (Cleaning Soap)
76		Deterjen Laundry (Laundry Detergent)	Deterjen Laundry (Laundry Detergent)
77		Disinfektan (Disinfectants)	Disinfektan (Disinfectants)
78		Pengharum Ruangan (Air Fresheners)	Pengharum Ruangan (Air Fresheners)
79		Pembersih Lantai (Floor Cleaners)	Pembersih Lantai (Floor Cleaners)
80		Penghilang Noda Kain (Fabric Stain Removers)	Penghilang Noda Kain (Fabric Stain Removers)
81	Produk Peternakan dan Pertanian	Pakan Ternak (Animal Feed)	Pakan Ternak (Animal Feed)
82		Palm Kernel Cake	Palm Kernel Cake
83		Pupuk Organik (Organic Fertilizers)	Pupuk Organik (Organic Fertilizers)
84		Feed Additives	Feed Additives
85		Palm Oil Mill Effluent (POME) Fertilizers	Palm Oil Mill Effluent (POME) Fertilizers
86	Bahan Kimia Lainnya	Fatty Alcohols	Fatty Alcohols
87		Fatty Acid Esters	Fatty Acid Esters
88		Methyl Esters	Methyl Esters
89		Ethoxylates	Ethoxylates

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
90		Sorbitan Esters	Sorbitan Esters
91		Methyl Esters of Fatty Acids (MEFA)	Methyl Esters of Fatty Acids (MEFA)
92	Produk Lainnya	Karbon Aktif (Activated Carbon)	Karbon Aktif (Activated Carbon)
93		Pupuk Cair (Liquid Fertilizers)	Pupuk Cair (Liquid Fertilizers)
94		Asam Lemak (Fatty Acids)	Asam Lemak (Fatty Acids)
95		Cairan Hidrolik (Hydraulic Fluids)	Cairan Hidrolik (Hydraulic Fluids)
96		Refrigerants	Refrigerants
97		Solvents	Solvents
98	Produk Inovatif	Nanoparticles from Palm Oil	Nanoparticles from Palm Oil
99		Biodegradable Cutlery	Biodegradable Cutlery
100		Biodegradable Packaging	Biodegradable Packaging
101		Bio-based Polymers	Bio-based Polymers
102		Bio-composite Materials	Bio-composite Materials
103		Cosmeceuticals	Cosmeceuticals
104		Nutricosmetics	Nutricosmetics
105		Functional Foods	Functional Foods
106	Produk Tambahan	Serbuk Pembersih (Cleaning Powder)	Serbuk Pembersih (Cleaning Powder)
107		Krim Pencukur (Shaving Cream)	Krim Pencukur (Shaving Cream)
108		Deodoran (Deodorants)	Deodoran (Deodorants)
109		Krim Matahari (Sun Cream)	Krim Matahari (Sun Cream)
110		Krim Anti-Polusi (Anti-pollution Cream)	Krim Anti-Polusi (Anti-pollution Cream)
111		Bahan Pembersih Logam (Metal Cleaning Agents)	Bahan Pembersih Logam (Metal Cleaning Agents)
112		Pelarut Organik (Organic Solvents)	Pelarut Organik (Organic Solvents)
113		Plastisizer Bio (Bio-plasticizers)	Plastisizer Bio (Bio-plasticizers)
114		Adhesive untuk Kertas (Paper Adhesives)	Stabilizer Makanan (Food Stabilizers)
115		Additive Cat (Paint Additives)	Pengemulsi Makanan (Food Emulsifiers)
116		Additive untuk Bahan Karet (Rubber Additives)	Antioksidan (Antioxidants)
117		Agen Pengemulsi (Emulsifying Agents)	Antimikroba (Antimicrobial Agents)
118		Agen Pengeras (Hardening Agents)	Bahan Pemutih (Bleaching Agents)
119		Agen Pembusa (Foaming Agents)	Agen Pengental (Thickening Agents)
120		Agen Pengawet (Preservative Agents)	Anti-Korosi (Anti-corrosion Agents)

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
121		Agen Pelembut (Softening Agents)	Produk untuk Industri Konstruksi
122		Bahan Dasar Produk Elektronik (Base for Electronic Products)	Resin (Resins)
123		Pelapis Anti-Karat (Anti-rust Coatings)	Lem (Glues)
124		Pelapis Penghalang Air (Waterproof Coatings)	Cat (Paints)
125		Bahan Pembentuk Tablet (Tableting Agents)	Sealants
126		Agen Pelarut untuk Produksi Tekstil (Solvent for Textile Production)	Pelapis Anti-Air (Waterproof Coatings)
127		Bahan Penambah Kualitas Tekstil (Textile Quality Enhancers)	Agen Pengawet Kayu (Wood Preservatives)
128		Agen Pengikat (Binding Agents)	Bahan Perekat (Adhesive Materials)
129		Bahan Dasar untuk Plastik (Base for Plastic Products)	Agen Pengisi (Fillers)
130		Pewarna dan Pigmen (Dyes and Pigments)	Agen Pelindung (Protective Agents)
131		Agen Pengental (Thickening Agents)	Pewarna Tekstil (Textile Dyes)
132		Stabilizer untuk Plastik (Plastic Stabilizers)	Bahan Pemutih Kain (Fabric Bleaching Agents)
133		Bahan Pengisi untuk Kertas (Paper Fillers)	Agen Pelunak (Softening Agents)
134		Pelarut untuk Cat dan Tinta (Solvent for Paints and Inks)	Agen Pengeras (Hardening Agents)
135		Agen Pengurai Bahan Organik (Biodegradation Agents)	Agen Anti-Statik (Anti-static Agents)
136		Agen Penjernih untuk Air (Water Clarification Agents)	Agen Penstabil (Stabilizing Agents)
137		Bahan Dasar untuk Sabun Transparan (Base for Transparent Soap)	Bahan Bakar Bio (Biofuels)
138		Bahan Dasar untuk Produk Medis (Base for Medical Products)	Pelumas Mesin (Engine Lubricants)
139		Bahan Kimia untuk Penyerap Kelembaban (Moisture Absorbing Chemicals)	Pelumas Transmisi (Transmission Fluids)
140		Agen Pengurang Bau (Odor Reducing Agents)	Pelapis Anti-Karat (Anti-rust Coatings)
141		Bahan Dasar untuk Pengemasan Biodegradable (Base for Biodegradable Packaging)	Agen Pembersih Mesin (Engine Cleaning Agents)
142		Pengisi untuk Bahan Bangunan (Building Material Fillers)	Cairan Pendingin (Coolant Fluids)

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
143		Pengisi untuk Bahan Cat (Paint Fillers)	Komponen Elektronik (Electronic Components)
144		Komposit untuk Konstruksi (Construction Composites)	Isolator (Insulators)
145		Karbon untuk Filter Air (Water Filter Carbon)	Pelumas (Lubricants)
146		Pengisi untuk Plastik (Plastic Fillers)	Agen Pengisi (Filling Agents)
147		Agen Pembentuk Gelembung (Foam Forming Agents)	Agen Penstabil (Stabilizing Agents)
148		Bahan Dasar untuk Karet (Base for Rubber Products)	Resin Penghantar Listrik (Conductive Resins)
149		Additive untuk Bahan Karet (Rubber Additives)	Pelindung Komponen (Component Protectors)
150		Pewarna untuk Kain (Fabric Dyes)	Bahan Bakar Jet Bio (Bio Jet Fuel)
151		Bahan Pembuat Pasta Gigi (Toothpaste Base)	Pelumas Pesawat (Aircraft Lubricants)
152		Komponen Elektronik (Electronic Components)	Agen Anti-Es (Anti-icing Agents)
153		Additive untuk Produksi Kaca (Glass Production Additives)	Agen Pembersih Mesin Pesawat (Aircraft Engine Cleaning Agents)
154		Bahan Pengisi untuk Kosmetik (Cosmetic Fillers)	Cairan Hidrolik Pesawat (Aircraft Hydraulic Fluids)
155		Bahan Pengawet untuk Kosmetik (Cosmetic Preservatives)	Bahan Bakar Bio Laut (Marine Biofuels)
156		Pengisi untuk Produk Farmasi (Pharmaceutical Fillers)	Pelumas Kapal (Marine Lubricants)
157		Komponen untuk Produksi Kapsul (Capsule Components)	Agen Anti-Korosi (Anti-corrosion Agents)
158		Bahan Dasar untuk Pembalut (Base for Sanitary Products)	Agen Pembersih Mesin Kapal (Marine Engine Cleaning Agents)
159		Agen Penguat untuk Tekstil (Textile Strengtheners)	Pelapis Anti-Fouling (Anti-fouling Coatings)
160		Bahan Pengisi untuk Bahan Konstruksi (Construction Material Fillers)	Pelumas Traktor (Tractor Lubricants)
161		Additive untuk Perekat (Adhesive Additives)	Bahan Bakar Bio Pertanian (Agricultural Biofuels)
162		Bahan Dasar untuk Bahan Kedokteran (Base for Medical Materials)	Pupuk Cair Bio (Bio Liquid Fertilizers)
163		Additive untuk Produksi Logam (Metal Production Additives)	Agen Pembasmis Hama (Pesticides)
164		Bahan Pengisi untuk Bahan Pembuatan	Agen Penyubur Tanaman (Plant Growth)

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
		Kendaraan (Vehicle Manufacturing Fillers)	Enhancers)
165		Komponen untuk Produksi Karet (Rubber Production Components)	Agen Pengendali Gulma (Herbicides)
166		Bahan Pengisi untuk Produk Elektronik (Electronic Product Fillers)	Beton Bio (Bio Concrete)
167		Pengisi untuk Produk Farmasi (Pharmaceutical Fillers)	Pelumas Mesin Konstruksi (Construction Machine Lubricants)
168		Agen Penguat untuk Karet (Rubber Strengtheners)	Agen Penguat Beton (Concrete Reinforcement Agents)
169		Additive untuk Produk Pembersih (Cleaning Product Additives)	Bahan Pembangunan Bio (Bio Building Materials)
170		Agen Pengisi untuk Bahan Pembersih (Cleaning Material Fillers)	Bahan Bakar Bio untuk Pembangkitan Listrik (Bio Power Generation Fuel)
171		Additive untuk Produksi Cat (Paint Production Additives)	Pelumas Turbin (Turbine Lubricants)
172		Agen Pembentuk Busa untuk Produk Pembersih (Cleaning Product Foam Agents)	Bahan Pelapis Anti-Korosi (Anti-corrosion Coatings)
173		Bahan Dasar untuk Produksi Bahan Karet (Base for Rubber Material Production)	Agen Pembersih Turbin (Turbine Cleaning Agents)
174		Additive untuk Produk Kebersihan (Sanitation Product Additives)	Pelumas Bor (Drilling Lubricants)
175		Pengisi untuk Produk Kebersihan (Sanitation Product Fillers)	Bahan Bakar Bio untuk Pengolahan Minyak (Bio Fuel for Oil Processing)
176		Additive untuk Produksi Produk Plastik (Plastic Product Production Additives)	Pelumas Mesin Pengolahan (Processing Machine Lubricants)
177		Agen Pengisi untuk Produksi Produk Plastik (Plastic Product Production Fillers)	Agen Peningkat Viskositas (Viscosity Enhancers)
178		Bahan Pengisi untuk Produk Elektronik (Electronic Product Production Fillers)	Agen Anti-Penguapan (Anti-evaporation Agents)
179		Additive untuk Produksi Produk Farmasi (Pharmaceutical Product Production Additives)	Agen Penstabil (Stabilizing Agents)
180	Produk untuk Industri Kertas		Agen Pelapis Kertas (Paper Coating Agents)
181			Agen Pemutih Kertas (Paper Bleaching Agents)
182			Agen Pengikat (Binding Agents)
183			Agen Pengisi (Filling Agents)
184	Produk untuk Industri Pertahanan		Bahan Bakar Bio untuk Militer (Military

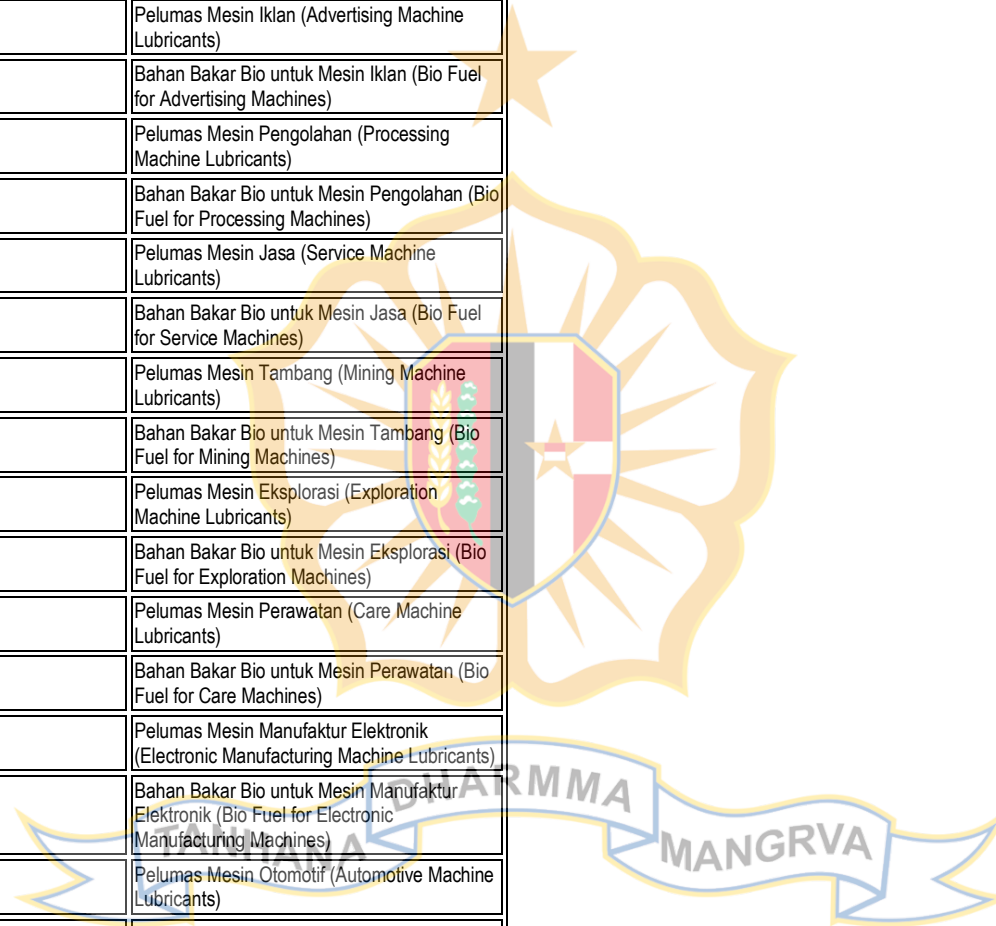
NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
			Biofuels)
185			Pelumas Mesin Militer (Military Engine Lubricants)
186			Agen Anti-Karat (Anti-rust Agents)
187			Pelumas Senjata (Weapon Lubricants)
188	Produk untuk Industri Telekomunikasi		Agen Pelapis Komponen Telekomunikasi (Telecommunication Component Coatings)
189			Pelumas untuk Peralatan Telekomunikasi (Telecommunication Equipment Lubricants)
190			Agen Penstabil Sinyal (Signal Stabilizing Agents)
191	Produk untuk Industri Transportasi		Pelumas Kendaraan (Vehicle Lubricants)
192			Bahan Bakar Bio untuk Transportasi (Bio Transport Fuels)
193			Pelumas Mesin Transportasi (Transport Engine Lubricants)
194	Produk untuk Industri Air dan Limbah		Agen Pengolahan Air Limbah (Waste Water Treatment Agents)
195			Agen Pengolahan Air Minum (Drinking Water Treatment Agents)
196	Produk untuk Industri Logistik		Pelumas Kendaraan Logistik (Logistics Vehicle Lubricants)
197			Bahan Bakar Bio untuk Logistik (Logistics Biofuels)
198	Produk untuk Industri Kehutanan		Pelumas Mesin Penebangan (Logging Machine Lubricants)
199			Bahan Bakar Bio untuk Pengolahan Kayu (Bio Fuel for Wood Processing)
200	Produk untuk Industri Pariwisata		Pelumas Mesin Wisata (Tourism Machine Lubricants)
201			Bahan Bakar Bio untuk Transportasi Wisata (Bio Fuel for Tourism Transport)
202	Produk untuk Industri Musik		Pelumas Alat Musik (Musical Instrument Lubricants)
203			Bahan Bakar Bio untuk Alat Musik Elektronik (Bio Fuel for Electronic Musical Instruments)
204	Produk untuk Industri Seni dan		Pelumas Mesin Pahat (Sculpture Machine



NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
	Budaya		Lubricants)
205			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Pahat (Bio Fuel for Sculpture Machines)
206	Produk untuk Industri Pendidikan		Pelumas Mesin Pendidikan (Educational Machine Lubricants)
207			Bahan Bakar Bio untuk Peralatan Pendidikan (Bio Fuel for Educational Equipment)
208	Produk untuk Industri Penelitian		Pelumas Mesin Penelitian (Research Machine Lubricants)
209			Bahan Bakar Bio untuk Alat Penelitian (Bio Fuel for Research Equipment)
210	Produk untuk Industri Perbankan		Pelumas Mesin ATM (ATM Machine Lubricants)
211			Bahan Bakar Bio untuk Mesin ATM (Bio Fuel for ATM Machines)
212	Produk untuk Industri Real Estate		Pelumas Mesin Konstruksi Real Estate (Real Estate Construction Machine Lubricants)
213			Bahan Bakar Bio untuk Pengolahan Real Estate (Bio Fuel for Real Estate Processing)
214	Produk untuk Industri Keuangan		Pelumas Mesin Transaksi Keuangan (Financial Transaction Machine Lubricants)
215			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Transaksi Keuangan (Bio Fuel for Financial Transaction Machines)
216	Produk untuk Industri Manufaktur		Pelumas Mesin Manufaktur (Manufacturing Machine Lubricants)
217			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Manufaktur (Bio Fuel for Manufacturing Machines)
218	Produk untuk Industri Pangan		Pelumas Mesin Pengolahan Pangan (Food Processing Machine Lubricants)
219			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Pengolahan Pangan (Bio Fuel for Food Processing Machines)
220	Produk untuk Industri Transportasi Udara		Pelumas Mesin Transportasi Udara (Air Transport Machine Lubricants)
221			Bahan Bakar Bio untuk Transportasi Udara (Bio Fuel for Air Transport)
222	Produk untuk Industri Transportasi Laut		Pelumas Mesin Transportasi Laut (Marine Transport Machine Lubricants)
223			Bahan Bakar Bio untuk Transportasi Laut (Bio

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
			Fuel for Marine Transport)
224	Produk untuk Industri Transportasi Darat		Pelumas Mesin Transportasi Darat (Land Transport Machine Lubricants)
225			Bahan Bakar Bio untuk Transportasi Darat (Bio Fuel for Land Transport)
226	Produk untuk Industri Penerbitan		Pelumas Mesin Penerbitan (Publishing Machine Lubricants)
227			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Penerbitan (Bio Fuel for Publishing Machines)
228	Produk untuk Industri Periklanan		Pelumas Mesin Periklanan (Advertising Machine Lubricants)
229			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Periklanan (Bio Fuel for Advertising Machines)
230	Produk untuk Industri Penyiaran		Pelumas Mesin Penyiaran (Broadcasting Machine Lubricants)
231			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Penyiaran (Bio Fuel for Broadcasting Machines)
232	Produk untuk Industri Komunikasi		Pelumas Mesin Komunikasi (Communication Machine Lubricants)
233			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Komunikasi (Bio Fuel for Communication Machines)
234	Produk untuk Industri Telekomunikasi		Pelumas Mesin Telekomunikasi (Telecommunication Machine Lubricants)
235			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Telekomunikasi (Bio Fuel for Telecommunication Machines)
236	Produk untuk Industri Ritel		Pelumas Mesin Kasir (Cash Register Machine Lubricants)
237			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Kasir (Bio Fuel for Cash Register Machines)
238	Produk untuk Industri Logistik		Pelumas Mesin Logistik (Logistics Machine Lubricants)
239			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Logistik (Bio Fuel for Logistics Machines)
240	Produk untuk Industri Pengemasan		Pelumas Mesin Pengemasan (Packaging Machine Lubricants)
241			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Pengemasan (Bio Fuel for Packaging Machines)
242	Produk untuk Industri Pabrik		Pelumas Mesin Pabrik (Factory Machine Lubricants)

NO	KATEGORI	179 PRODUK INDONESIA	260 PRODUK MALAYSIA
243			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Pabrik (Bio Fuel for Factory Machines)
244	Produk untuk Industri Periklanan		Pelumas Mesin Iklan (Advertising Machine Lubricants)
245			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Iklan (Bio Fuel for Advertising Machines)
246	Produk untuk Industri Pengolahan		Pelumas Mesin Pengolahan (Processing Machine Lubricants)
247			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Pengolahan (Bio Fuel for Processing Machines)
248	Produk untuk Industri Jasa		Pelumas Mesin Jasa (Service Machine Lubricants)
249			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Jasa (Bio Fuel for Service Machines)
250	Produk untuk Industri Pertambangan		Pelumas Mesin Tambang (Mining Machine Lubricants)
251			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Tambang (Bio Fuel for Mining Machines)
252	Produk untuk Industri Eksplorasi		Pelumas Mesin Eksplorasi (Exploration Machine Lubricants)
253			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Eksplorasi (Bio Fuel for Exploration Machines)
254	Produk untuk Industri Perawatan dan Kecantikan		Pelumas Mesin Perawatan (Care Machine Lubricants)
255			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Perawatan (Bio Fuel for Care Machines)
256	Produk untuk Industri Manufaktur Elektronik		Pelumas Mesin Manufaktur Elektronik (Electronic Manufacturing Machine Lubricants)
257			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Manufaktur Elektronik (Bio Fuel for Electronic Manufacturing Machines)
258	Produk untuk Industri Otomotif dan Transportasi		Pelumas Mesin Otomotif (Automotive Machine Lubricants)
259			Bahan Bakar Bio untuk Mesin Otomotif (Bio Fuel for Automotive Machines)
260	Produk untuk Industri Infrastruktur		Pelumas Mesin Infrastruktur (Infrastructure Machine Lubricants)



**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**



**DAFTAR RIWAYAT  
HIDUP TNI / POLRI**

**I. DATA POKOK**

NAMA LENGKAP	: SYAHRIL SAHARDA, S.I.K., M.Si.	TEMPAT LAHIR	: BATU SANGKAR	AGAMA	: ISLAM
PANGKAT/KORPS	: KOMBES POL	KATEGORI	: A K T I F	STATUS KAWIN	: KAWIN
NRP	: 73120840	TMT KATEGORI	: 13-12-1973	SUAMI/ISTERI	:
JABATAN	: KASUBDIT PULLAHTAMINDIK DITMATLAITADIK DEBIDDIKPIKATNAS LEMHANNAS RI	SUMBER PA	: AKABRI 1996	N A M A	:
TMT JABATAN	: 17-12-2020	TMT P O L	: 13-12-1973	PEKERJAAN	:
TANGGAL LAHIR	: 05-12-1973	SUKU BANGSA	: MINANG	PANGKAT/GOL	:
ALAMAT & KODE POS :				JUMLAH ANAK	:
NO. HANDPHONE :					

**II. PENDIDIKAN**

**U M U M**

		<u>BANG UM</u>	<u>KEPOLISIAN</u>	<u>BANG SPES</u>	
1. SD	TAHUN 1987	1. AKABRI	TAHUN 1996	1. PA DAS SERSE	TAHUN 1997
2. SMP	TAHUN 1990	2. PTIK	TAHUN 2005	2. PA LAN SERSE NARKOTIK	TAHUN 1999
3. SMA	TAHUN 1993	3. SESPIMMEN	TAHUN 2011	3. PA LAN REGIDENT RANMOR	TAHUN 2001
4. S2	TAHUN 2010			4. KIBI	TAHUN 2007
				5. ASSESMENT KAPOLRES	TAHUN 2013
				6. ASSESMENT KAPOLRES	TAHUN 2013

III. KECAKAPAN BAHASA

ASING

1. INGGRIS

AKTIF/~~PASIF~~

DAERAH

1. MINANG

AKTIF/~~PASIF~~

2. JAWA

AKTIF/~~PASIF~~

VI. PENUGASAN LUAR NEGERI

MACAM TUJUAN

TAHUN

NEGARA TUJUAN

IV. TANDA JASA

1. SATYALENCANA PENGABDIAN VIII TAHUN

2. SATYALENCANA DWIDYA SISTHA

3. SATYALENCANA DHARMA NUSA

V. RIWAYAT PENUGASAN OPERASI

VII. RIWAYAT KEPANGKATAN

PANGKAT

TMT

NO. SKEP / SPRIN

1. IPDA

19-12-1996

2. IPTU

01-01-2000

3. AKP

01-01-2003

4. KOMPOL

01-01-2008

5. AKBP

01-01-2012

6. KOMBES

01-07-2020

VII. RIWAYAT JABATAN

JABATAN

TMT

NO. SKEP/SPRIN

JABATAN

TMT

NO. SKEP/SPRIN

1. PAMAPTA POLRES BADUNG POLDA BALI

02-05-1997

17. KAPOLRES HULU SUNGAI TENGAH

30-10-2014

2. KAURBINOPS IPP POLRES BADUNG POLDA BALI

01-01-1998

POLDA KALSEL

3. DANTON TAR AKPOL

22-07-1999

18. KAPOLRES BARITO KUALA POLDA

07-09-2016

4. DANTON TAR AKPOL

30-09-2000

KALSEL

5. DANKIE TAR AKPOL

05-09-2001

19. WADIRPAMOBVIT POLDA KALSEL

30-10-2017

6. PAUR SUBBAG STNK DITLANTAS POLDA RIAU

28-01-2002

20. KASUBDIT GIATTAMA DITOPSDIK

15-06-2020 KEP 85 THN 2020

7. WAKASAT LANTAS POLTABES BERELANG POLDA RIAU	30-04-2002	DEBIDDIKPIMKATNAS LEMHANNAS RI	
8. KASAT SAMAPTA POLTABES PEKANBARU POLDA RIAU	12-03-2005	21. KASUBDIT PULLAHTAMINDIK DITMATLAITADIK DEBIDDIKPIMKATNAS LEMHANNAS RI	17-12-2020 KEP 176 THN 2020
9. KASAT LANTAS POLRES DUMAI POLDA RIAU	30-05-2005		
10. KASI BPKB DITLANTAS POLDA RIAU	30-05-2006		
11. WAKAPOLRES INDRAGIRI HULU POLDA RIAU	13-03-2009		
12. WAKAPOLRES BENGKALIS POLDA RIAU	18-03-2010		
13. PAMEN POLDA RIAU (DLM RINGK DOK SESPIMEN)	01-03-2011		
14. PAMEN POLDA KALSEL	01-11-2011		
15. KABAGBINOPS ROOPS POLDA KALSEL	17-11-2011		
16. KASAT PJR DITLANTAS POLDA KALSEL	14-12-2012		

**Daftar Riwayat Hidup ini telah dibuat dengan sebenarnya**

Dibuat di: Jakarta  
 Pada Tanggal : 23 Juli 2024  
 Yang Bersangkutan



*Syahril Saharda*  
 Syahril Saharda, S.I.K., M.Si.  
 Kombes Pol NRP 73120840